



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

KODE REKENING PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program dan kegiatan beserta kode rekeningnya sesuai dengan kebutuhan obyektif, nyata dan sesuai karakteristik daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, dipandang perlu mengembangkan kode rekening perencanaan dan penganggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 20107 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE REKENING  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KABUPATEN  
SEMARANG.

## Pasal 1

- (1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
- (2) Kode Pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.
- (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

## Pasal 2

Uraian susunan kode rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

## Pasal 3

Uraian mengenai Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang;
- b. Lampiran II Kode Perangkat Daerah dan Urusan Yang Dilaksanakan;
- c. Lampiran III Susunan Kode Akun Keuangan Daerah;
- d. Lampiran IV Kode Rekening Pendapatan Daerah;
- e. Lampiran V Kode dan Klasifikasi Fungsi;
- f. Lampiran VI Kode dan Klasifikasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Pengelolaan Keuangan Negara;
- g. Lampiran VII Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Lampiran VIII Kode Rekening Belanja Daerah; dan
- i. Lampiran IX Kode Rekening Pembiayaan Daerah.

Pasal 4

Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 34) tetap berlaku untuk proses perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 12-06-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 12-06-2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA  
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 39 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 KODE REKENING PERENCANAAN DAN  
 PENGANGGARAN KABUPATEN SEMARANG

**KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN  
 PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG**

| KODE     |           |           |            | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  |
|----------|-----------|-----------|------------|---|
| <b>1</b> |           |           |            | <b>URUSAN WAJIB</b>   |
| <b>1</b> | <b>01</b> |           |            | <b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>                                 |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>01</b> |            | <b>PENDIDIKAN</b>   |
| 1        | 01        | 01        | 1.01.01.01 | DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN<br>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA              |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>02</b> |            | <b>KESEHATAN</b>  |
| 1        | 01        | 02        | 1.01.02.01 | DINAS KESEHATAN   |
| 1        | 01        | 02        | 1.01.02.02 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA                                    |
| 1        | 01        | 02        | 1.01.02.03 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN                                     |
| 1        | 01        | 02        | 3.01.02.01 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH             |
| 1        | 01        | 02        | 4.01.03.01 | SEKRETARIAT DAERAH  |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>03</b> |            | <b>PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b>                                |
| 1        | 01        | 03        | 1.01.03.01 | DINAS PEKERJAAN UMUM  |
| 1        | 01        | 03        | 4.01.03.01 | SEKRETARIAT DAERAH  |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>04</b> |            | <b>PERUMAHAN RAKYAT</b>   |
| 1        | 01        | 04        | 1.01.03.01 | DINAS PEKERJAAN UMUM  |
| 1        | 01        | 04        | 1.01.05.01 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN<br>PEMADAM KEBAKARAN                 |
| 1        | 01        | 04        | 3.01.02.01 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH             |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>05</b> |            | <b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN<br/>PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |
| 1        | 01        | 05        | 1.01.05.01 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN<br>PEMADAM KEBAKARAN                 |
| 1        | 01        | 05        | 1.01.05.02 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                 |
| 1        | 01        | 05        | 5.01.01.01 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                  |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>06</b> |            | <b>SOSIAL</b>   |
| 1        | 01        | 06        | 1.01.06.01 | DINAS SOSIAL  |
| 1        | 01        | 06        | 4.01.03.01 | SEKRETARIAT DAERAH  |
| <b>1</b> | <b>02</b> |           |            | <b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>                             |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>01</b> |            | <b>TENAGA KERJA</b>   |
| 1        | 02        | 01        | 1.02.01.01 | DINAS TENAGA KERJA  |

| KODE     |           |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  |
|----------|-----------|-----------|---|
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>02</b> | <b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>                               |
| 1        | 02        | 02        | 1.02.02.01 DINAS PEMBEDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                      |
| 1        | 02        | 02        | 4.01.03.01 SEKRETARIAT DAERAH   |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>03</b> | <b>KETAHANAN PANGAN</b>   |
| 1        | 02        | 03        | 2.01.03.01 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN                                  |
| 1        | 02        | 03        | 4.01.03.01 SEKRETARIAT DAERAH   |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>04</b> | <b>PERTANAHAN</b>   |
| 1        | 02        | 04        | 3.01.03.01 BADAN KEUANGAN DAERAH  |
| 1        | 02        | 04        | 4.01.03.01 SEKRETARIAT DAERAH   |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>05</b> | <b>LINGKUNGAN HIDUP</b>   |
| 1        | 02        | 05        | 1.02.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP   |
| 1        | 02        | 05        | 4.01.03.01 SEKRETARIAT DAERAH   |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>06</b> | <b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>   |
| 1        | 02        | 06        | 1.02.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>07</b> | <b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>   |
| 1        | 02        | 07        | 1.02.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                 |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>08</b> | <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>                               |
| 1        | 02        | 08        | 1.02.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>09</b> | <b>PERHUBUNGAN</b>  |
| 1        | 02        | 09        | 1.02.09.01 DINAS PERHUBUNGAN  |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>10</b> | <b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>   |
| 1        | 02        | 10        | 1.02.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                       |
| 1        | 02        | 10        | 4.01.03.01 SEKRETARIAT DAERAH   |
| 1        | 02        | 10        | 4.01.04.01 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                             |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>11</b> | <b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>  |
| 1        | 02        | 11        | 1.02.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN             |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>12</b> | <b>PENANAMAN MODAL</b>  |
| 1        | 02        | 12        | 1.02.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                 |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>13</b> | <b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>  |
| 1        | 02        | 13        | 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                    |
| 1        | 02        | 13        | 4.01.03.01 SEKRETARIAT DAERAH   |



| KODE     |           |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  |
|----------|-----------|-----------|---|
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>14</b> | <b>STATISTIK</b>  |
| 1        | 02        | 14        | 1.02.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                           |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>15</b> | <b>PERSANDIAN</b>   |
| 1        | 02        | 15        | 1.02.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                           |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>16</b> | <b>KEBUDAYAAN</b>   |
| 1        | 02        | 16        | 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA        |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>17</b> | <b>PERPUSTAKAAN</b>   |
| 1        | 02        | 17        | 1.02.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                           |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>18</b> | <b>KEARSIPAN</b>  |
| 1        | 02        | 18        | 1.02.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                           |
| 1        | 02        | 18        | 4.01.04.01 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                 |
| <b>2</b> |           |           | <b>URUSAN PILIHAN</b>   |
| <b>2</b> | <b>01</b> |           | <b>URUSAN PILIHAN</b>   |
| <b>2</b> | <b>01</b> | <b>02</b> | <b>PARIWISATA</b>   |
| 2        | 01        | 02        | 2.01.02.01 DINAS PARIWISATA   |
| 2        | 01        | 02        | 4.01.03.01 SEKRETARIAT DAERAH   |
| <b>2</b> | <b>01</b> | <b>03</b> | <b>PERTANIAN</b>  |
| 2        | 01        | 03        | 2.01.03.01 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN                      |
| 2        | 01        | 03        | 4.01.03.01 SEKRETARIAT DAERAH   |
| <b>2</b> | <b>01</b> | <b>06</b> | <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>   |
| 2        | 01        | 03        | 2.01.03.01 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN                      |
| <b>2</b> | <b>01</b> | <b>07</b> | <b>PERDAGANGAN</b>  |
| 2        | 01        | 07        | 1.02.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2        | 01        | 07        | 4.01.03.01 SEKRETARIAT DAERAH   |
| <b>2</b> | <b>01</b> | <b>08</b> | <b>PERINDUSTRIAN</b>  |
| 2        | 01        | 08        | 1.02.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2        | 01        | 08        | 4.01.03.01 SEKRETARIAT DAERAH   |
| <b>2</b> | <b>01</b> | <b>09</b> | <b>TRANSMIGRASI</b>   |
| 2        | 01        | 09        | 1.02.01.01 DINAS TENAGA KERJA   |
| <b>3</b> |           |           | <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                  |
| <b>3</b> | <b>01</b> |           | <b>PENUNJANG</b>  |
| <b>3</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>                                    |
| 3        | 01        | 01        | 3.01.02.01 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH       |
| <b>3</b> | <b>01</b> | <b>02</b> | <b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>  |
| 3        | 01        | 02        | 3.01.02.01 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH       |

| <b>KODE</b> |           |           |            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>   |
|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| 3           | 01        | 02        | 4.01.03.01 | SEKRETARIAT DAERAH  |
| <b>3</b>    | <b>01</b> | <b>03</b> |            | <b>KEUANGAN</b>   |
| 3           | 01        | 03        | 3.01.02.01 | BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                      |
| 3           | 01        | 03        | 3.01.03.01 | BADAN KEUANGAN DAERAH   |
| 3           | 01        | 03        | 4.01.03.01 | SEKRETARIAT DAERAH  |
| <b>3</b>    | <b>01</b> | <b>04</b> |            | <b>KEPEGAWAIAN</b>  |
| 3           | 01        | 04        | 3.01.04.01 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  |
| <b>4</b>    |           |           |            | <b>FUNGSI LAINNYA</b>   |
| <b>4</b>    | <b>01</b> |           |            | <b>PENDUKUNG</b>  |
| <b>4</b>    | <b>01</b> | <b>01</b> |            | <b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>   |
| 4           | 01        | 01        | 4.01.01.01 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  |
| <b>4</b>    | <b>01</b> | <b>02</b> |            | <b>KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH</b>   |
| 4           | 01        | 02        | 4.01.02.01 | BUPATI DAN WAKIL BUPATI   |
| <b>4</b>    | <b>01</b> | <b>03</b> |            | <b>UNSUR STAF</b>   |
| 4           | 01        | 03        | 4.01.03.01 | SEKRETARIAT DAERAH  |
| <b>4</b>    | <b>01</b> | <b>04</b> |            | <b>UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b> |
| 4           | 01        | 04        | 4.01.04.01 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  |
| <b>4</b>    | <b>01</b> | <b>05</b> |            | <b>PENGAWASAN</b>   |
| 4           | 01        | 05        | 4.01.05.01 | INSPEKTORAT   |
| <b>5</b>    |           |           |            | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>  |
| <b>5</b>    | <b>01</b> |           |            | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>  |
| <b>5</b>    | <b>01</b> | <b>01</b> |            | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>  |
| 5           | 01        | 01        | 5.01.01.01 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  |
| <b>6</b>    |           |           |            | <b>KEWILAYAHAN</b>  |
| <b>6</b>    | <b>01</b> |           |            | <b>KEWILAYAHAN</b>  |
| 6           | 01        | 01        |            | KECAMATAN   |
| 6           | 01        | 01        | 6.01.01.01 | KECAMATAN GETASAN   |
| 6           | 01        | 01        | 6.01.01.02 | KECAMATAN TENGARAN  |
| 6           | 01        | 01        | 6.01.01.03 | KECAMATAN SUSUKAN   |
| 6           | 01        | 01        | 6.01.01.04 | KECAMATAN SURUH   |
| 6           | 01        | 01        | 6.01.01.05 | KECAMATAN PABELAN   |
| 6           | 01        | 01        | 6.01.01.06 | KECAMATAN TUNTANG   |
| 6           | 01        | 01        | 6.01.01.07 | KECAMATAN BANYUBIRU   |
| 6           | 01        | 01        | 6.01.01.08 | KECAMATAN JAMBU   |
| 6           | 01        | 01        | 6.01.01.09 | KECAMATAN SUMOWONO  |
| 6           | 01        | 01        | 6.01.01.10 | KECAMATAN AMBARAWA  |
| 6           | 01        | 01        | 6.01.01.11 | KECAMATAN BAWEN   |
| 6           | 01        | 01        | 6.01.01.12 | KECAMATAN BRINGIN   |
| 6           | 01        | 01        | 6.01.01.13 | KECAMATAN BERGAS  |
| 6           | 01        | 01        | 6.01.01.14 | KECAMATAN PRINGAPUS   |

| <b>KODE</b> |    |    |            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> |
|-------------|----|----|------------|-----------------------------------|
| 6           | 01 | 01 | 6.01.01.15 | KECAMATAN BANCAK                  |
| 6           | 01 | 01 | 6.01.01.16 | KECAMATAN KALIWUNGU               |
| 6           | 01 | 01 | 6.01.01.17 | KECAMATAN UNGARAN BARAT           |
| 6           | 01 | 01 | 6.01.01.18 | KECAMATAN UNGARAN TIMUR           |
| 6           | 01 | 01 | 6.01.01.19 | KECAMATAN BANDUNGAN               |

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN





| KODE |    |    |    | PERANGKAT DAERAH                           | KODE |    |    | URUSAN   |
|------|----|----|----|--|------|----|----|--|
| 4    | 01 | 03 | 01 | SEKRETARIAT DAERAH                         | 1    | 01 | 02 | Kesehatan  |
|      |    |    |    |  | 1    | 01 | 03 | Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  |
|      |    |    |    |  | 1    | 01 | 06 | Sosial   |
|      |    |    |    |  | 1    | 02 | 02 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                       |
|      |    |    |    |  | 1    | 02 | 03 | Ketahanan Pangan   |
|      |    |    |    |  | 1    | 02 | 04 | Pertanahan   |
|      |    |    |    |  | 1    | 02 | 05 | Lingkungan Hidup   |
|      |    |    |    |  | 1    | 02 | 10 | Komunikasi dan Informatika   |
|      |    |    |    |  | 1    | 02 | 13 | Kepemudaan dan Olah Raga   |
|      |    |    |    |  | 2    | 01 | 02 | Pariwisata   |
|      |    |    |    |  | 2    | 01 | 03 | Pertanian  |
|      |    |    |    |  | 2    | 01 | 07 | Perdagangan  |
|      |    |    |    |  | 2    | 01 | 08 | Perindustrian  |
|      |    |    |    |  | 3    | 01 | 02 | Perencanaan Pembangunan  |
|      |    |    |    |  | 3    | 01 | 03 | Keuangan   |
|      |    |    |    |  | 4    | 01 | 03 | Unsur Staf   |
|      |    |    |    |  | 5    | 01 | 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik  |
| 4    | 01 | 04 | 01 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 1    | 02 | 10 | Komunikasi dan Informatika   |
|      |    |    |    |  | 1    | 02 | 18 | Kearsipan  |
|      |    |    |    |  | 4    | 01 | 04 | Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD |
| 4    | 01 | 05 | 01 | INSPEKTORAT                                | 4    | 01 | 05 | Pengawasan   |
| 5    | 01 | 01 | 01 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK         | 1    | 01 | 05 | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                          |
|      |    |    |    |  | 5    | 01 | 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik  |
| 6    | 01 | 01 |    | KECAMATAN                                  |      |    |    |  |
| 6    | 01 | 01 | 01 | KECAMATAN GETASAN                          | 6    | 01 | 01 | Kecamatan  |
| 6    | 01 | 01 | 02 | KECAMATAN TENGARAN                         | 6    | 01 | 01 | Kecamatan  |
| 6    | 01 | 01 | 03 | KECAMATAN SUSUKAN                          | 6    | 01 | 01 | Kecamatan  |
| 6    | 01 | 01 | 04 | KECAMATAN SURUH                            | 6    | 01 | 01 | Kecamatan  |
| 6    | 01 | 01 | 05 | KECAMATAN PABELAN                          | 6    | 01 | 01 | Kecamatan  |
| 6    | 01 | 01 | 06 | KECAMATAN TUNTANG                          | 6    | 01 | 01 | Kecamatan  |
| 6    | 01 | 01 | 07 | KECAMATAN BANYUBIRU                        | 6    | 01 | 01 | Kecamatan  |

| KODE |    |    |    | PERANGKAT DAERAH        | KODE |    |    | URUSAN    |
|------|----|----|----|-------------------------|------|----|----|-----------|
| 6    | 01 | 01 | 08 | KECAMATAN JAMBU         | 6    | 01 | 01 | Kecamatan |
| 6    | 01 | 01 | 09 | KECAMATAN SUMOWONO      | 6    | 01 | 01 | Kecamatan |
| 6    | 01 | 01 | 10 | KECAMATAN AMBARAWA      | 6    | 01 | 01 | Kecamatan |
| 6    | 01 | 01 | 11 | KECAMATAN BAWEN         | 6    | 01 | 01 | Kecamatan |
| 6    | 01 | 01 | 12 | KECAMATAN BRINGIN       | 6    | 01 | 01 | Kecamatan |
| 6    | 01 | 01 | 13 | KECAMATAN BERGAS        | 6    | 01 | 01 | Kecamatan |
| 6    | 01 | 01 | 14 | KECAMATAN PRINGAPUS     | 6    | 01 | 01 | Kecamatan |
| 6    | 01 | 01 | 15 | KECAMATAN BANCAK        | 6    | 01 | 01 | Kecamatan |
| 6    | 01 | 01 | 16 | KECAMATAN KALIWUNGU     | 6    | 01 | 01 | Kecamatan |
| 6    | 01 | 01 | 17 | KECAMATAN UNGARAN BARAT | 6    | 01 | 01 | Kecamatan |
| 6    | 01 | 01 | 18 | KECAMATAN UNGARAN TIMUR | 6    | 01 | 01 | Kecamatan |
| 6    | 01 | 01 | 19 | KECAMATAN BANDUNGAN     | 6    | 01 | 01 | Kecamatan |

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG  
KODE REKENING PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN KABUPATEN  
SEMARANG

**SUSUNAN KODE AKUN KEUANGAN DAERAH**

| <b>KODE</b> | <b>URAIAN</b> |
|-------------|---------------|
| 1           | Aset          |
| 2           | Kewajiban     |
| 3           | Ekuitas Dana  |
| 4           | Pendapatan    |
| 5           | Belanja       |
| 6           | Pembiayaan    |

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN



**KODE REKENING PENDAPATAN DAERAH**

| Kode         | Uraian  |
|--------------|---|
| 1            | 2   |
| 4.           | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>  |
| 4.1.         | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>   |
| 4.1.1.       | <b>Hasil Pajak Daerah</b>   |
| 4.1.1.01.    | <b>Pajak Hotel</b>  |
| 4.1.1.01.01. | Hotel Bintang Lima Berlian  |
| 4.1.1.01.02. | Hotel Bintang Lima  |
| 4.1.1.01.03. | Hotel Bintang Empat   |
| 4.1.1.01.04. | Hotel Bintang Tiga  |
| 4.1.1.01.05. | Hotel Bintang Dua   |
| 4.1.1.01.06. | Hotel Bintang Satu  |
| 4.1.1.01.07. | Hotel Non Bintang/ Melati   |
| 4.1.1.01.08. | —   |
| 4.1.1.01.09. | —   |
| 4.1.1.01.10. | Motel   |
| 4.1.1.01.11. | Cottage   |
| 4.1.1.01.12. | Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos (Pondok Wisata) |
| 4.1.1.01.13. | Wisma Pariwisata  |
| 4.1.1.02.    | <b>Pajak Restoran</b>   |
| 4.1.1.02.01. | Restoran  |
| 4.1.1.02.02. | Rumah Makan   |
| 4.1.1.02.03. | Café  |
| 4.1.1.02.04. | Kantin  |
| 4.1.1.02.05. | Katering  |
| 4.1.1.03.    | <b>Pajak Hiburan</b>  |
| 4.1.1.03.01. | Tontonan Film   |
| 4.1.1.03.02. | Pagelaran Kesenian, musik dan tari (pertunjukan/ tontonan)            |
| 4.1.1.03.03. | Kontes Kecantikan, pagelaran busana, binaraga dan sejenisnya          |
| 4.1.1.03.04. | Pameran   |
| 4.1.1.03.05. | Diskotek, karaoke, dan klab malam                                     |
| 4.1.1.03.06. | Sirkus, akrobat, sulap  |
| 4.1.1.03.07. | Permainan bilyar  |
| 4.1.1.03.08. | Futsal  |
| 4.1.1.03.09. | Golf, Bowling   |
| 4.1.1.03.10. | Pacuan Kuda   |
| 4.1.1.03.11. | Kendaraan Bermotor/ Balap Motor                                       |
| 4.1.1.03.12. | Permainan Ketangkasan   |
| 4.1.1.03.13. | Panti Mandi Uap/ Spa  |

| Kode             | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 4.1.1.03.14.     | Refleksi dan Pusat Kebugaran atau fitnes center          |
| 4.1.1.03.15.     | Pertandingan Olah Raga                                   |
| <b>4.1.1.04.</b> | <b>Pajak Reklame</b>                                     |
| 4.1.1.04.01.     | Reklame Papan/shopsign                                   |
| 4.1.1.04.02.     | Reklame billboard  |
| 4.1.1.04.03.     | Reklame videotron/ megatron                              |
| 4.1.1.04.04.     | Reklame kain/ spanduk dan sejenisnya                     |
| 4.1.1.04.05.     | Reklame baliho   |
| 4.1.1.04.06.     | Reklame melekat, stiker/ poster                          |
| 4.1.1.04.07.     | Reklame Selebaran  |
| 4.1.1.04.08.     | Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan                |
| 4.1.1.04.09.     | Reklame udara  |
| 4.1.1.04.10.     | Reklame apung  |
| 4.1.1.04.11.     | Reklame film/ slide                                      |
| <b>4.1.1.05.</b> | <b>Pajak Penerangan Jalan</b>                            |
| 4.1.1.05.01.     | Pajak Penerangan Jalan PLN                               |
| <b>4.1.1.06.</b> | <b>Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan</b>              |
| 4.1.1.06.01.     | Andesit/ basalt (batu gunung, batu kali)                 |
| 4.1.1.06.02.     | Bentonit   |
| 4.1.1.06.03.     | Batu Gamping/ batu kapur/ kalsit                         |
| 4.1.1.06.04.     | Tras   |
| 4.1.1.06.05.     | Kaolin   |
| 4.1.1.06.06.     | Pasir Urug   |
| 4.1.1.06.07.     | Pasir  |
| 4.1.1.06.08.     | Tanah Urug   |
| 4.1.1.06.09.     | Tanah Liat/ tanah lempung                                |
| 4.1.1.06.10.     | Kerikil sungai   |
| 4.1.1.06.11.     | Tanah pilihan  |
| 4.1.1.06.12.     | Tanah gambut   |
| <b>4.1.1.07.</b> | <b>Pajak Parkir</b>                                      |
| 4.1.1.07.01.     | Pajak Parkir   |
| <b>4.1.1.08.</b> | <b>Pajak Air Tanah</b>                                   |
| 4.1.1.08.01.     | Pajak Air Tanah.   |
| <b>4.1.1.09.</b> | <b>Pajak Sarang Burung Walet</b>                         |
| 4.1.1.09.01.     | Pajak Sarang Burung Walet                                |
| <b>4.1.1.10.</b> | <b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b> |
| 4.1.1.10.01.     | BPHTB  |
| <b>4.1.1.11.</b> | <b>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>                     |

| Kode                | Uraian  |
|---------------------|---|
| 1                   | 2   |
| 4.1.1.11.01.        | PBB P2  |
| 4.1.1.11.02.        | -   |
| <b>4.1.2.</b>       | <b>Hasil Retribusi Daerah</b>                                 |
| <b>4.1.2.01.</b>    | <b>Retribusi Jasa Umum</b>                                    |
| <b>4.1.2.01.01.</b> | <b>Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>                          |
| 4.1.2.01.01.01.     | Rekam Medis   |
| 4.1.2.01.01.02.     | Tindakan/Operasi  |
| 4.1.2.01.01.03.     | Rawat Jalan   |
| 4.1.2.01.01.04.     | Rawat Inap Umum/Perawatan                                     |
| 4.1.2.01.01.05.     | Rawat Inap Kusta  |
| 4.1.2.01.01.06.     | Obat-obatan   |
| 4.1.2.01.01.07.     | Klaim BPJS  |
| 4.1.2.01.01.08.     | Laboratorium  |
| 4.1.2.01.01.09.     | Radiologi/Rontgen   |
| 4.1.2.01.01.10.     | Ambulance   |
| 4.1.2.01.01.11.     | Diklat  |
| 4.1.2.01.01.12.     | Jasa Konsultasi Medik (Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Medis) |
| 4.1.2.01.01.13.     | Kartu Rekam Medis   |
| 4.1.2.01.01.14.     | Sewa VK   |
| 4.1.2.01.01.15.     | Tindakan Khusus   |
| 4.1.2.01.01.16.     | Keur Uji Kesehatan  |
| 4.1.2.01.01.17.     | Oksigen/O2  |
| 4.1.2.01.01.18.     | Jasa Sarana   |
| 4.1.2.01.01.19.     | USG   |
| 4.1.2.01.01.20.     | EKG   |
| 4.1.2.01.01.21.     | Sewa Kamar Jenasah  |
| 4.1.2.01.01.22.     | Persalinan  |
| 4.1.2.01.01.23.     | Anestesi  |
| 4.1.2.01.01.24.     | Visite  |
| 4.1.2.01.01.25.     | Asuhan Keperawatan  |
| 4.1.2.01.01.26.     | Linen   |
| 4.1.2.01.01.27.     | Tindakan Penunjang Lainnya                                    |
| 4.1.2.01.01.28.     | Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)                      |
| 4.1.2.01.01.29.     | Ijin Laik Sehat   |
| 4.1.2.01.01.30.     | Pelayanan IGD   |
| 4.1.2.01.01.31.     | Pelayanan Visum et repertum                                   |
| <b>4.1.2.01.02.</b> | <b>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</b>             |
| 4.1.2.01.02.01.     | Retribusi Pelayanan Sampah Rumah Tangga                       |

| Kode                | Uraian  |
|---------------------|---|
| 1                   | 2   |
| 4.1.2.01.02.02.     | Retribusi Pelayanan Sampah Perusahaan   |
| 4.1.2.01.02.03.     | Retribusi Pelayanan Sampah Perkantoran  |
| 4.1.2.01.02.04.     | Retribusi Pelayanan Sampah Bidang Usaha   |
| 4.1.2.01.02.05.     | Retribusi Pelayanan Sampah Tempat Pendidikan  |
| <b>4.1.2.01.03.</b> | <b>Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil</b>                   |
| 4.1.2.01.03.01.     | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga                                      |
| 4.1.2.01.03.02.     | Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP   |
| 4.1.2.01.03.03.     | Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN), Antar Kabupaten/ Kota, Antar Propinsi |
| 4.1.2.01.03.04.     | Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)                                      |
| 4.1.2.01.03.05.     | Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)  |
| 4.1.2.01.03.06.     | Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)   |
| 4.1.2.01.03.07.     | Jasa Pelayanan Catatan Sipil  |
| <b>4.1.2.01.04.</b> | <b>Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat</b>                              |
| 4.1.2.01.04.01.     | Retribusi Pelayanan Pemakaman   |
| 4.1.2.01.04.02.     | Retribusi Pelayanan Pengabuan Mayat   |
| 4.1.2.01.05.        | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum   |
| 4.1.2.01.07.        | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  |
| 4.1.2.01.08.        | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran  |
| 4.1.2.01.09.        | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta  |
| 4.1.2.01.10.        | Retribusi Pelayanan Pendidikan  |
| 4.1.2.01.11.        | Retribusi pelayanan pasar jetis   |
| 4.1.2.01.12.        | Retribusi Pelayanan Pasar hewan   |
| 4.1.2.01.13.        | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  |
| 4.1.2.01.14.        | Retribusi Pelayanan Pasar Klas I  |
| 4.1.2.01.15.        | Retribusi Pelayanan Pasar Klas II   |
| 4.1.2.01.16.        | Retribusi Pelayanan Pasar Klas III  |
| 4.1.2.01.17.        | Retribusi pelayanan tera/ tera ulang  |
| 4.1.2.01.18.        | Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Puskesmas                          |
| <b>4.1.2.02.</b>    | <b>Retribusi Jasa Usaha</b>   |
| <b>4.1.2.02.01.</b> | <b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>  |
| 4.1.2.02.01.01.     | Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa  |
| 4.1.2.02.01.02.     | Retribusi Penggunaan Gedung   |
| 4.1.2.02.01.03.     | Retribusi Penyewaan Tanah   |
| 4.1.2.02.01.04.     | Retribusi Penggunaan Kios di obyek wisata dan terminal                                |
| 4.1.2.02.01.05.     | Retribusi penyewaan ruangan gedung bangunan/ kantor                                   |
| 4.1.2.02.01.06.     | Retribusi bangunan konstruksi Jembatan Penyeberangan Orang untuk reklame              |
| 4.1.2.02.01.07.     | Retribusi penggunaan peralatan kebinamargaan  |
| 4.1.2.02.01.08.     | Retribusi laboratorium pengujian bangunan sipil                                       |

| Kode                | Uraian  |
|---------------------|---|
| 1                   | 2   |
| 4.1.2.02.01.09.     | Retribusi penggunaan mobil derek atau crane                         |
| 4.1.2.02.01.10.     | Retribusi Pemeriksaan Susu  |
| 4.1.2.02.01.11.     | Retribusi penggunaan timbangan ternak                               |
| 4.1.2.02.01.12.     | Retribusi pemeriksaan kesehatan hewan                               |
| 4.1.2.02.01.13.     | Retribusi Laboratorium Pengujian Lingkungan Hidup                   |
| 4.1.2.02.01.14.     | Retribusi Penggunaan Bumi Perkemahan                                |
| 4.1.2.02.01.15.     | Retribusi Penyewaan Pasar Kuliner                                   |
| 4.1.2.02.02.        | Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan                                    |
| 4.1.2.02.03.        | Retribusi Tempat Pelelangan   |
| 4.1.2.02.04.        | Retribusi Terminal  |
| 4.1.2.02.05.        | Retribusi Tempat Khusus Parkir                                      |
| 4.1.2.02.06.        | Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa                      |
| 4.1.2.02.07.        | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                      |
| 4.1.2.02.08.        | Retribusi Rumah Potong Hewan  |
| 4.1.2.02.09.        | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan                                     |
| <b>4.1.2.02.10.</b> | <b>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</b>                      |
| 4.1.2.02.10.01.     | Gedong Songo  |
| 4.1.2.02.10.02.     | Pemandian Muncul  |
| 4.1.2.02.10.03.     | Bukit Cinta Brawijaya   |
| 4.1.2.02.10.04.     | Musium Palagan  |
| 4.1.2.02.10.05.     | Wisata Lainnya  |
| 4.1.2.02.10.06.     | Lapangan Olah Raga Tenis Outdoor                                    |
| 4.1.2.02.10.07.     | Lapangan Olah Raga Pandanaran Bergas Outdoor                        |
| 4.1.2.02.10.08.     | Lapangan Olah Raga Pandanaran Bergas Indoor                         |
| 4.1.2.02.10.09.     | Lapangan Olah Raga Lainnya  |
| 4.1.2.02.11.        | Retribusi Penyeberangan di Air                                      |
| 4.1.2.02.12.        | Retribusi Pengolahan Limbah Cair                                    |
| 4.1.2.02.13.        | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                           |
| 4.1.2.02.14.        | Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produk Bibit                         |
| 4.1.2.02.15.        | Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produk Benih Ikan                    |
| <b>4.1.2.03.</b>    | <b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>                                 |
| 4.1.2.03.01.        | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan                                  |
| 4.1.2.03.02.        | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol                  |
| 4.1.2.03.03.        | Retribusi Izin Gangguan/Keramaian                                   |
| 4.1.2.03.04.        | Retribusi Izin Trayek   |
| 4.1.2.03.05.        | Retribusi Izin Usaha Perikanan                                      |
| 4.1.2.03.06.        | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) |
| <b>4.1.3.</b>       | <b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>            |

| Kode            | Uraian   |
|-----------------|--|
| 1               | 2  |
| 4.1.3.01.       | <b>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>     |
| 4.1.3.01.01.    | Perusahaan Daerah  |
| 4.1.3.01.02.    | <b>Badan Usaha Milik Daerah</b>  |
| 4.1.3.01.02.01. | Apotek Sidowaras I & III   |
| 4.1.3.01.02.02. | PDAM   |
| 4.1.3.01.02.03. | Laba Usaha/Deviden BPR BKK/BKK   |
| 4.1.3.01.02.04. | Laba Usaha/Deviden BKK   |
| 4.1.3.01.02.05. | Laba Usaha/Deviden BKPD (Badan Kredit Produksi Desa)                           |
| 4.1.3.01.02.06. | Laba Usaha/Deviden Bank Jateng   |
| 4.1.3.02.       | <b>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN</b> |
| 4.1.3.02.01.    | BUMN .....   |
| 4.1.3.03.       | <b>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta</b>          |
| 4.1.3.03.01.    | Perusahaan .....   |
| 4.1.3.99.       | ...  |
| 4.1.4.          | <b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>                               |
| 4.1.4.01.       | <b>Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</b>                       |
| 4.1.4.01.01.    | Pelepasan Hak Atas Tanah   |
| 4.1.4.01.02.    | Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai                         |
| 4.1.4.01.03.    | Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai                                 |
| 4.1.4.01.04.    | Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas  |
| 4.1.4.01.05.    | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua   |
| 4.1.4.01.06.    | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat   |
| 4.1.4.01.07.    | Penjualan Drum Bekas   |
| 4.1.4.01.08.    | Penjualan Hasil Penebangan Pohon   |
| 4.1.4.01.09.    | Penjualan Lampu Hias Bekas   |
| 4.1.4.01.10.    | Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan   |
| 4.1.4.01.11.    | Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas   |
| 4.1.4.01.12.    | Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi  |
| 4.1.4.01.13.    | Penjualan hasil pertanian  |
| 4.1.4.01.14.    | Penjualan hasil kehutanan  |
| 4.1.4.01.15.    | Penjualan hasil perkebunan   |
| 4.1.4.01.16.    | Penjualan hasil peternakan   |
| 4.1.4.01.17.    | Penjualan hasil perikanan  |
| 4.1.4.01.18.    | Penjualan hasil sitaan   |
| 4.1.4.02.       | <b>Penerimaan Jasa Giro</b>  |
| 4.1.4.02.01.    | Jasa Giro Kas Daerah   |
| 4.1.4.02.02.    | Jasa Giro Pemegang Kas   |
| 4.1.4.02.03.    | Jasa Giro Dana Cadangan  |

| Kode             | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| <b>4.1.4.03.</b> | <b>Pendapatan Bunga deposito</b>                                 |
| 4.1.4.03.01.     | Rekening Deposito pada Bank Jateng                               |
| 4.1.4.03.02.     | Rekening Deposito pada BKK                                       |
| 4.1.4.03.03.     | Rekening Deposito pada BNI                                       |
| 4.1.4.03.04.     | Rekening Deposito pada Bank Syariah Mandiri                      |
| 4.1.4.03.05.     | Rekening Deposito pada Bank Muamalat                             |
| 4.1.4.03.06.     | Rekening Deposito Dana Cadangan                                  |
| 4.1.4.03.07.     | Rekening Deposito pada Bank Mandiri                              |
| 4.1.4.03.08.     | Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia                     |
| <b>4.1.4.04.</b> | <b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>                            |
| 4.1.4.04.01.     | Kerugian Uang  |
| 4.1.4.04.02.     | Kerugian Barang  |
| <b>4.1.4.05.</b> | <b>Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah</b>           |
| 4.1.4.05.01.     | Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah                     |
| 4.1.4.05.02.     | Penerimaan Potongan dari ....                                    |
| 4.1.4.05.03.     | Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari .....      |
| <b>4.1.4.06.</b> | <b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b> |
| 4.1.4.06.01.     | Bidang Pendidikan  |
| 4.1.4.06.02.     | Bidang Kesehatan   |
| 4.1.4.06.03.     | Bidang Pekerjaan Umum  |
| 4.1.4.06.04.     | Bidang Perumahan Rakyat  |
| 4.1.4.06.05.     | Bidang Penataan Ruang  |
| 4.1.4.06.06.     | Bidang Perencanaan Pembangunan                                   |
| 4.1.4.06.07.     | Bidang Perhubungan   |
| 4.1.4.06.08.     | Bidang Lingkungan Hidup  |
| 4.1.4.06.09.     | Bidang Pertanahan  |
| <b>4.1.4.07.</b> | <b>Pendapatan Denda Pajak 1)</b>                                 |
| 4.1.4.07.01.     | Pendapatan Denda Pajak Hotel                                     |
| 4.1.4.07.02.     | Pendapatan Denda Pajak Restoran                                  |
| 4.1.4.07.03.     | Pendapatan Denda Pajak Hiburan                                   |
| 4.1.4.07.04.     | Pendapatan Denda Pajak Reklame                                   |
| 4.1.4.07.05.     | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan                          |
| 4.1.4.07.06.     | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan            |
| 4.1.4.07.07.     | Pendapatan Denda Pajak Parkir                                    |
| 4.1.4.07.08.     | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                                 |
| 4.1.4.07.09.     | Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet                       |
| 4.1.4.07.10.     | Pendapatan Denda Pajak Lingkungan                                |
| 4.1.4.07.11.     | Pendapatan Denda Pajak BPHTB                                     |

| Kode             | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 4.1.4.07.12.     | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                       |
| <b>4.1.4.08.</b> | <b>Pendapatan Denda Retribusi 1)</b>                                 |
| 4.1.4.08.01.     | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum                                 |
| 4.1.4.08.02.     | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha                                |
| 4.1.4.08.03.     | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu                        |
| <b>4.1.4.09.</b> | <b>Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan</b>                        |
| 4.1.4.09.01.     | Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan                    |
| 4.1.4.09.02.     | Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame                     |
| 4.1.4.09.03.     | Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman                              |
| <b>4.1.4.10.</b> | <b>Pendapatan dari Pengembalian</b>                                  |
| 4.1.4.10.01.     | Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21              |
| 4.1.4.10.02.     | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan |
| 4.1.4.10.03.     | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan |
| 4.1.4.10.04.     | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas   |
| 4.1.4.10.05.     | Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka                          |
| <b>4.1.4.11.</b> | <b>Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum</b>                           |
| 4.1.4.11.01.     | Fasilitas Sosial   |
| 4.1.4.11.02.     | Fasilitas Umum   |
| <b>4.1.4.12.</b> | <b>Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>      |
| 4.1.4.12.01.     | Uang Pendaftaran/Ujian Masuk   |
| 4.1.4.12.02.     | Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan                                |
| 4.1.4.12.03.     | Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas                                    |
| <b>4.1.4.13.</b> | <b>Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah</b>                        |
| 4.1.4.13.01.     | Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah                                     |
| 4.1.4.13.02.     | Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan                                 |
| <b>4.1.4.14.</b> | <b>Pendapatan Lain-lain</b>  |
| 4.1.4.14.01.     | Lelang Bengkulu  |
| 4.1.4.14.02.     | Laba Revolving Dinas Pertanian                                       |
| 4.1.4.14.03.     | Laba Revolving Dinas Peternakan                                      |
| 4.1.4.14.04.     | Penerimaan dari kontribusi pemanfaatan air senjoyo                   |
| 4.1.4.14.05.     | Penerimaan ISP   |
| 4.1.4.14.06.     | Penerimaan Dinkes (Dana Jamkesmas, dll)                              |
| 4.1.4.14.07.     | Penerimaan Royalti Air Bersih  |
| 4.1.4.14.08.     | Denda Pengembalian Peminjaman Buku                                   |
| 4.1.4.14.09.     | Penerimaan Lainnya   |
| 4.1.4.14.10.     | Wana Wisata Penggaron  |
| 4.1.4.14.11.     | Wana Wisata Air Terjun Semirang                                      |
| 4.1.4.14.12.     | Langen Tirto Muncul  |



| Kode             | Uraian                                 |
|------------------|--|
| 1                | 2                                      |
| 4.1.4.14.13.     | The Fountain Water park                |
| 4.1.4.14.15.     | Obyek Wisata Hortimart Agro Center     |
| 4.1.4.14.16.     | Obyek Wisata Renang Tirto Agro         |
| 4.1.4.14.17.     | Cimory                                 |
| 4.1.4.14.18.     | Kampung Kopi Banaran                   |
| 4.1.4.14.19.     | Pesanggrahan Watu Gunung               |
| 4.1.4.14.20.     | Radio Suara Serasi                     |
| 4.1.4.14.21.     | AMU Bank Jateng                        |
| <b>4.1.4.15.</b> | <b>Pendapatan BLUD</b>                 |
| 4.1.4.15.01.     | Pendapatan BLUD RSUD Ambarawa          |
| 4.1.4.15.02.     | Pendapatan BLUD RSUD Ungaran           |
| 4.1.4.15.03.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Getasan      |
| 4.1.4.15.04.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Jetak        |
| 4.1.4.15.05.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Tengaran     |
| 4.1.4.15.06.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Susukan      |
| 4.1.4.15.07.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Kaliwungu    |
| 4.1.4.15.08.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Suruh        |
| 4.1.4.15.09.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Dadapayam    |
| 4.1.4.15.10.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Pabelan      |
| 4.1.4.15.11.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Semowo       |
| 4.1.4.15.12.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Tuntang      |
| 4.1.4.15.13.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Gedangan     |
| 4.1.4.15.14.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Banyubiru    |
| 4.1.4.15.15.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Jambu        |
| 4.1.4.15.16.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Sumowono     |
| 4.1.4.15.17.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Ambarawa     |
| 4.1.4.15.18.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Duren        |
| 4.1.4.15.19.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Jimbaran     |
| 4.1.4.15.20.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Bawen        |
| 4.1.4.15.21.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Bringin      |
| 4.1.4.15.22.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Bancak       |
| 4.1.4.15.23.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Bergas       |
| 4.1.4.15.24.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Pringapus    |
| 4.1.4.15.25.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Ungaran      |
| 4.1.4.15.26.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Lerep        |
| 4.1.4.15.27.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Leyangan     |
| 4.1.4.15.28.     | Pendapatan BLUD Puskesmas Kalongan     |
| <b>4.1.4.16.</b> | <b>Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b> |

| Kode         | Uraian  |
|--------------|---|
| 1            | 2   |
| 4.1.4.16.01. | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima |
| 4.1.4.17.    | <b>Pengembalian UUDP</b>  |
| 4.1.4.17.01. | Pengembalian UUDP   |
| 4.1.4.18.    | <b>Rekening Listrik Pasar</b>                                     |
| 4.1.4.18.01. | Rekening Listrik Pasar  |
| 4.1.4.19.    | <b>Sewa Mesin Listrik</b>   |
| 4.1.4.19.01. | Sewa Mesin Listrik  |
| 4.1.4.20.    | <b>Penggunaan Mobil Jenazah</b>                                   |
| 4.1.4.20.01. | Penggunaan Mobil Jenazah  |
| 4.1.4.21.    | <b>Sewa Hotel</b>   |
| 4.1.4.21.01. | Sewa Hotel ....   |
| 4.1.4.22.    | <b>Bunga Dana Cadangan</b>  |
| 4.1.4.22.01. | Bunga Dana Cadangan   |
| 4.1.4.23.    | <b>Dana Kapitasi JKN (BPJS) pada Puskesmas</b>                    |
| 4.1.4.23.01. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Getasan                               |
| 4.1.4.23.02. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Jetak                                 |
| 4.1.4.23.03. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tengaran                              |
| 4.1.4.23.04. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Susukan                               |
| 4.1.4.23.05. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kaliwungu                             |
| 4.1.4.23.06. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Suruh                                 |
| 4.1.4.23.07. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Dadapayam                             |
| 4.1.4.23.08. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pabelan                               |
| 4.1.4.23.09. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Semowo                                |
| 4.1.4.23.10. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tuntang                               |
| 4.1.4.23.11. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gedangan                              |
| 4.1.4.23.12. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Banyubiru                             |
| 4.1.4.23.13. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Jambu                                 |
| 4.1.4.23.14. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumowono                              |
| 4.1.4.23.15. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ambarawa                              |
| 4.1.4.23.16. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Duren                                 |
| 4.1.4.23.17. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Jimbaran                              |
| 4.1.4.23.18. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bawen                                 |
| 4.1.4.23.19. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bringin                               |
| 4.1.4.23.20. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bancak                                |
| 4.1.4.23.21. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bergas                                |
| 4.1.4.23.22. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pringapus                             |
| 4.1.4.23.23. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ungaran                               |
| 4.1.4.23.24. | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lerep                                 |

| Kode             | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 4.1.4.23.25.     | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Leyangan  |
| 4.1.4.23.26.     | Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kalongan  |
| <b>4.1.4.24.</b> | <b>DANA BOS</b>   |
| 4.1.4.24.01.     | Dana BOS SD Negeri  |
| 4.1.4.24.02.     | Dana BOS SMP Negeri   |
| <b>4.2.</b>      | <b>Dana Perimbangan</b>   |
| <b>4.2.1.</b>    | <b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>  |
| <b>4.2.1.01.</b> | <b>Bagi Hasil Pajak</b>   |
| 4.2.1.01.01.     | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan   |
| 4.2.1.01.02.     | Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan   |
| 4.2.1.01.03.     | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 |
| 4.2.1.01.04.     | Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau  |
| <b>4.2.1.02.</b> | <b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>  |
| 4.2.1.02.01.     | Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan   |
| 4.2.1.02.02.     | Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan   |
| 4.2.1.02.03.     | Bagi Hasil dari Dana Reboisasi  |
| 4.2.1.02.04.     | Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)   |
| 4.2.1.02.05.     | Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)  |
| 4.2.1.02.06.     | Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan  |
| 4.2.1.02.07.     | Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan  |
| 4.2.1.02.08.     | Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi  |
| 4.2.1.02.09.     | Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi (Gas Alam)  |
| 4.2.1.02.10.     | Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi   |
| 4.2.1.02.11.     | Penerimaan dari Sektor Pertambangan Umum  |
| 4.2.1.02.12.     | Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara (Royalti)   |
| <b>4.2.2.</b>    | <b>Dana Alokasi Umum</b>  |
| <b>4.2.2.01.</b> | <b>Dana Alokasi Umum</b>  |
| 4.2.2.01.01.     | Dana Alokasi Umum   |
| <b>4.2.3.</b>    | <b>Dana Alokasi Khusus</b>  |
| <b>4.2.3.01.</b> | <b>Dana Alokasi Khusus Fisik</b>  |
| 4.2.3.01.01.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan   |
| 4.2.3.01.02.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan  |
| 4.2.3.01.03.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Pekerjaan Umum   |
| 4.2.3.01.04.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan   |
| 4.2.3.01.05.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian  |
| 4.2.3.01.06.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup   |
| 4.2.3.01.07.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Kependudukan   |
| 4.2.3.01.08.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan  |

| Kode             | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 4.2.3.01.09.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi                                   |
| 4.2.3.01.10.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan       |
| 4.2.3.01.11.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana                        |
| 4.2.3.01.12.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan                                 |
| 4.2.3.01.13      | Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan            |
| 4.2.3.01.14      | Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan                               |
| 4.2.3.01.15.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi                                  |
| 4.2.3.01.16.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat            |
| 4.2.3.01.17.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintah Daerah               |
| 4.2.3.01.18.     | Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Penunjang                   |
| 4.2.3.01.19.     | Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah                      |
| 4.2.3.01.20.     | Dana Alokasi Khusus Afirmasi Air Minum                               |
| 4.2.3.01.21.     | Dana Alokasi Khusus Afirmasi Sanitasi                                |
| 4.2.3.01.22.     | Dana Alokasi Khusus Afirmasi Infrastruktur Irigasi                   |
| 4.2.3.01.23.     | Dana Alokasi Khusus Afirmasi Infrastruktur Jalan                     |
| 4.2.3.01.24.     | Dana Alokasi Khusus Afirmasi Transportasi Pedesaan                   |
| 4.2.3.01.25.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata                                |
| 4.2.3.01.26.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman                  |
| 4.2.3.01.27.     | Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Kesehatan                       |
| 4.2.3.01.29.     | Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Lingkungan Hidup                |
| 4.2.3.01.30.     | Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Irigasi                         |
| 4.2.3.01.31.     | Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Air Minum                       |
| 4.2.3.01.32.     | Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pasar                           |
| 4.2.3.01.33.     | Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Sanitasi                        |
| 4.2.3.01.34.     | Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pariwisata                      |
| 4.2.3.01.35.     | Dana Alokasi Khusus Bidang Sosial                                    |
| <b>4.2.3.02.</b> | <b>Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>                                 |
| 4.2.3.02.01.     | Tunjangan Profesi Guru PNSD  |
| 4.2.3.02.02.     | Tambahan Penghasilan Guru PNSD                                       |
| 4.2.3.02.03.     | Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi                          |
| 4.2.3.02.04.     | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 4.2.3.02.05.     | Bantuan Operasional Kesehatan  |
| 4.2.3.02.06.     | Akreditasi Rumah Sakit   |
| 4.2.3.02.07.     | Akreditasi Puskesmas   |
| 4.2.3.02.08.     | Jaminan Persalinan   |
| 4.2.3.02.09.     | Bantuan Operasional Keluarga Berencana                               |
| 4.2.3.02.10.     | Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah             |
| 4.2.3.02.11.     | Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan                                |

| Kode             | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 4.2.3.02.12.     | Tunjangan Khusus Guru   |
| 4.2.3.02.13.     | Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan                                  |
| 4.2.3.02.14.     | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan                 |
| 4.2.3.02.15.     | Akreditasi Labkesda   |
| 4.2.3.02.16.     | Dana Pelayanan Kepariwisataaan  |
| <b>4.3.</b>      | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>                               |
| <b>4.3.1.</b>    | <b>Pendapatan Hibah</b>   |
| <b>4.3.1.01.</b> | <b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah</b>                                   |
| 4.3.1.01.01.     | Pemerintah  |
| <b>4.3.1.02.</b> | <b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya</b>                    |
| 4.3.1.02.01.     | Pemerintah Daerah   |
| <b>4.3.1.03.</b> | <b>Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri</b> |
| 4.3.1.03.01.     | Badan/lembaga/organisasi swasta   |
| <b>4.3.1.04.</b> | <b>Pendapatan Hibah / Sumbangan dari Kelompok Masyarakat/Perorangan</b>   |
| 4.3.1.04.01.     | Kelompok masyarakat/perorangan  |
| <b>4.3.1.05.</b> | <b>Pendapatan Hibah dari Luar Negeri</b>                                  |
| 4.3.1.05.01.     | Pendapatan Hibah dari Bilateral   |
| 4.3.1.05.02.     | Pendapatan Hibah dari Multilateral  |
| 4.3.1.05.03.     | Pendapatan Hibah dari Donor lainnya                                       |
| <b>4.3.1.06.</b> | <b>Hibah Dana BOS</b>   |
| 4.3.1.06.01.     | Hibah Dana BOS SD Negeri  |
| 4.3.1.06.02.     | Hibah Dana BOS SMP Negeri   |
| <b>4.3.2.</b>    | <b>Dana Darurat</b>   |
| <b>4.3.2.01.</b> | <b>Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam</b>                |
| 4.3.2.01.01.     | Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam                                      |
| <b>4.3.3.</b>    | <b>Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>       |
| <b>4.3.3.01.</b> | <b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</b>                                |
| 4.3.3.01.01.     | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor                                  |
| 4.3.3.01.02.     | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air                                |
| 4.3.3.01.03.     | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor                         |
| 4.3.3.01.04.     | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air                       |
| 4.3.3.01.05.     | Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor                      |
| 4.3.3.01.06.     | Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah               |
| 4.3.3.01.07.     | Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan           |
| 4.3.3.01.08.     | Bagi Hasil dari Pajak Tera  |
| 4.3.3.01.09.     | Bagi Hasil dari Pajak Kelebihan Muatan                                    |
| 4.3.3.01.10.     | Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak Ketiga                                    |
| 4.3.3.01.11.     | Bagi Hasil dari Pajak Rokok   |

| Kode             | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| <b>4.3.3.02.</b> | <b>Dana Bagi Hasil Pajak /Bukan Pajak dari Provinsi 3)</b>  |
| 4.3.3.02.01.     | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi   |
| 4.3.3.02.02.     | Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi  |
| <b>4.3.3.03.</b> | <b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3)</b>  |
| 4.3.3.03.01.     | Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten .....  |
| <b>4.3.3.04.</b> | <b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 3)</b>   |
| 4.3.3.04.01.     | Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota .....   |
| <b>4.3.4.</b>    | <b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>  |
| <b>4.3.4.01.</b> | <b>Dana Penyesuaian</b>   |
| 4.3.4.01.01.     | Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan   |
| 4.3.4.01.02.     | Dana Penyesuaian Tunjangan Kesehatan  |
| 4.3.4.01.03.     | Dana BOS  |
| <b>4.3.4.02.</b> | <b>Dana Otonomi Khusus</b>  |
| 4.3.4.02.01.     | Dana Otonomi Khusus .....   |
| <b>4.3.4.03.</b> | <b>Pendapatan Dana Insentif Daerah</b>  |
| 4.3.4.03.01.     | Dana Insentif Daerah  |
| <b>4.3.5.</b>    | <b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>                                    |
| <b>4.3.5.01.</b> | <b>Bantuan Keuangan dari Provinsi</b>   |
| 4.3.5.01.01.     | Bantuan Keuangan dari Provinsi  |
| <b>4.3.5.02.</b> | <b>Bantuan Keuangan dari Kabupaten</b>  |
| 4.3.5.02.01.     | Bantuan Keuangan dari Kabupaten.....  |
| <b>4.3.5.03.</b> | <b>Bantuan Keuangan dari Kota</b>   |
| 4.3.5.03.01.     | Bantuan Keuangan dari Kota .....  |
| <b>4.3.6.</b>    | <b>Lain-lain Pendapatan</b>   |
| <b>4.3.6.01.</b> | <b>Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan</b>                                  |
| 4.3.6.01.01.     | Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah bidang Kesehatan Dst....         |
| <b>4.3.6.02.</b> | <b>Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur, dan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah</b> |
| 4.3.6.02.01.     | Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)  |
| 4.3.6.02.02.     | Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)   |
| <b>4.3.6.03.</b> | <b>Dana Desa dari APBN</b>  |
| 4.3.6.03.01.     | Dana Desa dari APBN   |
| <b>4.3.6.04.</b> | <b>Sumbangan dari Pihak Ketiga</b>  |
| 4.3.6.04.01.     | Sumbangan dari Pihak Ketiga   |

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG  
KODE REKENING PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN KABUPATEN  
SEMARANG

**KODE DAN KLASIFIKASI FUNGSI**

| <b>KODE</b> | <b>URAIAN</b>                |
|-------------|------------------------------|
| 01          | Pelayanan umum               |
| 02          | Pertahanan *)                |
| 03          | Ketertiban dan ketentraman   |
| 04          | Ekonomi                      |
| 05          | Lingkungan hidup             |
| 06          | Perumahan dan fasilitas umum |
| 07          | Kesehatan                    |
| 08          | Pariwisata dan budaya        |
| 09          | Agama *)                     |
| 10          | Pendidikan                   |
| 11          | Perlindungan sosial          |

Keterangan :

\*) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 39 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 KODE REKENING PERENCANAAN DAN  
 PENGANGGARAN KABUPATEN  
 SEMARANG

**KODE DAN KLASIFIKASI BELANJA DAERAH MENURUT FUNGSI UNTUK  
 KESELARASAN DAN KETERPADUAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**

| KODE |   |    |    | URAIAN   |
|------|---|----|----|--|
| 01   |   |    |    | Pelayanan umum   |
| 01   | 1 | 02 | 10 | Komunikasi dan Informatika                               |
| 01   | 1 | 02 | 14 | Statistik  |
| 01   | 1 | 02 | 18 | Kearsipan  |
| 01   | 3 | 01 | 01 | Penelitian dan Pengembangan                              |
| 01   | 3 | 01 | 02 | Perencanaan Pembangunan                                  |
| 01   | 3 | 01 | 04 | Kepegawaian  |
| 01   | 4 | 01 | 01 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                           |
| 01   | 4 | 01 | 02 | KDH/ WKDH  |
| 01   | 4 | 01 | 03 | Sekretariat Daerah                                       |
| 01   | 4 | 01 | 04 | Sekretariat DPRD   |
| 01   | 6 | 01 | 01 | Kecamatan  |
| 02   |   |    |    | Pertahanan *)  |
| 03   |   |    |    | Ketertiban dan Ketentraman                               |
| 03   | 1 | 01 | 05 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| 03   | 5 | 01 | 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik                              |
| 04   |   |    |    | Ekonomi  |
| 04   | 1 | 02 | 01 | Tenaga Kerja   |
| 04   | 1 | 02 | 03 | Ketahanan Pangan   |
| 04   | 1 | 02 | 07 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                         |
| 04   | 1 | 02 | 09 | Perhubungan  |
| 04   | 1 | 02 | 11 | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                        |
| 04   | 1 | 02 | 12 | Penanaman Modal  |
| 04   | 2 | 01 | 03 | Pertanian  |
| 04   | 2 | 01 | 06 | Kelautan dan Perikanan                                   |
| 04   | 2 | 01 | 07 | Perdagangan  |
| 04   | 2 | 01 | 08 | Perindustrian  |
| 04   | 2 | 01 | 09 | Transmigrasi   |
| 04   | 3 | 01 | 03 | Keuangan   |
| 05   |   |    |    | Lingkungan Hidup   |
| 05   | 1 | 02 | 04 | Pertanahan   |
| 05   | 1 | 02 | 05 | Lingkungan Hidup   |
| 06   |   |    |    | Perumahan dan fasilitas umum                             |
| 06   | 1 | 01 | 03 | Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                            |
| 06   | 1 | 01 | 04 | Perumahan Rakyat   |



| KODE |   |    | URAIAN  |
|------|---|----|---|
| 07   |   |    | Kesehatan                                       |
| 07   | 1 | 01 | 02 Kesehatan                                    |
| 07   | 1 | 02 | 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 08   |   |    | Pariwisata dan budaya                           |
| 08   | 1 | 02 | 16 Kebudayaan                                   |
| 08   | 2 | 01 | 02 Pariwisata                                   |
| 09   |   |    | Agama *)  |
| 10   |   |    | Pendidikan                                      |
| 10   | 1 | 01 | 01 Pendidikan                                   |
| 10   | 1 | 02 | 13 Kepemudaan dan Olah Raga                     |
| 10   | 1 | 02 | 17 Perpustakaan                                 |
| 11   |   |    | Perlindungan sosial                             |
| 11   | 1 | 01 | 16 Sosial                                       |
| 11   | 1 | 02 | 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 11   | 1 | 02 | 06 Kependudukan dan Catatan Sipil               |

Keterangan :

\*) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

**KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN  
 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Urusan : - NON URUSAN

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN   |
|------------|--|
| 1          | 2  |
| <b>01.</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                              |
| 01.01.     | Pengelolaan surat menyurat   |
| 01.02.     | Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik |
| 01.03.     | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor              |
| 01.04.     | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS                             |
| 01.05.     | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah                                    |
| 01.06.     | Penyediaan Logistik kantor   |
| 01.07.     | Penatausahaan administrasi keuangan SKPD                                       |
| 01.08.     | Penyediaan jasa kebersihan kantor  |
| 01.09.     | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah                         |
| 01.10.     | Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran                           |
| 01.11.     | Pengelolaan asset/ barang OPD  |
| <b>02.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                       |
| 02.01.     | Pembangunan rumah jabatan  |
| 02.02.     | Pembangunan rumah dinas  |
| 02.03.     | Pembangunan gedung kantor  |
| 02.04.     | Pengadaan mobil jabatan  |
| 02.05.     | Pengadaan kendaraan dinas/operasional  |
| 02.06.     | Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas                       |
| 02.07.     | Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor                  |
| 02.08.     | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Keamanan                                  |
| 02.09.     | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas                           |
| 02.10.     | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                       |
| 02.11.     | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan                                       |
| 02.12.     | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                         |
| 02.13.     | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas      |
| 02.14.     | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor            |
| 02.15.     | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas                                  |
| 02.16.     | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                                  |
| 02.17.     | Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan  |
| 02.18.     | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional                          |
| <b>03.</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                   |
| 03.01.     | Pengadaan mesin/kartu absensi  |
| 03.02.     | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                |
| 03.03.     | Pengadaan pakaian kerja lapangan   |
| 03.04.     | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                                    |
| 03.05.     | Pengelolaan administrasi Kepegawaian   |

|            |   |
|------------|---|
| <b>04.</b> | <b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>                                       |
| 04.01.     | Pemulangan pegawai yang pensiun   |
| 04.02.     | Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas                                |
| 04.03.     | Pemindahan tugas PNS  |
| <b>05.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |
| 05.01.     | Pendidikan dan pelatihan formal   |
| 05.02.     | Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan                                      |
| 05.03.     | Kesemiptaan Jasmani anggota Satpol PP   |
| 05.04.     | Peningkatan kapasitas jabatan fungsional tertentu                                     |
| <b>06.</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |
| 06.01.     | Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD                                  |
| 06.02.     | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD  |
| 06.03.     | Penyusunan Laporan Keuangan OPD   |
| <b>07.</b> | <b>Program Perencanaan</b>  |
| 07.01.     | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD   |
| 07.02.     | -   |
| 07.03.     | Pendataan rumah bangunan di Kabupaten Semarang  |
| 07.04.     | Penyusunan buku profil DPMPTSP  |
| <b>08.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</b>                        |
| 08.01.     | Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum   |
| 08.02.     | Penyelenggaraan Unit Pelayanan Pengadaan  |
| <b>09.</b> | <b>Program Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan</b>                         |
| 09.01.     | Pendukung Pelayanan Pendidikan, Koordinatir Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan       |
| 09.02.     | Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMPN                                   |
| 09.03.     | Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMAN, SMKN, TKN dan SKB                |
| <b>10.</b> | <b>Program Pendukung Pelayanan Perkantoran Kelurahan</b>                              |
| 10.01.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Gondoriyo                                   |
| 10.02.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ngampin                                     |
| 10.03.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Pojoksari                                   |
| 10.04.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Tambakboyo                                  |
| 10.05.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Lodoyong                                    |
| 10.06.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kupang                                      |
| 10.07.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kranggan                                    |
| 10.08.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Panjang                                     |
| 10.09.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Baran                                       |
| 10.10.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bandungan                                   |
| 10.11.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bawen                                       |
| 10.12.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Harjosari                                   |
| 10.13.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ngempon                                     |
| 10.14.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Karangjati                                  |
| 10.15.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Wujil                                       |
| 10.16.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bergas Lor                                  |
| 10.17.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Pringapus                                   |
| 10.18.     | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Candirejo                                   |

|        |   |
|--------|---|
| 10.19. | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Genuk       |
| 10.20. | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Ungaran     |
| 10.21. | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Bandarjo    |
| 10.22. | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Langensari  |
| 10.23. | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Sidomulyo   |
| 10.24. | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Kalirejo    |
| 10.25. | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Susukan     |
| 10.26. | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Gedang Anak |
| 10.27. | Pendukung pelayanan perkantoran Kelurahan Beji        |

Urusan : 1.01.01. - PENDIDIKAN

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN   |
|------------|--|
| 1          | 2  |
| <b>15.</b> | <b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>                                     |
| 15.01.     | Pembangunan gedung sekolah   |
| 15.02.     | Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah                |
| 15.03.     | Penambahan ruang kelas sekolah   |
| 15.04.     | Penambahan ruang guru sekolah  |
| 15.05.     | Pembangunan ruang locker siswa   |
| 15.06.     | Pembangunan sarana dan prasarana olahraga                                    |
| 15.07.     | Pembangunan sarana dan prasarana bermain                                     |
| 15.08.     | Pembangunan ruang serba guna/aula  |
| 15.09.     | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir                     |
| 15.10.     | Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah                                     |
| 15.11.     | Pembangunan ruang ibadah   |
| 15.12.     | Pembangunan perpustakaan sekolah   |
| 15.13.     | Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya           |
| 15.14.     | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary                                   |
| 15.15.     | Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa                                     |
| 15.16.     | Pengadaan pakaian seragam sekolah  |
| 15.17.     | Pengadaan pakaian olahraga   |
| 15.18.     | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa                                      |
| 15.19.     | Pengadaan mebeleur sekolah   |
| 15.20.     | Pengadaan perlengkapan sekolah   |
| 15.21.     | Pengadaan alat rumah tangga sekolah  |
| 15.22.     | Pengadaan sarana mobilitas sekolah   |
| 15.23.     | Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah                                  |
| 15.24.     | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah |
| 15.25.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah                               |
| 15.26.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah                                |
| 15.27.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa                                |
| 15.28.     | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga                     |
| 15.29.     | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain                      |

|        |   |
|--------|---|
| 15.30. | Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula                                    |
| 15.31. | Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir             |
| 15.32. | Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah                             |
| 15.33. | Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah   |
| 15.34. | Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah                                     |
| 15.35. | Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya   |
| 15.36. | Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary                           |
| 15.37. | Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa                            |
| 15.38. | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur sekolah   |
| 15.39. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah                                     |
| 15.40. | Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah                                |
| 15.41. | Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah                                 |
| 15.42. | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah  |
| 15.43. | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah         |
| 15.44. | Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa  |
| 15.45. | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah                                       |
| 15.46. | Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah  |
| 15.47. | Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa  |
| 15.48. | Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga   |
| 15.49. | Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain  |
| 15.50. | Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula                                     |
| 15.51. | Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir              |
| 15.52. | Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah                              |
| 15.53. | Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah  |
| 15.54. | Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah                                      |
| 15.55. | Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya            |
| 15.56. | Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary                            |
| 15.57. | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik  |
| 15.58. | Pengembangan pendidikan anak usia dini (lomba-lomba PAUD)                           |
| 15.59. | Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini   |
| 15.60. | Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini                           |
| 15.61. | Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini                                      |
| 15.62. | Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini |
| 15.63. | Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini                  |
| 15.64. | Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini                                   |
| 15.65. | Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini                                 |
| 15.66. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| 15.67. | Pengadaan alat praktek dan peraga siswa oleh dinas                                  |
| 15.68. | Pengadaan alat praktek dan peraga siswa oleh SKB Susukan                            |
| 15.69. | Pengadaan alat praktek dan peraga siswa oleh SKB Ungaran                            |
| 15.70. | Pengadaan alat praktek dan peraga siswa oleh TKN Pembina Bergas                     |
| 15.71. | Fasilitasi GOP TKI  |
| 15.72. | Pengelolaan Bantuan Sarana Prasarana PAUD   |
| 15.73. | Penyelenggaraan Akreditasi PAUD   |

|            |  |
|------------|--|
| <b>16.</b> | <b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>   |
| 16.01.     | Pembangunan gedung sekolah   |
| 16.02.     | Penambahan ruang kelas sekolah SD dan SMP APBD II  |
| 16.03.     | Penambahan ruang kelas sekolah SD dan SMP APBD I   |
| 16.04.     | Penambahan ruang kelas sekolah SD dan SMP DAK  |
| 16.05.     | Pembangunan ruang kelas sekolah SD dan SMP DID   |
| 16.06.     | Pembangunan perpustakaan SD dan SMP APBD II  |
| 16.07.     | Pembangunan perpustakaan SD dan SMP APBD I   |
| 16.08.     | Pembangunan perpustakaan SD dan SMP DAK  |
| 16.09.     | Pembangunan perpustakaan SD dan SMP DID  |
| 16.10.     | Pembangunan sarana air bersih/ sanitary SD dan SMP APBD II   |
| 16.11.     | Pembangunan sarana air bersih/ sanitary SD dan SMP APBD I  |
| 16.12.     | Pembangunan sarana air bersih/ sanitary SD dan SMP DAK   |
| 16.13.     | Pembangunan sarana air bersih/ sanitary SD dan SMP DID   |
| 16.14.     | Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa   |
| 16.15.     | Pengadaan pakaian seragam sekolah  |
| 16.16.     | Pengadaan pakaian olahraga   |
| 16.17.     | Pengadaan buku pelajaran dan buku perpustakaan SD dan SMP, dsj APBD II   |
| 16.18.     | Pengadaan buku pelajaran dan buku perpustakaan SD dan SMP, dsj APBD I  |
| 16.19.     | Pengadaan buku pelajaran dan buku perpustakaan SD dan SMP, dsj DAK   |
| 16.20.     | Pengadaan buku pelajaran dan buku perpustakaan SD dan SMP, dsj DID   |
| 16.21.     | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD dan SMP APBD II   |
| 16.22.     | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD dan SMP APBD I  |
| 16.23.     | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD dan SMP DAK   |
| 16.24.     | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD dan SMP DID   |
| 16.25.     | Pengadaan meubelair sekolah SD dan SMP APBD II   |
| 16.26.     | Pengadaan meubelair sekolah SD dan SMP APBD I  |
| 16.27.     | Pengadaan meubelair sekolah SD dan SMP DAK   |
| 16.28.     | Pengadaan meubelair sekolah SD dan SMP DID   |
| 16.29.     | Pengadaan perlengkapan sekolah   |
| 16.30.     | Rehab sedang/ berat bangunan sekolah   |
| 16.31.     | Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah SD dan SMP APBD II  |
| 16.32.     | Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah SD dan SMP APBD I   |
| 16.33.     | Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah SD dan SMP DAK  |
| 16.34.     | Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah SD dan SMP DID  |
| 16.35.     | -  |
| 16.36.     | Pembangunan paving, pagar, talud, mushola, UKS, kantin, ruang guru, ruang TU, dan bangunan prasarana sekolah lainnya SD dan SMP  |
| 16.37.     | Rehabilitasi paving, pagar, talud, mushola, UKS, kantin, ruang guru, ruang TU, dan bangunan prasarana sekolah lainnya SD dan SMP |
| 16.38.     | Rehabilitasi sarana air bersih/ sanitary SD dan SMP APBD II  |
| 16.39.     | Rehabilitasi sarana air bersih/ sanitary SD dan SMP APBD I   |
| 16.40.     | Rehabilitasi sarana air bersih/ sanitary SD dan SMP DAK  |
| 16.41.     | Rehabilitasi sarana air bersih/ sanitary SD dan SMP DID  |
| 16.42.     | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SD/ Sederajat   |

|        |  |
|--------|--|
| 16.43. | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SMP/ Sederajat  |
| 16.44. | Pelatihan penyusunan kurikulum SD  |
| 16.45. | Pelatihan penyusunan kurikulum SMP   |
| 16.46. | Pembinaan Komite SD  |
| 16.47. | Pembinaan Komite SMP   |
| 16.48. | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/ Sederajat   |
| 16.49. | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP/ Sederajat  |
| 16.50. | Pengembangan program sekolah inklusi SD  |
| 16.51. | Pengembangan program sekolah inklusi SMP   |
| 16.52. | Penyelenggaraan paket A setara SD  |
| 16.53. | Penyelenggaraan paket B setara SMP oleh Dinas  |
| 16.54. | Penyelenggaraan paket B setara SMP oleh SKB Susukan  |
| 16.55. | Penyelenggaraan paket B setara SMP di SKB Ungaran  |
| 16.56. | Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar |
| 16.57. | Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SD (lomba-lomba siswa, dsj)  |
| 16.58. | Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SMP (lomba-lomba siswa, dsj)   |
| 16.59. | Pengembangan Comprehensif Teaching and Learning (CTL)  |
| 16.60. | Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan TIK SD dan SMP APBD II                           |
| 16.61. | Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan TIK SD dan SMP DAK                               |
| 16.62. | Penyediaan beasiswa Retrievel untuk anak putus sekolah SD  |
| 16.63. | Penyediaan beasiswa Retrievel untuk anak putus sekolah SMP   |
| 16.64. | Penyediaan beasiswa transisi SD  |
| 16.65. | Penyediaan beasiswa transisi SMP   |
| 16.66. | Penyelenggaraan akreditasi SD dan SMP  |
| 16.67. | Penyediaan beasiswa kurang mampu SD  |
| 16.68. | Penyediaan beasiswa kurang mampu SMP   |
| 16.69. | Penyediaan beasiswa prestasi SD  |
| 16.70. | Penyediaan beasiswa prestasi SMP   |
| 16.71. | Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah SD dan SMP APBD II  |
| 16.72. | Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah SD dan SMP APBD I   |
| 16.73. | Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah SD dan SMP DAK  |
| 16.74. | Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah SD dan SMP DID  |
| 16.75. | Pelaksanaan lomba-lomba Satuan Pendidikan SD   |
| 16.76. | Pelaksanaan lomba-lomba satuan pendidikan SMP  |
| 16.77. | Pelaksanaan regrouping Sekolah Dasar   |
| 16.78. | Penyediaan dana pengembangan sekolah   |
| 16.79. | Penyelenggaraan wisata edukasi, dsj.   |
| 16.80. | Penyelenggaraan PMTAS, dsj.  |
| 16.81. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan SD  |
| 16.82. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan SMP   |
| 17.    | <b>Program Pendidikan Menengah</b>   |
| 17.01. | Pembangunan gedung sekolah   |
| 17.02. | Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah  |

|        |  |
|--------|--|
| 17.03. | Penambahan ruang kelas sekolah   |
| 17.04. | Penambahan ruang guru sekolah  |
| 17.05. | Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) |
| 17.06. | Pembangunan ruang locker siswa   |
| 17.07. | Pembangunan sarana dan prasarana olahraga  |
| 17.08. | Pembangunan ruang serba guna/aula  |
| 17.09. | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir   |
| 17.10. | Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah   |
| 17.11. | Pembangunan ruang ibadah   |
| 17.12. | Pembangunan perpustakaan sekolah   |
| 17.13. | Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya   |
| 17.14. | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary   |
| 17.15. | Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa   |
| 17.16. | Pengadaan pakaian seragam sekolah  |
| 17.17. | Pengadaan pakaian olahraga   |
| 17.18. | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa  |
| 17.19. | Pengadaan mebeluer sekolah   |
| 17.20. | Pengadaan perlengkapan sekolah   |
| 17.21. | Pengadaan alat rumah tangga sekolah  |
| 17.22. | Pengadaan sarana mobilitas sekolah   |
| 17.23. | Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah  |
| 17.24. | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah                                 |
| 17.25. | Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah   |
| 17.26. | Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah  |
| 17.27. | Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa  |
| 17.28. | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga   |
| 17.29. | Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula   |
| 17.30. | Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir                                      |
| 17.31. | Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah  |
| 17.32. | Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah  |
| 17.33. | Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah  |
| 17.34. | Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya                            |
| 17.35. | Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary  |
| 17.36. | Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa   |
| 17.37. | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur sekolah  |
| 17.38. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah  |
| 17.39. | Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah   |
| 17.40. | Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah  |
| 17.41. | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah   |
| 17.42. | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah                                  |
| 17.43. | Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa   |
| 17.44. | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah  |
| 17.45. | Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah   |
| 17.46. | Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah   |



|            |   |
|------------|---|
| 17.47.     | Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa  |
| 17.48.     | Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga   |
| 17.49.     | Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula   |
| 17.50.     | Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir                                    |
| 17.51.     | Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah  |
| 17.52.     | Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah  |
| 17.53.     | Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah  |
| 17.54.     | Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya                                  |
| 17.55.     | Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary  |
| 17.56.     | Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah  |
| 17.57.     | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik  |
| 17.58.     | Pelatihan penyusunan kurikulum  |
| 17.59.     | Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan  |
| 17.60.     | Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan |
| 17.61.     | Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)  |
| 17.62.     | Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu   |
| 17.63.     | Penyelenggaraan paket C setara SMU  |
| 17.64.     | Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)     |
| 17.65.     | Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi                |
| 17.66.     | Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri   |
| 17.67.     | Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah                                     |
| 17.68.     | Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah   |
| 17.69.     | Pembinaan minat, bakat, kreatifitas dan kompetensi siswa  |
| 17.70.     | Pengembangan pelayanan pendidikan untuk sekolah menengah  |
| 17.71.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>18.</b> | <b>Program Pendidikan Non Formal</b>  |
| 18.01.     | Pemberdayaan tenaga pendidik non formal   |
| 18.02.     | Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal   |
| 18.03.     | Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan   |
| 18.04.     | Pengembangan pendidikan keaksaraan  |
| 18.05.     | Pengembangan pendidikan kecakapan hidup   |
| 18.06.     | Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal   |
| 18.07.     | Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal   |
| 18.08.     | Pengembangan kebijakan pendidikan non formal  |
| 18.09.     | Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal                           |
| 18.10.     | Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal  |
| 18.11.     | Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal  |
| 18.12.     | Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal   |
| 18.13.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| 18.14.     | Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Peserta Didik  |
| 18.15.     | Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Dinas   |
| 18.16.     | Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup SKB Sususkan  |
| 18.17.     | Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup SKB Ungaran   |

|            |  |
|------------|--|
| 18.18.     | Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal oleh Dinas   |
| 18.19.     | Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal di SKB Susukan   |
| 18.20.     | Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal di SKB Ungaran   |
| 18.21.     | Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal oleh Dinas   |
| 18.22.     | Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal oleh SKB Susukan   |
| 18.23.     | Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal oleh SKB Ungaran   |
| <b>19.</b> | <b>Program Pendidikan Luar Biasa</b>   |
| 19.01.     | Pembangunan gedung sekolah   |
| 19.02.     | Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah  |
| 19.03.     | Penambahan ruang kelas sekolah   |
| 19.04.     | Penambahan ruang guru sekolah  |
| 19.05.     | Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) |
| 19.06.     | Pembangunan ruang locker siswa   |
| 19.07.     | Pembangunan sarana prasarana olahraga  |
| 19.08.     | Pembangunan ruang serba guna/aula  |
| 19.09.     | Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir   |
| 19.10.     | Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah   |
| 19.11.     | Pembangunan ruang ibadah   |
| 19.12.     | Pembangunan perpustakaan sekolah   |
| 19.13.     | Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya   |
| 19.14.     | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary   |
| 19.15.     | Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa   |
| 19.16.     | Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga                                  |
| 19.17.     | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa  |
| 19.18.     | Pengadaan mebeluer sekolah   |
| 19.19.     | Pengadaan perlengkapan sekolah   |
| 19.20.     | Pengadaan alat rumah tangga sekolah  |
| 19.21.     | Pengadaan sarana mobilitas sekolah   |
| 19.22.     | Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah  |
| 19.23.     | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah                                 |
| 19.24.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah   |
| 19.25.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah  |
| 19.26.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa  |
| 19.27.     | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga   |
| 19.28.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula   |
| 19.29.     | Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir                                      |
| 19.30.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah  |
| 19.31.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah  |
| 19.32.     | Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah  |
| 19.33.     | Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya                            |
| 19.34.     | Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary  |
| 19.35.     | Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar  |
| 19.36.     | Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa   |
| 19.37.     | Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah  |

|            |  |
|------------|--|
| 19.38.     | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah  |
| 19.39.     | Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah   |
| 19.40.     | Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah  |
| 19.41.     | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah   |
| 19.42.     | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah  |
| 19.43.     | Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa   |
| 19.44.     | Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah  |
| 19.45.     | Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah   |
| 19.46.     | Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah   |
| 19.47.     | Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa   |
| 19.48.     | Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga  |
| 19.49.     | Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula  |
| 19.50.     | Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir   |
| 19.51.     | Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah   |
| 19.52.     | Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah   |
| 19.53.     | Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah   |
| 19.54.     | Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya   |
| 19.55.     | Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary   |
| 19.56.     | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik   |
| 19.57.     | Pelatihan penyusunan kurikulum   |
| 19.58.     | Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan   |
| 19.59.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>20.</b> | <b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>   |
| 20.01.     | Pelaksanaan sertifikasi pendidik   |
| 20.02.     | Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan  |
| 20.03.     | Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi  |
| 20.04.     | Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)  |
| 20.05.     | Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)  |
| 20.06.     | Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)   |
| 20.07.     | Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi   |
| 20.08.     | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan              |
| 20.09.     | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan  |
| 20.10.     | Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik   |
| 20.11.     | Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan                  |
| 20.12.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| 20.13.     | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF |
| 20.14.     | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD           |
| 20.15.     | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP          |
| 20.16.     | Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMA/ SMK     |
| 20.17.     | Lomba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan   |
| <b>21.</b> | ..   |

|            |   |
|------------|---|
| <b>22.</b> | <b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>   |
| 22.01.     | Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan  |
| 22.02.     | Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan   |
| 22.03.     | Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan          |
| 22.04.     | Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan   |
| 22.05.     | Pembinaan dewan pendidikan  |
| 22.06.     | Pembinaan komite sekolah  |
| 22.07.     | Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan   |
| 22.08.     | Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan                           |
| 22.09.     | Penyediaan Jasa pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS  |
| 22.10.     | Pengelolaan dan Pengendalian Program Pemerintah Pusat/ Propinsi   |
| 22.11.     | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  |
| 22.12.     | Penyediaan Beasiswa Bagi Peserta Didik SMA/SMK  |
| 22.13.     | Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan SD (Try out, ujian sekolah, ujian nasional, dsj)                                       |
| 22.14.     | Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan SMP (Try out, ujian sekolah, ujian nasional, dsj)                                      |
| 22.15.     | Pelaksanaan pendidikan karakter (Nasionalisme, sosialisasi bahaya rokok, kursus mahir Dasar Pramuka, Pengarustamaangender, dsj) |
| 22.16.     | Penyediaan jasa pendidik dan tenaga kependidikan formal   |
| 22.17.     | Penyediaan jasa pendidik dan tenaga kependidikan non formal   |
| 22.18.     | Pengelolaan dan pengendalian program pemerintah pusat/ propinsi PAUD  |
| 22.19.     | Pengelolaan dan pengendalian program pemerintah pusat/ propinsi SD  |
| 22.20.     | Pengelolaan dan pengendalian program pemerintah pusat/ propinsi SMP   |
| 22.21.     | Fasilitasi Sertifikasi Keahlian/ Profesi untuk Pendidikan Fromal dan Non Formal   |

**Urusan : 1.01.02. - KESEHATAN**

| <b>KODE</b> | <b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>   |
|-------------|---|
| <b>1</b>    | <b>2</b>  |
| <b>15.</b>  | <b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>  |
| 15.01.      | Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan  |
| 15.02.      | Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan  |
| 15.03.      | Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin |
| 15.04.      | Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit                                  |
| 15.05.      | Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan                                     |
| 15.06.      | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>16.</b>  | <b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>   |
| 16.01.      | Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya                              |
| 16.02.      | Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan  |
| 16.03.      | Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya           |
| 16.04.      | Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah                       |
| 16.05.      | Perbaikan gizi mayarakat  |
| 16.06.      | Revitalisasi sistem kesehatan   |
| 16.07.      | Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan  |
| 16.08.      | Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial                   |

|        |  |
|--------|--|
| 16.09. | Peningkatan kesehatan masyarakat   |
| 16.10. | Pelayanan Penunjang Laboratorium   |
| 16.11. | Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana                                  |
| 16.12. | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan                                     |
| 16.13. | Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan  |
| 16.14. | Penyelenggaraan penyehatan lingkungan  |
| 16.15. | Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien ICU  |
| 16.16. | Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien IBS  |
| 16.17. | Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien IGD  |
| 16.18. | Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien One Day Care                                       |
| 16.19. | Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien Rawat Inap dan Perinatologi                        |
| 16.20. | Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien Rawat Jalan  |
| 16.21. | Pelayanan Penunjang Radiologi  |
| 16.22. | Pelayanan Kesehatan Pasien Jamkesmas / Jamkesda  |
| 16.23. | Pelayanan Kesehatan Pasien Asuransi Kesehatan  |
| 16.24. | Pelayanan Pemulasaraan jenazah tidak dikenal   |
| 16.25. | Pengembangan pelayanan dan informasi medis   |
| 16.26. | Pengembangan pelayanan dan informasi keperawatan   |
| 16.27. | Upaya pemenuhan Jasa Obat JKN  |
| 16.28. | Upaya Pemenuhan Jasa Pelayanan Kesehatan   |
| 16.29. | Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok               |
| 16.30. | Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus Merokok di Tempat Umum (DBHCHT) |
| 16.31. | Operasional Kesehatan Manajemen Kabupaten  |
| 16.32. | Operasional Kesehatan Puskesmas Getasan  |
| 16.33. | Operasional Kesehatan Puskesmas Jetak  |
| 16.34. | Operasional Kesehatan Puskesmas Tengaran   |
| 16.35. | Operasional Kesehatan Puskesmas Susukan  |
| 16.36. | Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliwungu  |
| 16.37. | Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh  |
| 16.38. | Operasional Kesehatan Puskesmas Dadapayam  |
| 16.39. | Operasional Kesehatan Puskesmas Pabelan  |
| 16.40. | Operasional Kesehatan Puskesmas Semowo   |
| 16.41. | Operasional Kesehatan Puskesmas Tuntang  |
| 16.42. | Operasional Kesehatan Puskesmas Gedangan   |
| 16.43. | Operasional Kesehatan Puskesmas Banyubiru  |
| 16.44. | Operasional Kesehatan Puskesmas Jambu  |
| 16.45. | Operasional Kesehatan Puskesmas Sumowono   |
| 16.46. | Operasional Kesehatan Puskesmas Ambarawa   |
| 16.47. | Operasional Kesehatan Puskesmas Duren  |
| 16.48. | Operasional Kesehatan Puskesmas Jimbaran   |
| 16.49. | Operasional Kesehatan Puskesmas Bawen  |
| 16.50. | Operasional Kesehatan Puskesmas Bringin  |
| 16.51. | Operasional Kesehatan Puskesmas Bancak   |
| 16.52. | Operasional Kesehatan Puskesmas Bergas   |

|            |  |
|------------|--|
| 16.53.     | Operasional Kesehatan Puskesmas Pringapus  |
| 16.54.     | Operasional Kesehatan Puskesmas Ungaran  |
| 16.55.     | Operasional Kesehatan Puskesmas Lerep  |
| 16.56.     | Operasional Kesehatan Puskesmas Leyangan   |
| 16.57.     | Operasional Kesehatan Puskesmas Kalongan   |
| <b>17.</b> | <b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>   |
| 17.01.     | Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan  |
| 17.02.     | Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya   |
| 17.03.     | Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan   |
| 17.04.     | Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan  |
| 17.05.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>18.</b> | <b>Program Pengembangan Obat Asli Indonesia</b>  |
| 18.01.     | Fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat   |
| 18.02.     | Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia  |
| 18.03.     | Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri  |
| 18.04.     | Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu  |
| 18.05.     | Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait  |
| 18.06.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>19.</b> | <b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>   |
| 19.01.     | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat   |
| 19.02.     | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat   |
| 19.03.     | Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan   |
| 19.04.     | Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan   |
| 19.05.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>20.</b> | <b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>   |
| 20.01.     | Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi   |
| 20.02.     | Pemberian tambahan makanan dan vitamin   |
| 20.03.     | Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya |
| 20.04.     | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi   |
| 20.05.     | Peningkatan gizi lebih   |
| 20.06.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>21.</b> | <b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>   |
| 21.01.     | Pengkajian pengembangan lingkungan sehat   |
| 21.02.     | Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat  |
| 21.03.     | Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat   |
| 21.04.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| 21.05.     | Koordinasi penyelenggaraan Kabupaten Sehat   |
| <b>22.</b> | <b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>  |
| 22.01.     | Penyemprotan/fogging sarang nyamuk   |
| 22.02.     | Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging   |
| 22.03.     | Pengadaan vaksin penyakit menular  |
| 22.04.     | Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah   |
| 22.05.     | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular   |
| 22.06.     | Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik   |

|            |   |
|------------|---|
| 22.07.     | Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular   |
| 22.08.     | Peningkatan Imunisasi   |
| 22.09.     | Peningkatan surveillence epideminologi dan penanggulangan wabah   |
| 22.10.     | Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit                             |
| 22.11.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>23.</b> | <b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>   |
| 23.01.     | Penyusunan standar kesehatan  |
| 23.02.     | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan   |
| 23.03.     | Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan   |
| 23.04.     | Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan  |
| 23.05.     | Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan   |
| 23.06.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| 23.07.     | Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan   |
| 23.08.     | Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit  |
| 23.09.     | Peningkatan akreditasi pelayanan kesehatan  |
| <b>24.</b> | <b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>  |
| 24.01.     | Pelayanan operasi katarak   |
| 24.02.     | Pelayanan kesehatan THT   |
| 24.03.     | Pelayanan operasi bibir sumbing   |
| 24.04.     | Pelayanan sunatan masal   |
| 24.05.     | Penanggulangan ISPA   |
| 24.06.     | Penanggulangan penyakit cacangan  |
| 24.07.     | Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin   |
| 24.08.     | Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar  |
| 24.09.     | Pelayanan kesehatan akibat lumpuh kayu  |
| 24.10.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>25.</b> | <b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya</b> |
| 25.01.     | Pembangunan puskesmas   |
| 25.02.     | Pembangunan puskesmas pembantu  |
| 25.03.     | Pengadaan puskesmas perairan  |
| 25.04.     | Pengadaan puskesmas keliling  |
| 25.05.     | Pembangunan posyandu  |
| 25.06.     | .....   |
| 25.07.     | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas  |
| 25.08.     | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu   |
| 25.09.     | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan   |
| 25.10.     | Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling   |
| 25.11.     | Pengadaan sarana dan prasarana posyandu   |
| 25.12.     | Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap  |
| 25.13.     | Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas  |
| 25.14.     | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas   |
| 25.15.     | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu  |
| 25.16.     | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan  |
| 25.17.     | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling  |

|            |  |
|------------|--|
| 25.18.     | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu   |
| 25.19.     | Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap   |
| 25.20.     | Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas   |
| 25.21.     | Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu   |
| 25.22.     | Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan   |
| 25.23.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>26.</b> | <b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b> |
| 26.01.     | Pembangunan rumah sakit  |
| 26.02.     | Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit   |
| 26.03.     | Pembangunan gudang obat/apotik   |
| 26.04.     | Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)  |
| 26.05.     | Pengembangan ruang gawat darurat   |
| 26.06.     | Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU   |
| 26.07.     | Pengembangan ruang operasi   |
| 26.08.     | Pengembangan ruang terapi  |
| 26.09.     | Pengembangan ruang isolasi   |
| 26.10.     | Pengembangan ruang bersalin  |
| 26.11.     | Pengembangan ruang inkubator   |
| 26.12.     | Pengembangan ruang bayi  |
| 26.13.     | Pengembangan ruang rontgen   |
| 26.14.     | Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit  |
| 26.15.     | Pembangunan kamar jenazah  |
| 26.16.     | Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit  |
| 26.17.     | Rehabilitasi bangunan rumah sakit  |
| 26.18.     | Pengadaan alat-alat rumah sakit  |
| 26.19.     | Pengadaan obat-obatan rumah sakit  |
| 26.20.     | Pengadaan ambulance/mobil jenazah  |
| 26.21.     | Pengadaan mebeleur rumah sakit   |
| 26.22.     | Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)                     |
| 26.23.     | Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit   |
| 26.24.     | Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit   |
| 26.25.     | Pengembangan tipe rumah sakit  |
| 26.26.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>27.</b> | <b>Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>           |
| 27.01.     | Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit   |
| 27.02.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit  |
| 27.03.     | Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik  |
| 27.04.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)  |
| 27.05.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat   |
| 27.06.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU   |
| 27.07.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi   |
| 27.08.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi  |
| 27.09.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi   |



|            |  |
|------------|--|
| 27.10.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin  |
| 27.11.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator   |
| 27.12.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi  |
| 27.13.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen   |
| 27.14.     | Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit                              |
| 27.15.     | Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah   |
| 27.16.     | Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit                     |
| 27.17.     | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit                             |
| 27.18.     | Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah                                     |
| 27.19.     | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit  |
| 27.20.     | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit                                    |
| 27.21.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>28.</b> | <b>Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>                               |
| 28.01.     | kemitraan asuransi kesehatan masyarakat  |
| 28.02.     | kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular                                |
| 28.03.     | kemitraan pengolahan limbah rumah sakit  |
| 28.04.     | kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan                                      |
| 28.05.     | kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis                                    |
| 28.06.     | kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan                                      |
| 28.07.     | kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu  |
| 28.08.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>29.</b> | <b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>                             |
| 29.01.     | Penyuluhan kesehatan anak balita   |
| 29.02.     | Imunisasi bagi anak balita   |
| 29.03.     | Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita                                       |
| 29.04.     | Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita   |
| 29.05.     | Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita                |
| 29.06.     | Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita   |
| 29.07.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>30.</b> | <b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>                                  |
| 30.01.     | Pelayanan pemeliharaan kesehatan   |
| 30.02.     | rekrutmen tenaga perawat kesehatan   |
| 30.03.     | Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan   |
| 30.04.     | Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan  |
| 30.05.     | Pembangunan panti asuhan   |
| 30.06.     | Pelayanan kesehatan  |
| 30.07.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>31.</b> | <b>Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</b>                           |
| 31.01.     | Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri                               |
| 31.02.     | Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga |
| 31.03.     | Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant                  |
| 31.04.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>32.</b> | <b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>                         |
| 32.01.     | Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu                         |

|            |  |
|------------|--|
| 32.02.     | Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu        |
| 32.03.     | Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu   |
| 32.04.     | Pelayanan Upaya peningkatan gerakan sayang ibu / Bayi              |
| 32.05.     | Jaminan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga                     |
| <b>33.</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD</b>                |
| 33.01.     | Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD                 |
| 33.02.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Getasan             |
| 33.03.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jetak               |
| 33.04.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tengaran            |
| 33.05.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Susukan             |
| 33.06.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kaliwungu           |
| 33.07.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Suruh               |
| 33.08.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Dadapayam           |
| 33.09.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pabelan             |
| 33.10.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Semowo              |
| 33.11.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tuntang             |
| 33.12.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Gedangan            |
| 33.13.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Banyubiru           |
| 33.14.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jambu               |
| 33.15.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sumowono            |
| 33.16.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Ambarawa            |
| 33.17.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Duren               |
| 33.18.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jimbaran            |
| 33.19.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bawen               |
| 33.20.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bringin             |
| 33.21.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bancak              |
| 33.22.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bergas              |
| 33.23.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pringapus           |
| 33.24.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Ungaran             |
| 33.25.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Lerep               |
| 33.26.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Leyangan            |
| 33.27.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kalongan            |
| <b>34.</b> | <b>Program Peningkatan pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan</b> |
| 34.01.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Getasan                  |
| 34.02.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jetak                    |
| 34.03.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tengaran                 |
| 34.04.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Susukan                  |
| 34.05.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kaliwungu                |
| 34.06.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Suruh                    |
| 34.07.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dadapayam                |
| 34.08.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pabelan                  |
| 34.09.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Semowo                   |
| 34.10.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tuntang                  |
| 34.11.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gedangan                 |

|            |   |
|------------|---|
| 34.12.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Banyubiru                         |
| 34.13.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jambu                             |
| 34.14.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumowono                          |
| 34.15.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ambarawa                          |
| 34.16.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Duren                             |
| 34.17.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jimbaran                          |
| 34.18.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bawen                             |
| 34.19.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bringin                           |
| 34.20.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bancak                            |
| 34.21.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bergas                            |
| 34.22.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pringapus                         |
| 34.23.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ungaran                           |
| 34.24.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lerep                             |
| 34.25.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Leyangan                          |
| 34.26.     | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalongan                          |
| 34.27.     | Peningkatan Pelayanan Labkesda  |
| <b>35.</b> | <b>Program Pengembangan pola Hidup Sehat Menuju Paradigma Sehat</b>         |
| 35.01.     | Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Dan Balita                            |
| 35.02.     | Pengembangan Taman Gizi Dan Tanaman Obat Keluarga                           |
| 35.03.     | Penimbangan Balita Dan Imunisasi  |
| 35.04.     | Imunisasi, deteksi Dini dan Upaya Penyelesaian Penyakit                     |
| 35.05.     | Peningkatan Status Gizi dan Penanganan Gizi Buruk                           |
| <b>36.</b> | <b>Program Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas dan Jaringannya</b> |
| 36.01.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Getasan                                |
| 36.02.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Jetak                                  |
| 36.03.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Tenganan                               |
| 36.04.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Susukan                                |
| 36.05.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Kaliwungu                              |
| 36.06.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Suruh                                  |
| 36.07.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Dadapayam                              |
| 36.08.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Pabelan                                |
| 36.09.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Semowo                                 |
| 36.10.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Tuntang                                |
| 36.11.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Gedangan                               |
| 36.12.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Banyubiru                              |
| 36.13.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Jambu                                  |
| 36.14.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Sumowono                               |
| 36.15.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Ambarawa                               |
| 36.16.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Duren                                  |
| 36.17.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Jimbaran                               |
| 36.18.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Bawen                                  |
| 36.19.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Bringin                                |
| 36.20.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Bancak                                 |
| 36.21.     | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Bergas                                 |

|        |  |
|--------|--|
| 36.22. | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Pringapus |
| 36.23. | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Ungaran   |
| 36.24. | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Lerep     |
| 36.25. | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Leyangan  |
| 36.26. | Pelayanan Kesehatan JKN di Puskesmas Kalongan  |

Urusan : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN   |
|------------|--|
| 1          | 2  |
| <b>15.</b> | <b>Program Pembangunan Jalan dan jembatan</b>                |
| 15.01.     | Perencanaan pembangunan jalan                                |
| 15.02.     | Survei kontur jalan dan jembatan                             |
| 15.03.     | Pembangunan jalan  |
| 15.04.     | Perencanaan pembangunan jembatan                             |
| 15.05.     | Pembangunan jembatan   |
| 15.06.     | Peningkatan Jalan Kabupaten                                  |
| 15.07.     | Peningkatan Jalan Perkotaan                                  |
| 15.08.     | Peningkatan Jalan Poros Desa                                 |
| 15.09.     | Peningkatan Jalan Non Status                                 |
| 15.10.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                           |
| <b>16.</b> | <b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b>    |
| 16.01.     | Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong       |
| 16.02.     | Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong                 |
| 16.03.     | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong                   |
| 16.04.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                           |
| <b>17.</b> | <b>Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong</b>            |
| 17.01.     | Perencanaan turap/talud/bronjong                             |
| 17.02.     | Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong                |
| 17.03.     | Pembangunan turap/talud/bronjong                             |
| 17.04.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                           |
| <b>18.</b> | <b>Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b> |
| 18.01.     | Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan                  |
| 18.02.     | Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan               |
| 18.03.     | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan                              |
| 18.04.     | Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan                           |
| 18.05.     | Pengadaan Aspal untuk persediaan bantuan pemeliharaan jalan  |
| 18.06.     | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                           |
| <b>19.</b> | <b>Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong</b>    |
| 19.01.     | Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong         |
| 19.02.     | Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong                     |
| 19.03.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                           |
| <b>20.</b> | <b>Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan</b>           |
| 20.01.     | Inspeksi kondisi Jalan                                       |

|        |   |
|--------|---|
| 20.02. | Inspeksi kondisi Jembatan   |
| 20.03. | Evaluasi dan pelaporan  |
| 21.    | <b>Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan</b>   |
| 21.01. | Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat  |
| 21.02. | Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat   |
| 21.03. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| 22.    | <b>Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan</b>                          |
| 22.01. | Penyusunan sistem informasi/data base jalan   |
| 22.02. | Penyusunan sistem informasi/data base jembatan  |
| 22.03. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| 23.    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>                                     |
| 23.01. | Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan  |
| 23.02. | Pembangunan gedung workshop   |
| 23.03. | Pembangunan laboratorium kebinamargaan  |
| 23.04. | Pengadaan alat-alat berat   |
| 23.05. | Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat                                      |
| 23.06. | Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan                                     |
| 23.07. | Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan                                      |
| 23.08. | Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop   |
| 23.09. | Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan  |
| 23.10. | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat   |
| 23.11. | Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat                      |
| 23.12. | Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan                     |
| 23.13. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| 24.    | <b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b> |
| 24.01. | Perencanaan pembangunan jaringan irigasi  |
| 24.02. | Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum   |
| 24.03. | Perencanaan pembangunan reservoir   |
| 24.04. | Perencanaan pembangunan pintu air   |
| 24.05. | Perencanaan normalisasi saluran sungai  |
| 24.06. | Pembangunan jaringan air bersih/air minum   |
| 24.07. | Pembangunan reservoir   |
| 24.08. | Pembangunan pintu air   |
| 24.09. | Pelaksanaan normalisasi saluran sungai  |
| 24.10. | Peningkatan, Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi   |
| 24.11. | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum   |
| 24.12. | Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir   |
| 24.13. | Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air   |
| 24.14. | Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai  |
| 24.15. | Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun                                    |
| 24.16. | Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air  |
| 24.17. | Pemberdayaan Petani Pemakai Air   |
| 24.18. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| 25.    | <b>Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku</b>   |

|            |   |
|------------|---|
| 25.01.     | Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa   |
| 25.02.     | Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa  |
| 25.03.     | Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa  |
| 25.04.     | Pembangunan sumur-sumur air tanah   |
| 25.05.     | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air  |
| 25.06.     | Peningkatan distribusi penyediaan air baku  |
| 25.07.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>26.</b> | <b>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya</b> |
| 26.01.     | Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya   |
| 26.02.     | Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya                         |
| 26.03.     | Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau                                   |
| 26.04.     | Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau                                  |
| 26.05.     | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya  |
| 26.06.     | Peningkatan konversi air tanah  |
| 26.07.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>27.</b> | <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>                        |
| 27.01.     | Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah                 |
| 27.02.     | Penyediaan prasarana dan sarana air limbah  |
| 27.03.     | Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah                                      |
| 27.04.     | Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah   |
| 27.05.     | Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum  |
| 27.06.     | Pengembangan distribusi air minum   |
| 27.07.     | Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum  |
| 27.08.     | Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah                                       |
| 27.09.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>28.</b> | <b>Program Pengendalian Banjir</b>  |
| 28.01.     | Pembangunan reservoir pengendali banjir   |
| 28.02.     | Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir   |
| 28.03.     | Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai   |
| 28.04.     | Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir                             |
| 28.05.     | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir                                  |
| 28.06.     | Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai                           |
| 28.07.     | Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali  |
| 28.08.     | Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir   |
| 28.09.     | Pembangunan prasarana pengaman pantai   |
| 28.10.     | Pembangunan tanggul pemecah ombak   |
| 28.11.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>29.</b> | <b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>                                  |
| 29.01.     | Perencanaan pengembangan infrastruktur  |
| 29.02.     | Pembangunan/peningkatan infrastruktur   |
| 29.03.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>30.</b> | <b>Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>  |
| 30.01.     | Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan  |
| 30.02.     | Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan  |

|            |  |
|------------|--|
| 30.03.     | Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan   |
| 30.04.     | Pembangunan pasar perdesaaan   |
| 30.05.     | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan  |
| 30.06.     | Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan                                       |
| 30.07.     | Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaan   |
| 30.08.     | Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan   |
| 30.09.     | Fasilitasi bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan  |
| 30.10.     | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan   |
| <b>31.</b> | <b>Program Pengaturan Jasa Konstruksi</b>  |
| 31.01.     | Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait |
| 31.02.     | Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi  |
| 31.03.     | Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/ Umum Semesteran  |
| <b>32.</b> | <b>Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi</b>  |
| 32.01.     | Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)                                    |
| 32.02.     | Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)               |
| 32.03.     | Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat   |
| 32.04.     | Penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan jasa konstruksi   |
| <b>33.</b> | <b>Program Pengawasan Jasa Konstruksi</b>  |
| 33.01.     | Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi  |
| 33.02.     | Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi  |
| 33.03.     | Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi  |
| 33.04.     | Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan   |
| 33.05.     | Pengawasan terhadap K-3  |
| <b>34.</b> | <b>Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong</b>                                  |
| 34.01.     | Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran Drainase/ Gorong-gorong                                     |
| 34.02.     | Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran Drainase/ Gorong-gorong   |
| <b>35.</b> | <b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>  |
| 35.01.     | Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang   |
| 35.02.     | Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL  |
| 35.03.     | Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang  |
| 35.04.     | Penyusunan rencana tata ruang wilayah  |
| 35.05.     | Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan   |
| 35.06.     | Penyusunan rencana teknis ruang kawasan  |
| 35.07.     | Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan  |
| 35.08.     | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW   |
| 35.09.     | Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang                                 |
| 35.10.     | Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang  |
| 35.11.     | Revisi rencana tata ruang  |
| 35.12.     | Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang  |
| 35.13.     | Survey dan pemetaan  |
| 35.14.     | Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota                              |
| 35.15.     | Pengelolaan Administrasi Prasarana Daerah  |
| 35.16.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang  |
| 35.17.     | Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pedesaan   |

|            |  |
|------------|--|
| 35.18.     | Sistem Informasi Manajemen Penataan Ruang  |
| <b>36.</b> | <b>Program Pemanfaatan Ruang</b>   |
| 36.01.     | Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang   |
| 36.02.     | Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang  |
| 36.03.     | Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang  |
| 36.04.     | Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang                              |
| 36.05.     | Survey dan pemetaan  |
| 36.06.     | Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang   |
| 36.07.     | Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang                       |
| 36.08.     | Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota                       |
| 36.09.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang  |
| <b>37.</b> | <b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>  |
| 37.01.     | Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang  |
| 37.02.     | Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang                                      |
| 37.03.     | Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang             |
| 37.04.     | Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang  |
| 37.05.     | Pengawasan pemanfaatan ruang   |
| 37.06.     | Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota                     |
| 37.07.     | Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang   |
| 37.08.     | Pelaksanaan perijinan IMB  |
| 37.09.     | Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan  |
| <b>38.</b> | <b>Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan Air Tanah</b>                          |
| 38.01.     | Penyusunan regulasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                    |
| 38.02.     | Penyusunan Regulasi Pertambangan panas Bumi  |
| 38.03.     | Penyusunan Regulasi Pemanfaatan Air Tanah  |
| 38.04.     | Sosialisasi Peraturan pertambangan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah                               |
| 38.05.     | Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan    |
| 38.06.     | Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemanfaatan air tanah  |
| 38.07.     | Penyusunan Data potensi Mineral bukan logam dan batuan   |
| 38.08.     | Penyusunan Data Potensi Cekungan Air Tanah   |
| 38.09.     | Penyusunan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan                               |
| 38.10.     | Penyusunan Wilayah pertambangan rakyat   |
| 38.11.     | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan   |
| 38.12.     | Pembangunan sarana dan prasarana sumur bor di daerah sulu air                                      |
| 38.13.     | Pembangunan sumur injeksi dan sarana prasarana imbuhan air tanah buatan                            |
| 38.14.     | Pembangunan sumur pantau mukai air tanah   |
| <b>39.</b> | <b>Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan</b>        |
| 39.01.     | Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat   |
| 39.02.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat |
| 39.03.     | Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi  |
| 39.04.     | Penyusunan Data Dasar Geologi dan sumber daya mineral  |
| <b>40.</b> | <b>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, Energi dan Migas</b>               |
| 40.01.     | Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan  |



|        |   |
|--------|---|
| 40.02. | Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi sarana dan Prasarana LPJU        |
| 40.03. | Perluasan Jaringan Listrik Masuk Desa                                     |
| 40.04. | Penyusunan regulasi bidang ketenagalistrikan, energi dan migas            |
| 40.05. | Penyusunan rencana umum daerah bidang ketenagalistrikan, energi dan migas |
| 40.06. | Penelitian dan pengembangan potensi energi baru terbarukan                |
| 40.07. | Pembangunan sarana dan prasarana biogas                                   |

Urusan : 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|------------|---|
| 1          | 2   |
| <b>15.</b> | <b>Program Pengembangan Perumahan</b>   |
| 15.01.     | Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan   |
| 15.02.     | Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)   |
| 15.03.     | Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan   |
| 15.04.     | Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan  |
| 15.05.     | Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha   |
| 15.06.     | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu                              |
| 15.07.     | Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat  |
| 15.08.     | Perencanaan Pengembangan Perumahan  |
| 15.09.     | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan  |
| 15.10.     | Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman                                 |
| <b>16.</b> | <b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>   |
| 16.01.     | Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan          |
| 16.02.     | Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin                     |
| 16.03.     | Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan                                       |
| 16.04.     | Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan  |
| 16.05.     | Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang |
| 16.06.     | Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin                    |
| 16.07.     | Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman   |
| 16.08.     | Perencanaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman  |
| 16.09.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>17.</b> | <b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>   |
| 17.01.     | Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan                         |
| 17.02.     | Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat                    |
| 17.03.     | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan                           |
| 17.04.     | Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah   |
| 17.05.     | Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum                           |
| 17.06.     | Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan    |
| 17.07.     | Pelaksanaan perijinan IMB   |
| 17.08.     | Fasilitasi bantuan pembangunan/rehab perumahan keluarga miskin                                      |
| 17.09.     | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  |
| <b>18.</b> | <b>Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial</b>                                       |

|            |   |
|------------|---|
| 18.01.     | Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam                       |
| 18.02.     | Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial                     |
| 18.03.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>19.</b> | <b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>                  |
| 19.01.     | Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran            |
| 19.02.     | Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran           |
| 19.03.     | Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung   |
| 19.04.     | Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran                                 |
| 19.05.     | Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran                |
| 19.06.     | Kegiatan rekrutment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran                     |
| 19.07.     | Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran                                       |
| 19.08.     | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran                            |
| 19.09.     | Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran                         |
| 19.10.     | Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran                         |
| 19.11.     | Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran                                 |
| 19.12.     | Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran                                 |
| 19.13.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>20.</b> | <b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>  |
| 20.01.     | Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman |
| 20.02.     | Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal                         |
| 20.03.     | Koordinasi pengelolaan areal pemakaman  |
| 20.04.     | Koordinasi penataan areal pemakaman   |
| 20.05.     | Pemberian perijinan pemakaman   |
| 20.06.     | Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman  |
| 20.07.     | Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman   |
| 20.08.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |

Urusan : 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|------------|---|
| 1          | 2   |
| <b>19.</b> | <b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>                    |
| 19.01.     | Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat  |
| <b>22.</b> | <b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>                           |
| 22.01.     | Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam                                    |
| <b>33.</b> | <b>Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>                           |
| 33.01.     | Pemantauan, Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam                                |
| 33.02.     | Pengadaan tempat Penampungan Sementara Dan Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban bencana alam |
| 33.03.     | Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam             |
| 33.04.     | Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara                |
| 33.05.     | Bintek dan Pelatihan SAR  |
| 33.06.     | Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi Masyarakat/ Pelajar                                 |
| 33.07.     | Fasilitasi Program Darurat Bencana bagi masyarakat dan pelajar                                  |
| <b>34.</b> | <b>Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasca Bencana</b>                         |

|            |   |
|------------|---|
| 34.01.     | Pelatihan teknis penilaian Damage and Losses Assesment (DALA)                               |
| 34.02.     | Pelatihan teknis Post Disaster Need Assesment (PDNA)  |
| 34.03.     | Fasilitasi dan koordinasi penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana             |
| 34.04.     | Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kerusakan infrastruktur pasca bencana              |
| 34.05.     | Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana  |
| 34.06.     | Fasilitasi dan Koordinasi Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana                   |
| 34.07.     | Fasilitasi dan Koordinasi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi                   |
| 34.08.     | Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana  |
| 34.09.     | Fasilitasi dan Koordinasi Pemberian Bantuan Korban Bencana                                  |
| 34.10.     | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  |
| 34.11.     | Pemulihan pasca bencana (early recovery)  |
| 34.12.     | Identifikasi rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana                                     |
| <b>35.</b> | <b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>                               |
| 35.01.     | Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan                        |
| 35.02.     | Pembangunan pos jaga/ ronda   |
| 35.03.     | Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan                                   |
| 35.04.     | Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat                               |
| 35.05.     | Pengendalian keamanan lingkungan  |
| 35.06.     | Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan                         |
| 35.07.     | Penggalangan Jaringan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)                                  |
| 35.08.     | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  |
| 35.09.     | Penanganan konflik sosial   |
| 35.10.     | Pemberdayaan Satlinmas  |
| <b>36.</b> | <b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>                    |
| 36.01.     | Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja                           |
| 36.02.     | Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan              |
| 36.03.     | Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan |
| 36.04.     | Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah              |
| 36.05.     | Pengawasan umum pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati serta peraturan lain di Daerah       |
| 36.06.     | Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan                           |
| 36.07.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>37.</b> | <b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>                        |
| 37.01.     | Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba                       |
| 37.02.     | Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi                                      |
| 37.03.     | Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu  |
| 37.04.     | Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme  |
| 37.05.     | Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan                                   |
| 37.06.     | Penyuluhan pencegahan praktek perjudian   |
| 37.07.     | Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur   |
| 37.08.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |

Urusan : 1.01.06. - SOSIAL

| KODE   | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|--------|---|
| 1      | 2   |
| 15.    | <b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>                               |
| 15.01. | Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya |
| 15.02. | Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin   |
| 15.03. | Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin   |
| 15.04. | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin   |
| 15.05. | Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial  |
| 15.06. | Fasilitasi Distribusi pangan bagi fakir miskin  |
| 16.    | <b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>  |
| 16.01. | Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia   |
| 16.02. | Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak  |
| 16.03. | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)   |
| 16.04. | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal  |
| 16.05. | Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana   |
| 16.06. | Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center  |
| 16.07. | Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS  |
| 16.08. | Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial   |
| 16.09. | Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan                                       |
| 16.10. | penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa  |
| 16.11. | Pelayanan KIE bagi para kelompok resiko tinggi (Resti) HIV / AIDS   |
| 16.12. | Pelayanan KIE bagi tokoh masyarakat, karang taruna, PSM, dalam pencegahan permasalahan sosial   |
| 16.13. | Pelaksanaan bimbingan dan motifasi bagi bekas penderita penyakit kronis   |
| 16.14. | Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial  |
| 16.15. | Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan bencana berbasis Masyarakat  |
| 16.16. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  |
| 17.    | <b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>   |
| 17.01. | Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar  |
| 17.02. | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar  |
| 17.03. | Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar  |
| 17.04. | Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar  |
| 17.05. | Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar  |
| 17.06. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| 18.    | <b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>   |
| 18.01. | Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan  |
| 18.02. | Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma   |
| 18.03. | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma   |
| 18.04. | Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma  |

|            |  |
|------------|--|
| 18.05.     | Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik   |
| <b>19.</b> | <b>Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo</b>   |
| 19.01.     | Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo   |
| 19.02.     | Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo  |
| 19.03.     | Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo  |
| 19.04.     | Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo   |
| 19.05.     | Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik   |
| 19.06.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>20.</b> | <b>Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b> |
| 20.01.     | Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial                                 |
| 20.02.     | Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial   |
| 20.03.     | Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial  |
| 20.04.     | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial  |
| 20.05.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>21.</b> | <b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>   |
| 21.01.     | Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha   |
| 21.02.     | Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat                                 |
| 21.03.     | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat   |
| 21.04.     | Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial   |
| 21.05.     | Kegiatan Penyaluran Santunan Kematian  |
| <b>22.</b> | <b>Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan</b>   |
| 22.01.     | Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan  |
| 22.02.     | Fasilitasi Jamaan Haji   |
| 22.03.     | Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Non Formal   |
| <b>23.</b> | <b>Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan</b>  |
| 23.01.     | Pemeliharaan Makam Pahlawan & Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan & Kesetiakawanan Sosial                 |

Urusan : 1.02.01. - TENAGA KERJA

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN   |
|------------|--|
| 1          | 2  |
| <b>15.</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b> |
| 15.01.     | Penyusunan data base tenaga kerja daerah                           |
| 15.02.     | Pembangunan balai latihan kerja                                    |
| 15.03.     | Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja |
| 15.04.     | Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK  |
| 15.05.     | Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja       |
| 15.06.     | Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja           |
| 15.07.     | Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK               |
| 15.08.     | Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK                |
| 15.09.     | Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja berbasis Masyarakat  |
| 15.10.     | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan                                 |
| <b>16.</b> | <b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>                        |

|        |   |
|--------|---|
| 16.01. | Penyusunan informasi bursa tenaga kerja   |
| 16.02. | Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja   |
| 16.03. | Kerjasama pendidikan dan pelatihan  |
| 16.04. | Penyiapan tenaga kerja siap pakai   |
| 16.05. | Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan  |
| 16.06. | Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat   |
| 16.07. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| 17.    | <b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>  |
| 17.01. | Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja  |
| 17.02. | Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial  |
| 17.03. | Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan  |
| 17.04. | Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan  |
| 17.05. | Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja  |
| 17.06. | penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja   |
| 17.07. | Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja  |
| 17.08. | Fasilitasi Penentuan dan pelaksanaan upah minimum   |
| 17.09. | Sosialisasi dan pembinaan syarat kerja  |
| 17.10. | Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan                 |
| 17.11. | Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan mengenai norma kerja dan kesehatan dan keselamatan kerja                     |
| 17.12. | Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industri |
| 17.13. | Sosialisasi peraturan perundangan di bidang perselisihan dan kelembagaan hubungan industri  |
| 17.14. | Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma ketenagakerjaan   |
| 17.15. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  |

**Urusan : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

| KODE   | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|--------|---|
| 1      | 2   |
| 15.    | <b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>                                 |
| 15.01. | Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi           |
| 15.02. | Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik             |
| 15.03. | Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 15.04. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| 16.    | <b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>  |
| 16.01. | Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan  |
| 16.02. | Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)                              |
| 16.03. | Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak      |
| 16.04. | Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)                        |
| 16.05. | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak   |
| 16.06. | Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak                              |
| 16.07. | Evaluasi Pelaksanaan PUG  |

|            |   |
|------------|---|
| 16.08.     | Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak                                   |
| 16.09.     | Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan                |
| 16.10.     | Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender                                       |
| 16.11.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>17.</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>            |
| 17.01.     | Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah                          |
| 17.02.     | Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT         |
| 17.03.     | Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan                                   |
| 17.04.     | Sosialisasi dan advokasi kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)     |
| 17.05.     | Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan          |
| 17.06.     | Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT                                |
| 17.07.     | Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat                       |
| 17.08.     | Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan               |
| 17.09.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>18.</b> | <b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan</b> |
| 18.01.     | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan   |
| 18.02.     | Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender |
| 18.03.     | Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera    |
| 18.04.     | Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha         |
| 18.05.     | Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan                    |
| 18.06.     | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)                                   |
| 18.07.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>19.</b> | <b>Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Gender</b>                     |
| 19.01.     | Penguatan ekonomi masyarakat berbasis gender (DBHCHT)                           |

**Urusan : 1.02.03. - KETAHANAN PANGAN**

| <b>KODE</b> | <b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>  |
|-------------|--|
| <b>1</b>    | <b>2</b>   |
| <b>15.</b>  | <b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>                                    |
| 15.01.      | Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan                        |
| 15.02.      | Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan                |
| 15.03.      | Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah                                |
| 15.04.      | Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan                                     |
| 15.05.      | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan                        |
| 15.06.      | Pemantauan dan analisis akses dan harga pangan pokok/ strategis                |
| 15.07.      | Peningkatan koordinasi, pemantauan, monev dan pengawasan keamanan pangan segar |
| 15.08.      | Pengembangan cadangan pangan daerah  |
| 15.09.      | Pengembangan desa mandiri pangan   |
| 15.10.      | Pengembangan lumbung pangan desa   |
| 15.11.      | Pengembangan model distribusi pangan yang efisien                              |
| 15.12.      | Peningkatan mutu dan keamanan pangan   |
| 15.13.      | Koordinasi kebijakan perberasan  |
| 15.14.      | Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan                                |

|        |  |
|--------|--|
| 15.15. | Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi                                  |
| 15.16. | Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan                                 |
| 15.17. | Fasilitasi Distribusi / Penyaluran beras untuk keluarga miskin                   |
| 15.18. | Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan                                 |
| 15.19. | Pengembangan perbenihan/perbibitan   |
| 15.20. | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian |
| 15.21. | Penyusunan potensi sumber pangan   |

Urusan : 1.02.04. - PERTANAHAN

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|------------|---|
| 1          | 2   |
| <b>15.</b> | <b>Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah</b>   |
| 15.01.     | Penyusunan sistem pendaftaran tanah   |
| 15.02.     | Sosialisasi sistem pendaftaran tanah  |
| <b>16.</b> | <b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>   |
| 16.01.     | Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah   |
| 16.02.     | Penyuluhan hukum pertanahan   |
| 16.03.     | Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah melalui Sertifikasi dan Pemasangan Papan Nama Tanah-Tanah Pemda |
| <b>17.</b> | <b>Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>  |
| 17.01.     | Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan  |
| <b>18.</b> | <b>Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>   |
| 18.01.     | Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal  |

Urusan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|------------|---|
| 1          | 2   |
| <b>15.</b> | <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>           |
| 15.01.     | Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah                     |
| 15.02.     | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan               |
| 15.03.     | Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan                |
| 15.04.     | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan |
| 15.05.     | Pengembangan teknologi pengolahan persampahan                         |
| 15.06.     | Bimbingan teknis persampahan  |
| 15.07.     | Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan                  |
| 15.08.     | Kerjasama pengelolaan persampahan                                     |
| 15.09.     | Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah                             |
| 15.10.     | Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan                         |
| 15.11.     | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan      |
| 15.12.     | Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan  |
| 15.13.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                    |
| <b>16.</b> | <b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b> |
| 16.01.     | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura                               |



|        |  |
|--------|--|
| 16.02. | Koordinasi penilaian langit biru   |
| 16.03. | Pemantauan Kualitas Lingkungan   |
| 16.04. | Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup   |
| 16.05. | Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)  |
| 16.06. | Pengelolaan B3 dan Limbah B3   |
| 16.07. | Pengkajian dampak lingkungan   |
| 16.08. | Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan  |
| 16.09. | Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)  |
| 16.10. | Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih   |
| 16.11. | Pengembangan produksi ramah lingkungan   |
| 16.12. | Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup  |
| 16.13. | Koordinasi penyusunan AMDAL  |
| 16.14. | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup   |
| 16.15. | Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif  |
| 16.16. | Penerapan Manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada analisis dampak lingkungan (AMDAL) (DBHCHT) |
| 16.17. | Monitoring, evaluasi Konservasi Sumber Daya Alam   |
| 17.    | <b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>  |
| 17.01. | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air  |
| 17.02. | Pantai dan Laut Lestari  |
| 17.03. | Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati Laut               |
| 17.04. | Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan   |
| 17.05. | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim  |
| 17.06. | Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan   |
| 17.07. | Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air  |
| 17.08. | Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA  |
| 17.09. | Koordinasi pengelolaan konservasi SDA  |
| 17.10. | Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem  |
| 17.11. | Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut   |
| 17.12. | Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional  |
| 17.13. | Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan  |
| 17.14. | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA   |
| 17.15. | Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi  |
| 17.16. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya alam  |
| 18.    | <b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam</b>  |
| 18.01. | Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk                            |
| 18.02. | Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup                  |
| 18.03. | Rehabilitasi hutan dan lahan   |
| 18.04. | Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan  |
| 18.05. | Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun                    |
| 18.06. | Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun                   |
| 18.07. | Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA                                   |
| 18.08. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |

|        |  |
|--------|--|
| 19.    | <b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>          |
| 19.01. | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan                                     |
| 19.02. | Pengembangan data dan informasi lingkungan   |
| 19.03. | Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah                |
| 19.04. | Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah   |
| 19.05. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| 20.    | <b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>   |
| 20.01. | Pengujian emisi kendaraan bermotor   |
| 20.02. | Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri  |
| 20.03. | Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair  |
| 20.04. | Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi                                 |
| 20.05. | Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran  |
| 20.06. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| 21.    | <b>Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan</b> |
| 21.01. | Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi                                       |
| 21.02. | Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata  |
| 21.03. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| 22.    | <b>Program Pengendalian Kebakaran Hutan</b>  |
| 22.01. | Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan   |
| 22.02. | Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan   |
| 22.03. | Koordinasi pengendalian kebakaran hutan  |
| 22.04. | Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan                            |
| 22.05. | Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan   |
| 22.06. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| 23.    | <b>Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut</b>                                 |
| 23.01. | Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut  |
| 23.02. | Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut   |
| 24.    | <b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>   |
| 24.01. | Penyusunan kebijakan, norma, standard prosedur dan manual pengelolaan RTH                              |
| 24.02. | Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH                            |
| 24.03. | Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH   |
| 24.04. | Penyusunan program pengembahan RTH   |
| 24.05. | Penataan RTH   |
| 24.06. | Pemeliharaan RTH   |
| 24.07. | Pengembangan taman rekreasi  |
| 24.08. | Pengawasan dan pengendalian RTH  |
| 24.09. | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH   |
| 24.10. | Monitoring dan evaluasi  |

Urusan : 1.02.06. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

| KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN |
|------|----------------------|
| 1    | 2                    |
|      |                      |

|            |  |
|------------|--|
| <b>15.</b> | <b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>  |
| 15.01.     | Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu  |
| 15.02.     | Pelatihan tenaga pengelola SIAK  |
| 15.03.     | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan  |
| 15.04.     | Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi NIK  |
| 15.05.     | Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan  |
| 15.06.     | Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan   |
| 15.07.     | Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat   |
| 15.08.     | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan   |
| 15.09.     | Pengembangan data base kependudukan  |
| 15.10.     | Penyusunan kebijakan kependudukan  |
| 15.11.     | Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil  |
| 15.12.     | Sosialisasi kebijakan kependudukan   |
| 15.13.     | Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan   |
| 15.14.     | Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil  |
| 15.15.     | Peningkatan pelayanan Publik pendaftaran Penduduk  |
| 15.16.     | Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan Kelahiran dan Kematian   |
| 15.17.     | Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan perkawinan Perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan |
| 15.18.     | Pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk   |
| 15.19.     | Pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan  |
| 15.20.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |

**Urusan : 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

| <b>KODE</b> | <b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>   |
|-------------|---|
| <b>1</b>    | <b>2</b>  |
| <b>15.</b>  | <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>  |
| 15.01.      | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan   |
| 15.02.      | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat                             |
| 15.03.      | Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa   |
| 15.04.      | Pendampingan dan pengembangan P2KP/PNPM (Paket dan Replikasi)                                     |
| 15.05.      | Pendampingan/Pengembangan program pengembangan kecamatan/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat |
| <b>16.</b>  | <b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>  |
| 16.01.      | Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman  |
| 16.02.      | Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa  |
| 16.03.      | Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan  |
| 16.04.      | Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan perternakan   |
| 16.05.      | Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan                            |
| 16.06.      | Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan                        |
| 16.07.      | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>17.</b>  | <b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>                            |
| 17.01.      | Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa  |
| 17.02.      | Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa   |

|            |  |
|------------|--|
| 17.03.     | Pemberian stimulan pembangunan desa  |
| 17.04.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>18.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>                      |
| 18.01.     | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan      |
| 18.02.     | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa          |
| 18.03.     | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa        |
| 18.04.     | Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa                                   |
| 18.05.     | Penataan Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa                                    |
| 18.06.     | Peningkatan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) |
| 18.07.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>19.</b> | <b>Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan</b>                            |
| 19.01.     | Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha ekonomi Produktif              |
| <b>20.</b> | <b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>                  |
| 20.01.     | Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa                                 |
| 20.02.     | Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa                          |
| 20.03.     | Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa                                       |
| 20.04.     | Fasilitasi Dana Alokasi Umum Desa  |
| 20.05.     | Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa  |
| 20.06.     | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan   |
| <b>21.</b> | -  |
| 21.00.     | -  |

Urusan : 1.02.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN   |
|------------|--|
| 1          | 2  |
| <b>15.</b> | <b>Program Keluarga Berencana</b>  |
| 15.01.     | Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin                  |
| 15.02.     | Pelayanan KIE  |
| 15.03.     | Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu                                   |
| 15.04.     | Promosi Pelayanan Khiba  |
| 15.05.     | Pembinaan Keluarga Berencana   |
| 15.06.     | Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling   |
| 15.07.     | Operasional Keluarga Berencana   |
| <b>16.</b> | <b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>   |
| 16.01.     | Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)                         |
| 16.02.     | Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat                                     |
| <b>17.</b> | <b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>   |
| 17.01.     | Pelayanan konseling KB   |
| 17.02.     | Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB  |
| 17.03.     | Pengadaan alat kontrasepsi   |
| 17.04.     | Pelayanan KB medis operasi   |
| <b>18.</b> | <b>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</b> |
| 18.01.     | Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB                               |

|        |  |
|--------|--|
| 19.    | <b>Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat</b>      |
| 19.01. | Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat                  |
| 20.    | <b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>                          |
| 20.01. | Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR  |
| 20.02. | Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah           |
| 21.    | <b>Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS</b>                        |
| 21.01. | Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS  |
| 22.    | <b>Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak</b> |
| 22.01. | Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak                 |
| 23.    | <b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>                                |
| 23.01. | Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan                                  |
| 24.    | <b>Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU</b>                                  |
| 24.01. | Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU                                      |

Urusan : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

| KODE   | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|--------|---|
| 1      | 2   |
| 15.    | <b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>                                    |
| 15.01. | Perencanaan pembanguna prasaranan dan fasilitas perhubungan                                       |
| 15.02. | Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan                              |
| 15.03. | Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan                                  |
| 15.04. | Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan   |
| 15.05. | Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang   |
| 15.06. | Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan                          |
| 15.07. | Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat   |
| 15.08. | Kegiatan Evaluasi kinerja jaringan Jalan  |
| 15.09. | Kegiatan Penyusunan Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan Fasilitas lalulintas                 |
| 15.10. | Monitoring , Evaluasi dan pelaporan   |
| 16.    | <b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>                         |
| 16.01. | Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor                                |
| 16.02. | Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor                            |
| 16.03. | Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang                                   |
| 16.04. | Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan  |
| 16.05. | Rehabilitasi/Pemeliharaan Apiil, Rambu, Halte dan RPPJ  |
| 17.    | <b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>   |
| 17.01. | Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang             |
| 17.02. | Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan                                     |
| 17.03. | Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang              |
| 17.04. | Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang                             |
| 17.05. | Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya                          |
| 17.06. | Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal                      |
| 17.07. | Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama |

|            |  |
|------------|--|
| 17.08.     | Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum  |
| 17.09.     | Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal                    |
| 17.10.     | Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah  |
| 17.11.     | Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan   |
| 17.12.     | Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan  |
| 17.13.     | Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan   |
| 17.14.     | Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan   |
| 17.15.     | Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan |
| 17.16.     | Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan  |
| 17.17.     | Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang  |
| 17.18.     | Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang   |
| 17.19.     | Pelayanan Perijinan Angkutan Orang   |
| 17.20.     | Pelayanan perijinan angkutan barang  |
| 17.21.     | Pelayanan pengelolaan perparkiran  |
| 17.22.     | Kegiatan Posko Angkutan Lebaran  |
| 17.23.     | Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi prasarana sub terminal                                       |
| 17.24.     | Kegiatan inventarisasi dan analisis data pelayanan multimoda                                       |
| 17.25.     | Kegiatan dalam pelayanan multimoda   |
| 17.26.     | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan   |
| <b>18.</b> | <b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>  |
| 18.01.     | Pembangunan gedung terminal  |
| 18.02.     | Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal  |
| 18.03.     | Pembangunan jembatan penyebrangan gedung terminal  |
| <b>19.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas</b>  |
| 19.01.     | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas  |
| 19.02.     | Pengadaan Marka Jalan  |
| 19.03.     | Pengadaan Pagar Pengaman Jalan   |
| 19.04.     | Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas ( APILL )  |
| 19.05.     | Fasilitasi pendukung kegiatan lalulintas dan angkutan jalan  |
| <b>20.</b> | <b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>                               |
| 20.01.     | Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor   |
| 20.02.     | Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor  |
| 20.03.     | Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor   |

**Urusan : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|------------|---|
| 1          | 2   |
| <b>15.</b> | <b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b> |
| 15.01.     | Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP |
| 15.02.     | Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi      |
| 15.03.     | Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi   |
| 15.04.     | Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi        |
| 15.05.     | Pengadaan alat studio dan komunikasi                              |

|        |   |
|--------|---|
| 15.06. | Pengkajian dan pengembangan sistem informasi  |
| 15.07. | Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi                                     |
| 16.    | <b>Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi</b>                            |
| 16.01. | Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi   |
| 17.    | <b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>                           |
| 17.01. | Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi   |
| 18.    | <b>Program kerjasama informasi dan media massa</b>  |
| 18.01. | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah   |
| 18.02. | Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah  |
| 18.03. | Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat                                   |
| 18.04. | Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah Melalui Peresmian Proyek se Kabupaten Semarang |
| 18.05. | Kegiatan penyebarluasan informasi Pembangunan Melalui Operasional Radio Suara Serasi                |
| 18.06. | Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui dokumen dan Advedtorial                |
| 18.07. | Kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah melalui penerbitan Majalah Gema Serasi         |
| 18.08. | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui PPID                             |
| 23.    | <b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>   |
| 23.01. | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik   |
| 39.    | -   |
| 39.01. | -   |

**Urusan : 1.02.11. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

| KODE   | PROGRAM DAN KEGIATAN   |
|--------|--|
| 1      | 2  |
| 15.    | <b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</b>                         |
| 15.01. | Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah  |
| 15.02. | Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah   |
| 15.03. | Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah                                |
| 15.04. | Pendirian unit penanganan pengaduan  |
| 15.05. | Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan nasional   |
| 15.06. | Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah                              |
| 15.07. | Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah                                   |
| 15.08. | Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah   |
| 15.09. | Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah                               |
| 15.10. | Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah                               |
| 15.11. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| 16.    | <b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>   |
| 16.01. | Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis                                     |
| 16.02. | Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing |
| 16.03. | Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah                  |
| 16.04. | Peningkatan kerjasama di bidang HAKI   |
| 16.05. | Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi                                      |
| 16.06. | Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan  |

|            |   |
|------------|---|
| 16.07.     | Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD   |
| 16.08.     | Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah  |
| 16.09.     | Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah |
| 16.10.     | Pelatihan manajemen usaha koperasi  |
| 16.11.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>17.</b> | <b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>                                      |
| 17.01.     | Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan  |
| 17.02.     | Pengembangan klaster bisnis   |
| 17.03.     | Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi                                     |
| 17.04.     | Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah   |
| 17.05.     | Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah                                       |
| 17.06.     | Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah   |
| 17.07.     | Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga  |
| 17.08.     | Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah                                   |
| 17.09.     | Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah   |
| 17.10.     | Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal  |
| 17.11.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>18.</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>  |
| 18.01.     | Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi   |
| 18.02.     | Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian   |
| 18.03.     | Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian   |
| 18.04.     | Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian   |
| 18.05.     | Perbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi  |
| 18.06.     | Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi  |
| 18.07.     | Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi   |
| 18.08.     | Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi                                |
| 18.09.     | Pembinaan usaha koperasi dan prakoperasi  |
| 18.10.     | Peningkatan sistem pelaporan KSP/USP  |
| 18.11.     | Penilaian kesehatan koperasi  |
| 18.12.     | Penyuluhan peraturan perundang undangan koperasi dan UMKM   |
| 18.13.     | Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan KUMKM   |
| 18.14.     | Pengendalian KSP/USP dan KJKS/UJKS  |
| 18.15.     | Pembentukan dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi   |
| 18.16.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |

**Urusan : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL**

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|------------|---|
| 1          | 2   |
| <b>15.</b> | <b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>  |
| 15.01.     | Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah |
| 15.02.     | Pengembangan potensi unggulan daerah  |
| 15.03.     | Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)      |



|            |   |
|------------|---|
| 15.04.     | Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA                               |
| 15.05.     | Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal   |
| 15.06.     | Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha |
| 15.07.     | Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah                                 |
| 15.08.     | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal                     |
| 15.09.     | Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi   |
| 15.10.     | Penyelenggaraan pameran investasi   |
| 15.11.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| 15.12.     | Penyusunan buku rencana umum penanaman modal  |
| <b>16.</b> | <b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>  |
| 16.01.     | Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur                                   |
| 16.02.     | Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi  |
| 16.03.     | Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal  |
| 16.04.     | Pengembangan System Informasi Penanaman Modal   |
| 16.05.     | Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah   |
| 16.06.     | Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal                               |
| 16.07.     | Kajian Kebijakan penanaman modal  |
| 16.08.     | Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal  |
| 16.09.     | Pembelian saham Perbankan   |
| 16.10.     | Penanaman Modal pada Perusahaan Daerah  |
| 16.11.     | Penanaman Modal pada BUMD   |
| 16.12.     | Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha                               |
| 16.13.     | Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan Non Usaha       |
| 16.14.     | Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dasar                               |
| 16.15.     | Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu                            |
| 16.16.     | Pelayanan Publik Yang Prima   |
| 16.17.     | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan  |
| <b>17.</b> | <b>Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>                                 |
| 17.01.     | Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi  |
| 17.02.     | Analisa Obyek Perizinan   |
| 17.03.     | Pendataan Obyek Perizinan   |
| 17.04.     | Pendataan perizinan dasar dan usaha   |

**Urusan : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN   |
|------------|--|
| 1          | 2  |
| <b>15.</b> | <b>Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</b>          |
| 15.01.     | Pendataan potensi kepemudaan   |
| 15.02.     | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda               |
| 15.03.     | Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan |
| 15.04.     | Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH  |
| 15.05.     | Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan                        |

|            |  |
|------------|--|
| 15.06.     | Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda               |
| 15.07.     | Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat                                       |
| 15.08.     | Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan   |
| 15.09.     | Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda  |
| 15.10.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>16.</b> | <b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>  |
| 16.01.     | Pembinaan Organisasi kepemudaan  |
| 16.02.     | Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan  |
| 16.03.     | Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan   |
| 16.04.     | Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda   |
| 16.05.     | Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda  |
| 16.06.     | Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda   |
| 16.07.     | Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan   |
| 16.08.     | Pameran prestasi hasil karya pemuda  |
| 16.09.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>17.</b> | <b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b>                     |
| 17.01.     | Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda  |
| 17.02.     | Pelatihan keterampilan bagi pemuda   |
| <b>18.</b> | <b>Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba</b>   |
| 18.01.     | Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda  |
| <b>19.</b> | <b>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga</b>   |
| 19.01.     | Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan  |
| 19.02.     | Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi   |
| 19.03.     | pengembangan perencanaan olahraga terpadu  |
| 19.04.     | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga  |
| 19.05.     | Pembinaan manajemen organisasi olahraga  |
| 19.06.     | Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga  |
| 19.07.     | Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga |
| 19.08.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>20.</b> | <b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>   |
| 20.01.     | Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga  |
| 20.02.     | Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah                                       |
| 20.03.     | Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat  |
| 20.04.     | Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah   |
| 20.05.     | Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi   |
| 20.06.     | Penyelenggaraan kompetisi olahraga   |
| 20.07.     | Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat   |
| 20.08.     | Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi                               |
| 20.09.     | Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga              |
| 20.10.     | Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat  |
| 20.11.     | Pengembangan olahraga rekreasi   |
| 20.12.     | Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga                    |
| 20.13.     | Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga            |
| 20.14.     | Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat   |

|            |   |
|------------|---|
| 20.15.     | Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah                                    |
| 20.16.     | Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga                           |
| 20.17.     | Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya                         |
| <b>21.</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>  |
| 21.01.     | Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga |
| 21.02.     | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga   |
| 21.03.     | Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga   |
| 21.05.     | Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga                                 |
| 21.06.     | Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga                                      |
| 21.07.     | Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga   |

**Urusan : 1.02.14. - STATISTIK**

| <b>KODE</b> | <b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>                                 |
|-------------|---|
| 1           | 2   |
| <b>15.</b>  | <b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b> |
| 15.01.      | Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah        |
| 15.02.      | Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah |
| 15.03.      | Penyusunan dan pengumpulan data PDRB                        |
| 15.04.      | Pengolahan, updating dan analisis data PDRB                 |

**Urusan : 1.02.15. - PERSANDIAN**

| <b>KODE</b> | <b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b> |
|-------------|-----------------------------|
| 1           | 2                           |
| <b>01.</b>  | <b>Program Persandian</b>   |
| 01.01.      | Pengelolaan Persandian      |

**Urusan : 1.02.16. - KEBUDAYAAN**

| <b>KODE</b> | <b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>  |
|-------------|--|
| 1           | 2  |
| <b>15.</b>  | <b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>   |
| 15.01.      | Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah   |
| 15.02.      | Penatagunaan naskah kuno nusantara   |
| 15.03.      | Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah   |
| 15.04.      | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya                                    |
| 15.05.      | Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya   |
| <b>16.</b>  | <b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>   |
| 16.01.      | Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya                                      |
| 16.02.      | Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno                                       |
| 16.03.      | Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah  |
| 16.04.      | Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah   |
| 16.05.      | Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air |

|        |  |
|--------|--|
| 16.06. | Pengembangan kebudayaan dan pariwisata   |
| 16.07. | Pengembangan nilai dan geografi sejarah  |
| 16.08. | Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka   |
| 16.09. | Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala  |
| 16.10. | Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya |
| 16.11. | Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah                                       |
| 16.12. | Pengelolaan karya cetak dan karya rekam  |
| 16.13. | Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala                                      |
| 17.    | <b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>  |
| 17.01. | Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah  |
| 17.02. | Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan  |
| 17.03. | Penyelenggaraan dialog kebudayaan  |
| 17.04. | Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah  |
| 17.05. | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah  |
| 17.06. | Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal                               |
| 17.07. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya              |
| 18.    | <b>Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>                              |
| 18.01. | Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta                             |
| 18.02. | Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah                                    |
| 18.03. | Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah  |
| 18.04. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| 19.    | <b>Program Pengembangan SDM Kebudayaan</b>   |
| 19.01. | Peningkatan Profesionalisme Tenaga Teknis Bidang Kebudayaan (Kesenian )                        |
| 19.02. | Peningkatan Profesionalisme Tenaga Teknis Bidang Kebudayaan ( BCB)                             |
| 20.    | <b>Program Pengembangan Pemasaran</b>  |
| 20.01. | Pengembangan Statistik Kepariwisata  |

Urusan : 1.02.17. - PERPUSTAKAAN

| KODE   | PROGRAM DAN KEGIATAN   |
|--------|--|
| 1      | 2  |
| 15.    | <b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>   |
| 15.01. | Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar                                     |
| 15.02. | Pengembangan minat dan budaya baca   |
| 15.03. | Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat |
| 15.04. | Pelaksanaan koordinasi pengembangan kepustakaan  |
| 15.05. | Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah  |
| 15.06. | Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca   |
| 15.07. | Perencanaan dan penyusunan program budaya baca   |
| 15.08. | Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca  |
| 15.09. | Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah  |
| 15.10. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |

Urusan : 1.02.18. - KEARSIPAN

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|------------|---|
| 1          | 2   |
| <b>15.</b> | <b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>                    |
| 15.01.     | Pembangunan data base informasi kearsipan                                 |
| 15.02.     | Pengumpulan data  |
| 15.03.     | Pengklasifikasikan data   |
| 15.04.     | Penyusunan sistem katalog data  |
| 15.05.     | Pengadaan sarana penyimpanan  |
| 15.06.     | Kajian sistem administrasi kearsipan                                      |
| 15.07.     | Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan                       |
| <b>16.</b> | <b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>          |
| 16.01.     | Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip                         |
| 16.02.     | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah                               |
| 16.03.     | Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika               |
| 16.04.     | Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data                              |
| <b>17.</b> | <b>Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan</b>  |
| 17.01.     | Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip        |
| 17.02.     | Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah                                   |
| 17.03.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data                   |
| <b>18.</b> | <b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>                   |
| 18.01.     | Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip                             |
| 18.02.     | Penyediaan sarana layanan informasi arsip                                 |
| 18.03.     | Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta |
| 18.04.     | Bimbingan teknis kearsipan  |

Urusan : 2.01.02. - PARIWISATA

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|------------|---|
| 1          | 2   |
| <b>15.</b> | <b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>                                    |
| 15.01.     | Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata                          |
| 15.02.     | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata              |
| 15.03.     | Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata                                 |
| 15.04.     | Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata                                       |
| 15.05.     | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri                |
| 15.06.     | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata       |
| 15.07.     | Pengembangan Statistik Objek dan Daya Tarik Wisata                                  |
| 15.08.     | Pelatihan pemandu wisata terpadu  |
| 15.09.     | Pengembangan Statistik Usaha Jasa Pariwisata  |
| 15.10.     | Forum komunikasi sector pendukung pariwisata dan peningkatan peran serta masyarakat |
| 15.11.     | Kajian dan fasilitasi pembentukan lembaga pariwisata                                |
| 15.12.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>16.</b> | <b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>                                    |

|        |   |
|--------|---|
| 16.01. | Pengembangan objek pariwisata unggulan  |
| 16.02. | Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata   |
| 16.03. | Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan  |
| 16.04. | Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha                        |
| 16.05. | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata               |
| 16.06. | Pengembangan daerah tujuan wisata   |
| 16.07. | Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi                               |
| 16.08. | Operasionalisasi dan pemeliharaan rutin/ berkala UPT Obyek Wisata                                     |
| 16.09. | Pengembangan wisata kuliner dan belanja   |
| 16.10. | Kajian infrastruktur destinasi dan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) |
| 16.11. | Koordinasi pembangunan daerah tujuan wisata dengan lembaga/ dunia usaha                               |
| 16.12. | Pembinaan desa wisata dan pokdarwis   |
| 16.13. | Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata                  |
| 16.14. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| 17.    | <b>Program Pengembangan Kemitraan</b>   |
| 17.01. | Pengembangan dan penguatan, informasi dan database  |
| 17.02. | Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata   |
| 17.03. | Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya               |
| 17.04. | Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya                   |
| 17.05. | Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata   |
| 17.06. | Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan                                     |
| 17.07. | Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata                                |
| 17.08. | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata                            |
| 17.09. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| 18.    | <b>Program Penataan Industri Pariwisata</b>   |
| 18.01. | Kajian kebijakan penyelenggaraan industri pariwisata  |
| 18.02. | Pembinaan, pengawasan, sosialisasi dan inventarisasi penyelenggaraan usaha pariwisata                 |
| 18.03. | Peningkatan dan pemberdayaan SDM pelaku usaha sarana dan jasa pariwisata                              |
| 18.04. | Pengembangan usaha sarana dan jasa pariwisata berbasis sertifikasi                                    |
| 18.05. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |

Urusan : 2.01.03. - PERTANIAN

| KODE   | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|--------|---|
| 1      | 2   |
| 15.    | <b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>                       |
| 15.01. | Pelatihan petani dan pelaku agribisnis                                |
| 15.02. | Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis              |
| 15.03. | Peningkatan kemampuan lembaga petani                                  |
| 15.04. | Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani |
| 15.05. | Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur    |
| 16.    | <b>Program Peningkatan Produksi Pangan</b>                            |
| 16.01. | Penanganan daerah rawan pangan  |
| 16.02. | Penyusunan data base potensi produk pangan                            |

|        |  |
|--------|--|
| 16.03. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian   |
| 16.04. | Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian  |
| 16.05. | Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija  |
| 16.06. | Pengembangan diversifikasi tanaman   |
| 16.07. | Pengembangan pertanian pada lahan kering   |
| 16.08. | Pengembangan perbenihan/perbibitan   |
| 16.09. | Pengembangan sistem informasi pasar  |
| 16.10. | Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan                              |
| 16.11. | Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian  |
| 16.12. | Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi   |
| 16.13. | Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya  |
| 16.14. | Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen  |
| 16.15. | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian                                 |
| 16.16. | Penyuluhan sumber pangan alternatif  |
| 16.17. | Pengembangan Intensifikasi tanaman hortikultura  |
| 16.18. | Pengembangan kawasan hortikultura  |
| 16.19. | Penanganan statistik tanaman pangan dan hortikultura   |
| 16.20. | Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura   |
| 16.21. | Pengelolaan lahan dan air tanaman pangan dan hortikultura  |
| 16.22. | Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida   |
| 16.23. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| 17.    | <b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>   |
| 17.01. | Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan  |
| 17.02. | Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer |
| 17.03. | Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan                   |
| 17.04. | Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan                          |
| 17.05. | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan    |
| 17.06. | Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan           |
| 17.07. | Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah   |
| 17.08. | Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon                    |
| 17.09. | Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan          |
| 17.10. | Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat                        |
| 17.11. | Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat                              |
| 17.12. | Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan                  |
| 17.13. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| 18.    | <b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>  |
| 18.01. | Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna  |
| 18.02. | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna   |
| 18.03. | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna                        |
| 18.04. | Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna  |
| 18.05. | Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna                                  |
| 18.06. | Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam   |

|            |  |
|------------|--|
| 18.07.     | Monitoring dan evaluasi dana Bergulir dari Pemkot dan Pusat  |
| <b>19.</b> | <b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>   |
| 19.01.     | Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan   |
| 19.02.     | Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan  |
| 19.03.     | Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan   |
| 19.04.     | Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan  |
| 19.05.     | Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian  |
| 19.06.     | Pengembangan diversifikasi tanaman tembakau  |
| 19.07.     | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan   |
| 19.08.     | Penanganan panen dan pasca panen bahan baku  |
| <b>20.</b> | <b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>                                     |
| 20.01.     | Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan   |
| 20.02.     | Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan   |
| 20.03.     | Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan  |
| <b>21.</b> | <b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>   |
| 21.01.     | Pendataan masalah peternakan   |
| 21.02.     | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak  |
| 21.03.     | Pengendalian / Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik                                      |
| 21.04.     | Pengawasan perdagangan ternak antar daerah   |
| 21.05.     | Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ternak  |
| 21.06.     | Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan Puskeswan  |
| 21.07.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>22.</b> | <b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>   |
| 22.01.     | Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak   |
| 22.02.     | Pembibitan dan perawatan ternak  |
| 22.03.     | Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat   |
| 22.04.     | Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat                             |
| 22.05.     | Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak  |
| 22.06.     | Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak  |
| 22.07.     | Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak  |
| 22.08.     | Pengembangan agribisnis peternakan   |
| 22.09.     | Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan  |
| 22.10.     | Operasionalisasi UPTD Perbibitan Ternak Unggul   |
| 22.11.     | Pembinaan dan pengamanan perbibitan ternak   |
| 22.12.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>23.</b> | <b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b>   |
| 23.01.     | Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan  |
| 23.02.     | Fasilitasi Kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer |
| 23.03.     | Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan                                       |
| 23.04.     | Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisipromosi atas hasil produksi peternakan                         |
| 23.05.     | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan                        |
| 23.06.     | Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebisipromosi atas hasil produksi peternakan          |
| 23.07.     | Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah   |
| 23.08.     | Penyuluhan pemasaran produksi peternakan   |



|            |   |
|------------|---|
| 23.09.     | Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat              |
| 23.10.     | Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat       |
| 23.11.     | Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat             |
| 23.12.     | Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan |
| 23.13.     | Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan  |
| 23.14.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>24.</b> | <b>Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</b>                             |
| 24.01.     | Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna                           |
| 24.02.     | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna                        |
| 24.03.     | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna       |
| 24.04.     | Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna                         |
| 24.05.     | Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna                 |
| 24.06.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>25.</b> | <b>Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>                             |
| 25.01.     | Pengamanan produk hewan dan ikutannya   |
| 25.02.     | Pengendalian, Penanggulangan Penyakit Zoonosa dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan     |
| 25.03.     | Operasionalisasi UPTD RPH / RPU   |
| 25.04.     | Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesmavet                                   |

Urusan : 2.01.04. - KEHUTANAN

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|------------|---|
| 1          | 2   |
| <b>15.</b> | <b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>                        |
| 15.01.     | Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi                             |
| 15.02.     | Pengembangan hutan tanaman  |
| 15.03.     | Pengembangan hasil hutan non-kayu   |
| 15.04.     | Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan                           |
| 15.05.     | Optimalisasi PNBP   |
| 15.06.     | Pengelolaan dan pemanfaatan hutan   |
| 15.07.     | Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan                             |
| 15.08.     | Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan               |
| 15.09.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>16.</b> | <b>Program rehabilitasi hutan dan lahan</b>                                 |
| 16.01.     | Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan                  |
| 16.02.     | Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan                                     |
| 16.03.     | Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata                |
| 16.04.     | Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata                        |
| 16.05.     | Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan |
| 16.06.     | Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan       |
| 16.07.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>17.</b> | <b>Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan</b>                        |
| 17.01.     | Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan                       |
| 17.02.     | Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan                 |

|            |  |
|------------|--|
| 17.03.     | Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan  |
| 17.04.     | Penanggulangan kebakaran baton dan lahan   |
| 17.05.     | Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan                                  |
| <b>18.</b> | <b>Program pemanfaatan kawasan baton industri</b>  |
| 18.01.     | Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah  |
| <b>19.</b> | <b>Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan</b>                                     |
| 19.01.     | Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan                            |
| 19.02.     | Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan                           |
| 19.03.     | Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan |
| 19.04.     | Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan  |
| 19.05.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>20.</b> | <b>Program perencanaan dan pengembangan baton</b>  |
| 20.01.     | Pengembangan hutan masyarakat adat   |
| 20.02.     | Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat  |

Urusan : 2.01.05. --

| KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN |
|------|----------------------|
| 1    | 2                    |
|      |                      |

Urusan : 2.01.06. - KELAUTAN DAN PERIKANAN

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN   |
|------------|--|
| 1          | 2  |
| <b>15.</b> | <b>Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</b>                                       |
| 15.01.     | Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir  |
| <b>16.</b> | <b>Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan</b> |
| 16.01.     | Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan                      |
| <b>17.</b> | <b>Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut</b> |
| 17.01.     | Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut   |
| <b>18.</b> | <b>Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut</b>               |
| 18.01.     | Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut                                   |
| <b>19.</b> | <b>Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat</b>    |
| 19.01.     | Penyuluhan budaya kelautan   |
| <b>20.</b> | <b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>   |
| 20.01.     | Pengembangan bibit ikan unggul   |
| 20.02.     | Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan   |
| 20.03.     | Pembinaan dan pengembangan perikanan   |
| 20.04.     | Operasionalisasi Balai Benih Ikan  |
| 20.05.     | Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya  |
| 20.06.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>21.</b> | <b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>  |

|            |  |
|------------|--|
| 21.01.     | Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap                       |
| 21.02.     | Pembangunan tempat pelelangan ikan   |
| 21.03.     | Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan                          |
| 21.04.     | Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan                           |
| 21.05.     | Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap                   |
| 21.06.     | Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap                        |
| 21.07.     | Pemberdayaan nelayan dan peningkatan pelestarian sumber daya ikan          |
| <b>22.</b> | <b>Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan</b>                    |
| 22.01.     | Kajian sistem penyuluhan perikanan   |
| 22.02.     | Pengembangan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perikanan                           |
| 22.03.     | Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan                     |
| <b>23.</b> | <b>Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>   |
| 23.01.     | Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan           |
| 23.02.     | Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan                  |
| 23.03.     | Penyusunan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi perikanan            |
| 23.04.     | Promosi atas hasil produksi perikanan                                      |
| 23.05.     | Operasionalisasi Pasar Ikan Heigenis                                       |
| 23.06.     | Peningkatan Sarana dan prasarana hasil Perikanan                           |
| <b>24.</b> | <b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b> |
| 24.01.     | Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar                      |

Urusan : 2.01.07. - PERDAGANGAN

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN   |
|------------|--|
| 1          | 2  |
| <b>15.</b> | <b>Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</b>            |
| 15.01.     | Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen |
| 15.02.     | Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen       |
| 15.03.     | Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa                           |
| 15.04.     | Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah                  |
| 15.05.     | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Pasar                                   |
| 15.06.     | Pengelolaan dan Penyediaan Sarana prasarana Pasar                          |
| 15.07.     | Peningkatan Pengawasan Barang Kena Cukai                                   |
| 15.08.     | Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai (DBHCHT)                                |
| 15.09.     | Fasilitasi dan Koordinasi DBHCHT   |
| 15.10.     | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan   |
| 15.11.     | Kegiatan pelaksanaan prasarana dan sarana                                  |
| 15.12.     | Kegiatan pengawasan kemetrolgian   |
| 15.13.     | kegiatan pelaksanaan tera-tera ulang kemetrolgian                          |
| 15.14.     | Kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kemetrolgian                      |
| 15.15.     | Kegiatan pengembangan Pasar Tertib Ukur                                    |
| <b>16.</b> | <b>Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional</b>             |
| 16.01.     | Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa                     |
| 16.02.     | Penyebarluasan informasi database kuota setiap jenis barang dan jasa       |

|            |  |
|------------|--|
| 16.03.     | Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional                        |
| 16.04.     | Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang  |
| 16.05.     | Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional                                 |
| <b>17.</b> | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>                                       |
| 17.01.     | Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri                              |
| 17.02.     | Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri                             |
| 17.03.     | Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor               |
| 17.04.     | Pengembangan data base informasi potensi unggulan  |
| 17.05.     | Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional |
| 17.06.     | Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk                  |
| 17.07.     | Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri                  |
| 17.08.     | Membangun jejaring dengan eksportir  |
| 17.09.     | Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait                           |
| 17.10.     | Pengembangan kluster produk ekspor   |
| 17.11.     | Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor                           |
| 17.12.     | Pembangunan promosi perdagangan internasional  |
| <b>18.</b> | <b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri</b>                             |
| 18.01.     | Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional                 |
| 18.02.     | Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha  |
| 18.03.     | Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk  |
| 18.04.     | Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan   |
| 18.05.     | Pengembangan pasar lelang daerah   |
| 18.06.     | Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan                                    |
| 18.07.     | Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri                                   |
| 18.08.     | Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional   |
| 18.09.     | Pengembangan Sarana Dan Prasarana Distribusi   |
| <b>19.</b> | <b>Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan</b>                                  |
| 19.01.     | Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan                              |
| 19.02.     | Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan                   |
| 19.03.     | Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan                     |
| 19.04.     | Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan                       |
| 19.05.     | Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan                          |
| 19.06.     | Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan asongan             |

Urusan : 2.01.08. - PERINDUSTRIAN

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|------------|---|
| 1          | 2   |
| <b>15.</b> | <b>Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b>                      |
| 15.01.     | Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi                       |
| 15.02.     | Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator                              |
| 15.03.     | Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi                             |
| 15.04.     | Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas |
| 15.05.     | Pengembangan sistem inovasi teknologi industri                                  |

|            |  |
|------------|--|
| 15.06.     | Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi  |
| <b>16.</b> | <b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>  |
| 16.01.     | Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya   |
| 16.02.     | Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri   |
| 16.03.     | Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah                                   |
| 16.04.     | Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah   |
| 16.05.     | Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah   |
| 16.06.     | Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta  |
| 16.07.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>17.</b> | <b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>  |
| 17.01.     | Pembinaan kemampuan teknologi industri   |
| 17.02.     | Pengembangan dan pelayanan teknologi industri  |
| 17.03.     | Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur   |
| 17.04.     | Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur   |
| <b>18.</b> | <b>Program Penataan Struktur Industri</b>  |
| 18.01.     | Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir  |
| 18.02.     | Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri  |
| 18.03.     | Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir   |
| <b>19.</b> | <b>Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>   |
| 19.01.     | Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial  |
| 19.02.     | Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat  |
| <b>20.</b> | <b>Program Pembinaan Industri Tembakau (DBHCHT)</b>  |
| 20.01.     | Pendataan mesin/ peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/ peralatan mesin memberi tanda khusus) (DBHCHT) |
| 20.02.     | Penerapan Ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) (DBHCHT)  |
| 20.03.     | Kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku (DBHCHT)                                   |
| 20.04.     | Penguatan kelembagaan asosiasi menengah industri hasil tembakau (DBHCHT)   |
| 20.05.     | Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui Good Manufacturing (GMP) (DBHCHT)         |

**Urusan : 2.01.09. - TRANSMIGRASI**

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|------------|---|
| 1          | 2   |
| <b>15.</b> | <b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>  |
| 15.01.     | Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan                 |
| 15.02.     | Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi |
| 15.03.     | Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi                        |
| 15.04.     | Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan Transmigrasi                              |
| 15.05.     | Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM                  |
| <b>16.</b> | <b>Program Transmigrasi Lokal</b>   |
| 16.01.     | Penyuluhan Transmigrasi Lokal   |
| 16.02.     | Pelatihan transmigrasi lokal  |

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 17.    | <b>Program Transmigrasi Regional</b> |
| 17.01. | Penyuluhan transmigrasi regional     |
| 17.02. | Pelatihan transmigrasi regional      |

**Urusan : 3.01.01. - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN   |
|------------|--|
| 1          | 2  |
| <b>01.</b> | <b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>                         |
| 01.01.     | Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan                      |
| 01.02.     | Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) dan Pameran Produk Inovasi |
| 01.03.     | Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan                   |
| 01.04.     | Fasilitasi Kajian dan Riset Daerah                                 |

**Urusan : 3.01.02. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|------------|---|
| 1          | 2   |
| <b>15.</b> | <b>Program Pengembangan Data/ Informasi</b>   |
| 15.01.     | Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan |
| 15.02.     | Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan            |
| 15.03.     | Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana          |
| 15.04.     | Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi                        |
| 15.05.     | Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)  |
| 15.06.     | -   |
| 15.07.     | Penyusunan data base kemiskinan   |
| <b>16.</b> | <b>Program Kerjasama Pembangunan</b>  |
| 16.01.     | Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan   |
| 16.02.     | Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah   |
| 16.03.     | Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga   |
| 16.04.     | Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah   |
| 16.05.     | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan   |
| 16.06.     | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah                                |
| <b>17.</b> | <b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>  |
| 17.01.     | Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah                                       |
| 17.02.     | Sosialisai kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara                    |
| 17.03.     | Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan  |
| 17.04.     | Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan  |
| 17.05.     | Fasilitasi bantuan prasarana dan sarana desa  |
| 17.06.     | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  |
| <b>18.</b> | <b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>                    |
| 18.01.     | Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh        |
| 18.02.     | Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh                  |
| 18.03.     | Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh                        |
| 18.04.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |

|            |  |
|------------|--|
| 18.05.     | Fasilitasi Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan                                    |
| <b>19.</b> | <b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar</b>                     |
| 19.01.     | Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan                         |
| 19.02.     | Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan                              |
| 19.03.     | Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial                           |
| 19.04.     | Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi                        |
| 19.05.     | Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri                                   |
| 19.06.     | Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan                                 |
| 19.07.     | Koordinasi perencanaan penanganan perumahan  |
| 19.08.     | Koordinasi perencanaan penanganan perpikiran   |
| 19.09.     | Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan                        |
| 19.10.     | Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan                     |
| 19.11.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| <b>20.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>          |
| 20.01.     | Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana  |
| 20.02.     | Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah                                     |
| 20.03.     | Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah                                  |
| <b>21.</b> | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  |
| 21.01.     | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik |
| 21.02.     | Penyusunan Rancangan dan Penetapan RPJPD   |
| 21.03.     | Penyusunan Rancangan dan Penetapan RPJMD   |
| 21.04.     | Penyusunan RKPD  |
| 21.05.     | Koordinasi Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah                                  |
| 21.06.     | Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban                              |
| 21.07.     | Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah                                      |
| 21.08.     | Penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah   |
| 21.09.     | Pengumpulan data penyusunan kajian lingkungan hidup strategis                            |
| 21.11.     | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah                |
| 21.12.     | Evaluasi dokumen perencanaan   |
| 21.13.     | Penyusunan Raperda Penanggulangan Kemiskinan   |
| <b>22.</b> | <b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>   |
| 22.01.     | Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah   |
| 22.02.     | Penyusunan indikator ekonomi daerah  |
| 22.03.     | Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat                                   |
| 22.04.     | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi  |
| 22.05.     | Penyusunan tabel input output daerah   |
| 22.06.     | Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan  |
| 22.07.     | Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan                                    |
| 22.08.     | Penyusunan Masterplan Pembangunan Kepariwisata   |
| 22.09.     | Penyusunan Masterplan Pembangunan Perindustrian  |
| 22.10.     | Penyusunan Mastarplan Pembangunan Pertanian  |
| 22.11.     | Koordinasi penanggulangan kemiskinan   |
| 22.12.     | Penyusunan kajian dan perencanaan pengembangan perusahaan daerah                         |
| 22.13.     | Penyusunan kajian dan perencanaan pengembangan teknologi tepat guna                      |

|            |  |
|------------|--|
| 22.14.     | Penyusunan masterplan minapolitan  |
| 22.15.     | Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah   |
| <b>23.</b> | <b>Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya</b>                                    |
| 23.01.     | Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan  |
| 23.02.     | Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan   |
| 23.03.     | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya                            |
| 23.04.     | Fasilitasi pengembangan desa inovatif  |
| 23.05.     | Penyusunan RAD pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak                            |
| 23.06.     | Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS)  |
| 23.07.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| 23.08.     | Penyusunan pola tata desa  |
| 23.09.     | Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs) |
| 23.10.     | Penanggulangan Masalah Gizi  |
| <b>24.</b> | <b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>                      |
| 24.01.     | Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah                          |
| 24.02.     | Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup    |
| 24.03.     | Perencanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)                               |
| 24.04.     | Kajian daya dukung sarana prasarana kota terhadap kawasan tertentu                     |
| 24.05.     | Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Pemukiman Prioritas (RPKPP)                     |
| 24.06.     | Penyusunan Rencana Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum                                |
| 24.07.     | Penyusunan Masterplan Sistem Air Limbah Skala Kabupaten                                |
| 24.08.     | Penyusunan Masterplan Sistem Drainase  |
| 24.09.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |
| 24.10.     | Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah                         |
| <b>25.</b> | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana</b>                            |
| 25.01.     | Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana                                     |
| 25.02.     | Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana  |
| 25.03.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan   |

**Urusan : 3.01.03. - KEUANGAN**

| <b>KODE</b> | <b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>   |
|-------------|---|
| <b>1</b>    | <b>2</b>  |
| <b>17.</b>  | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>           |
| 17.01.      | Penyusunan analisa standar belanja  |
| 17.02.      | Penyusunan standar satuan harga   |
| 17.03.      | Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah                                  |
| 17.04.      | Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah                        |
| 17.05.      | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi          |
| 17.06.      | Penyusunan Rancangan APBD   |
| 17.07.      | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD                        |
| 17.08.      | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD                      |
| 17.09.      | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD              |
| 17.10.      | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD |



|            |   |
|------------|---|
| 17.11.     | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD     |
| 17.12.     | Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah   |
| 17.13.     | Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah                                       |
| 17.14.     | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah                                |
| 17.15.     | Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah              |
| 17.16.     | Peningkatan manajemen aset/ barang daerah   |
| 17.17.     | Peningkatan manajemen investasi daerah  |
| 17.18.     | Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah  |
| 17.19.     | Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah                              |
| 17.20.     | Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD  |
| 17.21.     | Penyelesaian Administrasi Kerugian Daerah (TPTGR)   |
| 17.22.     | Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD   |
| 17.23.     | Penyusunan Rencana Peraturan KDH tentang pajak daerah dan Retribusi daerah                    |
| 17.24.     | Pembinaan tehnik administrasi pembangunan   |
| 17.25.     | Pengelolaan Kas Daerah  |
| 17.26.     | Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD   |
| 17.27.     | Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS   |
| 17.28.     | Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah I   |
| 17.29.     | Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah II  |
| 17.30.     | Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah III   |
| 17.31.     | Penanganan PBB dan BPHTB di Wilayah IV  |
| 17.32.     | Monitoring dan Evaluasi BUMD  |
| 17.33.     | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  |
| 17.34.     | Perencanaan anggaran belanja daerah   |
| <b>18.</b> | <b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota</b>                  |
| 18.01.     | Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota                              |
| 18.02.     | Evaluasi Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/ kota                      |
| 18.03.     | Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota |
| 18.04.     | Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota           |
| 18.05.     | Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota                     |
| <b>29.</b> | <b>Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah</b>                                     |
| 29.01.     | Pendaftaran, Pendataan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dan Obyek Pajak                            |
| 29.02.     | Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD                              |
| 29.03.     | Penagihan Pajak Daerah dan Keberatan  |
| 29.04.     | Penanganan Pelanggaran Pajak Daerah   |
| 29.05.     | Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah, Koordinasi Pendapatan pajak dan Retribusi Daerah    |
| 29.06.     | Koordinasi Penyusunan Analisa Perencanaan Daerah (Retribusi)                                  |
| 29.07.     | Evaluasi Pendapatan Daerah  |

Urusan : 3.01.04. - KEPEGAWAIAN

| KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN                       |
|------|--|
| 1    | 2  |
| 36.  | Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian) |

|            |   |
|------------|---|
| 36.01.     | Pendidikan dan pelatihan teknis   |
| 36.02.     | Pendidikan penjenjangan struktural  |
| 36.03.     | Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan  |
| 36.04.     | Pembuatan buku juknis/juklak  |
| 36.05.     | Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan   |
| 36.06.     | Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme   |
| <b>37.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian)</b>   |
| 37.01.     | Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah   |
| 37.02.     | Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah   |
| 37.03.     | Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah  |
| 37.04.     | Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah   |
| 37.05.     | Penyelenggaraan Bintek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional  |
| <b>38.</b> | <b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian)</b>  |
| 38.01.     | Pembinaan Karier PNS  |
| 38.02.     | Seleksi Penerimaan Calon PNS  |
| 38.03.     | Penempatan PNS  |
| 38.04.     | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS   |
| 38.05.     | Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah  |
| 38.06.     | Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS   |
| 38.07.     | Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar   |
| 38.08.     | Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi   |
| 38.09.     | Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS  |
| 38.10.     | Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS  |
| 38.11.     | Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas  |
| 38.12.     | Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN   |
| 38.13.     | Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan  |
| 38.14.     | Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) |
| 38.15.     | Koordinasi Penyelenggaraan diklat   |
| 38.16.     | Penyelenggaraan sumpah janji PNS  |
| 38.17.     | Kajian Kinerja Pegawai Negri Sipil  |
| 38.18.     | Pembinaan Kedisiplinan PNS  |
| 38.19.     | Penyusunan Formasi PNS Daerah   |
| 38.20.     | Manajemen Pengelolaan Data Pegawai  |
| 38.21.     | Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas   |
| 38.22.     | Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja   |
| 38.23.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |

**Urusan : 4.01.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

| KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN |
|------|----------------------|
| 1    | 2                    |
|      |                      |

Urusan : 4.01.02. - KDH/WKDH

| KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN |
|------|----------------------|
| 1    | 2                    |
|      |                      |

Urusan : 4.01.03. - UNSUR STAF

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN   |
|------------|--|
| 1          | 2  |
| <b>16.</b> | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah</b>  |
| 16.01.     | Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat   |
| 16.02.     | Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri  |
| 16.03.     | Rapat koordinasi unsur MUSPIDA   |
| 16.04.     | Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah   |
| 16.05.     | Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah   |
| 16.06.     | Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya   |
| 16.07.     | Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  |
| 16.08.     | Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten  |
| 16.09.     | Dialog Audiensi dengan Tenaga Kebersihan se-Kabupaten Semarang   |
| 16.10.     | Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK)   |
| 16.11.     | Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda)  |
| 16.12.     | Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik terpadu  |
| 16.13.     | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  |
| 16.14.     | Penyusunan Pedoman dan Kajian Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pelimpahannya   |
| <b>26.</b> | <b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>   |
| 26.01.     | Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan   |
| 26.02.     | Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan  |
| 26.03.     | Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan   |
| 26.04.     | Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan  |
| 26.05.     | Publikasi peraturan perundang-undangan   |
| 26.06.     | Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah |
| 26.07.     | Fasilitasi Pembentukan Kelompok KADARKUM Tingkat Kabupaten Semarang  |
| 26.08.     | Koordinasi, konsultasi, dan advokasi hukum   |
| <b>30.</b> | <b>Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah</b>   |
| 30.01.     | Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan   |
| 30.02.     | Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah  |
| 30.03.     | Penyusunan Pedoman Pendayagunaan Aparatur Daerah   |
| 30.04.     | Penyediaan Informasi Kelembagaan   |
| 30.05.     | Penyusunan informasi ketatalaksanaan   |
| 30.06.     | Penyusunan informasi pendayagunaan aparatur daerah   |
| 30.07.     | Penyusunan standar pelayanan publik  |
| 30.08.     | Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik  |

|            |   |
|------------|---|
| 30.09.     | Koordinasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan                   |
| 30.10.     | Koordinasi, monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan               |
| 30.11.     | Koordinasi, monitoring dan evaluasi pendayagunaan aparatur daerah |
| 30.12.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                |
| <b>32.</b> | <b>Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan</b>                  |
| 32.01.     | Penanganan Kasus Peradilan  |

**Urusan : 4.01.04. - UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD**

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|------------|---|
| 1          | 2   |
| <b>15.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>                             |
| 15.01.     | Pembahasan rancangan peraturan daerah   |
| 15.02.     | Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama |
| 15.03.     | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan  |
| 15.04.     | Rapat-rapat paripurna   |
| 15.05.     | Kegiatan Reses  |
| 15.06.     | Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah  |
| 15.07.     | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD   |
| 15.08.     | Sosialisasi peraturan perundang-undangan  |
| 15.09.     | Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD                          |
| 15.10.     | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah  |

**Urusan : 4.01.05. - PENGAWASAN**

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN   |
|------------|--|
| 1          | 2  |
| <b>20.</b> | <b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b> |
| 20.01.     | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala   |
| 20.02.     | Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah                                       |
| 20.03.     | Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH   |
| 20.04.     | Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya  |
| 20.05.     | Inventarisasi temuan pengawasan  |
| 20.06.     | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan  |
| 20.07.     | Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif  |
| 20.08.     | Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan   |
| 20.09.     | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja                        |
| 20.10.     | Review Dokumen Rencana Pembangunan, Anggaran, Laporan Keuangan Daerah                            |
| 20.11.     | Pengawasan dan pemberantasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan                    |
| <b>21.</b> | <b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>              |
| 21.01.     | Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan                                  |
| 21.02.     | Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja                                  |
| <b>22.</b> | <b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>               |
| 22.01.     | Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan                              |

|            |  |
|------------|--|
| 22.02.     | Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan            |
| <b>24.</b> | <b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b> |
| 24.01.     | Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat        |
| 24.02.     | Penatausahaan Penanganan Pengaduan Masyarakat                  |

Urusan : 5.01.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN  |
|------------|---|
| 1          | 2   |
| <b>17.</b> | <b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>  |
| 17.01.     | Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama  |
| 17.02.     | Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat  |
| 17.03.     | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa   |
| 17.04.     | Fasilitasi kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya daerah  |
| 17.05.     | Pembentukan Forum Pembauran Bangsa Indonesia (FPBI)   |
| 17.06.     | Seminar, sosialisasi, diskusi, pembauran Bangsa Indonesia   |
| <b>18.</b> | <b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>  |
| 18.01.     | Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan |
| 18.02.     | Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan  |
| 18.03.     | Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan                      |
| <b>21.</b> | <b>Program pendidikan politik masyarakat</b>  |
| 21.01.     | Penyuluhan kepada masyarakat  |
| 21.02.     | Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik   |
| 21.03.     | Koordinasi forum-forum diskusi politik  |
| 21.04.     | Penyusunan data base partai politik   |
| 21.05.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |
| <b>23.</b> | <b>Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan</b>  |
| 23.01.     | Pendataan dan verifikasi organisasi kemasyarakatan  |
| 23.02.     | Penyuluhan organisasi kemasyarakatan  |
| 23.03.     | Monitoring, evaluasi dan pelaporan  |

Urusan : 6.01.01. - KECAMATAN

| KODE       | PROGRAM DAN KEGIATAN   |
|------------|--|
| 1          | 2  |
| <b>25.</b> | <b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>                               |
| 25.01.     | Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan                   |
| 25.02.     | Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi                |
| 25.03.     | Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum                              |
| 25.04.     | Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik |
| <b>27.</b> | <b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>  |
| 27.01.     | Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah                  |
| 27.02.     | Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran                 |
| 27.03.     | Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah           |

|            |  |
|------------|--|
| 27.04.     | Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru                               |
| <b>28.</b> | <b>Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat</b>             |
| 28.01.     | Kegiatan Bidang Pemerintahan   |
| 28.02.     | Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                       |
| 28.03.     | Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan                                  |
| 28.04.     | Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum                              |
| 28.05.     | Kegiatan Bidang Pelayanan Umum   |
| <b>40.</b> | <b>Program Pelayanan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>      |
| 40.01.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gondoriyo  |
| 40.02.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngampin    |
| 40.03.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Pojoksari  |
| 40.04.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Tambakboyo |
| 40.05.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Lodoyong   |
| 40.06.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kupang     |
| 40.07.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kranggan   |
| 40.08.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Panjang    |
| 40.09.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Baran      |
| 40.10.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bandungan  |
| 40.11.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bawen      |
| 40.12.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Harjosari  |
| 40.13.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ngempon    |
| 40.14.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Karangjati |
| 40.15.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Wujil      |
| 40.16.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bergas Lor |
| 40.17.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Pringapus  |
| 40.18.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Candirejo  |
| 40.19.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Genuk      |
| 40.20.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Ungaran    |
| 40.21.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Bandarjo   |
| 40.22.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Langensari |
| 40.23.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Sidomulyo  |
| 40.24.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kalirejo   |
| 40.25.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Susukan    |
| 40.26.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Gedanganak |
| 40.27.     | Kegiatan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Beji       |
| <b>41.</b> | <b>Program Pelayanan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat</b>                          |
| 41.01.     | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Gondoriyo                      |
| 41.02.     | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ngampin                        |
| 41.03.     | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pojoksari                      |
| 41.04.     | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Tambakboyo                     |
| 41.05.     | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Lodoyong                       |
| 41.06.     | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kupang                         |
| 41.07.     | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kranggan                       |
| 41.08.     | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Panjang                        |

|        |  |
|--------|--|
| 41.09. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Baran      |
| 41.10. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bandungan  |
| 41.11. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bawen      |
| 41.12. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Harjosari  |
| 41.13. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ngempon    |
| 41.14. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Karangjati |
| 41.15. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Wujil      |
| 41.16. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bergas Lor |
| 41.17. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pringapus  |
| 41.18. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Candirejo  |
| 41.19. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Genuk      |
| 41.20. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ungaran    |
| 41.21. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bandarjo   |
| 41.22. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Langensari |
| 41.23. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Sidomulyo  |
| 41.24. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kalirejo   |
| 41.25. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Susukan    |
| 41.26. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Gedanganak |
| 41.27. | Kegiatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Beji       |

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

**KODE REKENING BELANJA DAERAH**

| Kode Rekening    | Uraian                                       |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| <b>5.</b>        | <b>BELANJA DAERAH</b>                        |
| <b>5.1.</b>      | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                |
| <b>5.1.1.</b>    | <b>Belanja Pegawai</b>                       |
| <b>5.1.1.01.</b> | <b>Gaji dan Tunjangan</b>                    |
| 5.1.1.01.01.     | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi             |
| 5.1.1.01.02.     | Tunjangan Keluarga                           |
| 5.1.1.01.03.     | Tunjangan Jabatan                            |
| 5.1.1.01.04.     | Tunjangan Fungsional                         |
| 5.1.1.01.05.     | Tunjangan Fungsional Umum                    |
| 5.1.1.01.06.     | Tunjangan Beras 1)                           |
| 5.1.1.01.07.     | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus               |
| 5.1.1.01.08.     | Pembulatan Gaji                              |
| 5.1.1.01.09.     | Iuran BPJS Kesehatan                         |
| 5.1.1.01.10.     | Uang Paket 1)                                |
| 5.1.1.01.11.     | Tunjangan Badan Musyawarah 2)                |
| 5.1.1.01.12.     | Tunjangan Komisi 2)                          |
| 5.1.1.01.13.     | Tunjangan Badan Anggaran 2)                  |
| 5.1.1.01.14.     | Tunjangan Badan Kehormatan 2)                |
| 5.1.1.01.15.     | Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)        |
| 5.1.1.01.16.     | Tunjangan Perumahan 2)                       |
| 5.1.1.01.17.     | BPJS Ketenagakerjaan                         |
| 5.1.1.01.18.     | Uang Jasa Pengabdian 2)                      |
| 5.1.1.01.19.     | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD  |
| 5.1.1.01.20.     | Tunjangan Profesi/ Sertifikasi Guru PNSD     |
| 5.1.1.01.21.     | Tunjangan Pengamanan Persandian              |
| 5.1.1.01.22.     | Tunjangan Bahaya Radiasi                     |
| 5.1.1.01.23.     | Tunjangan Kesehatan DPRD                     |
| 5.1.1.01.24.     | Tambahan Penghasilan Guru PNSD               |
| 5.1.1.01.25.     | Tunjangan Khusus Guru                        |
| 5.1.1.01.26.     | Tunjangan Reses                              |
| 5.1.1.01.27.     | Tunjangan Transportasi                       |
| <b>5.1.1.02.</b> | <b>Tambahan Penghasilan PNS</b>              |
| 5.1.1.02.01.     | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja |



| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 5.1.1.02.02.     | Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas                           |
| 5.1.1.02.03.     | Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi/resiko kerja                      |
| 5.1.1.02.04.     | Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi                        |
| 5.1.1.02.05.     | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja                            |
| 5.1.1.02.06.     | Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya             |
| <b>5.1.1.03.</b> | <b>Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH</b> |
| 5.1.1.03.01.     | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD            |
| 5.1.1.03.02.     | Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH                                       |
| <b>5.1.1.04.</b> | <b>Biaya Pemungutan Pajak</b>  |
| 5.1.1.04.01.     | Biaya pemungutan PBB   |
| <b>5.1.1.05.</b> | <b>Belanja Insentif Pemungutan Pajak</b>                                   |
| 5.1.1.05.01.     | Belanja Insentif pemungutan Pajak Daerah                                   |
| <b>5.1.1.06.</b> | <b>Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>                        |
| 5.1.1.06.01.     | Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah                               |
| <b>5.1.2.</b>    | <b>Belanja Bunga</b>   |
| <b>5.1.2.01.</b> | <b>Bunga Utang Pinjaman</b>  |
| 5.1.2.01.01.     | Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah                                     |
| 5.1.2.01.02.     | Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya                      |
| 5.1.2.01.03.     | Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank                          |
| 5.1.2.01.04.     | Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank                    |
| 5.1.2.01.05.     | Bunga Utang Pinjaman kepada lembaga perbankan (BLUD)                       |
| <b>5.1.2.02.</b> | <b>Bunga Utang Obligasi</b>  |
| 5.1.2.02.01.     | Bunga Utang Obligasi   |
| <b>5.1.3.</b>    | <b>Belanja Subsidi</b>   |
| <b>5.1.3.01.</b> | <b>Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga</b>                           |
| 5.1.3.01.01.     | Belanja Subsidi kepada Perusahaan....                                      |
| 5.1.3.01.02.     | Belanja Subsidi kepada Lembaga...  |
| <b>5.1.4.</b>    | <b>Belanja Hibah</b>   |
| <b>5.1.4.01.</b> | <b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>                               |
| 5.1.4.01.01.     | Pemerintah Pusat   |
| <b>5.1.4.02.</b> | <b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya3)</b>                    |
| 5.1.4.02.01.     | Pemerintah Provinsi..  |
| 5.1.4.02.02.     | Pemerintah Kabupaten..   |
| <b>5.1.4.03.</b> | <b>Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa</b>                              |
| 5.1.4.03.01.     | Pemerintahan Desa...   |
| <b>5.1.4.04.</b> | <b>Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 4)</b>                 |
| 5.1.4.04.01.     | Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN....  |

| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| <b>5.1.4.05.</b> | <b>Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga</b>                                       |
| 5.1.4.05.01.     | Belanja Hibah untuk Badan/ Lembaga   |
| <b>5.1.4.06.</b> | <b>Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan</b>                            |
| 5.1.4.06.01.     | Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan                                   |
| <b>5.1.4.07.</b> | <b>Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan</b>                                    |
| 5.1.4.07.01.     | Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan (DAK Bidang Pendidikan)                   |
| 5.1.4.07.02.     | Belanja Hibah untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta                             |
| <b>5.1.4.08.</b> | <b>Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal</b>                                    |
| 5.1.4.08.01.     | Belanja Hibah Kepada KPUD Kabupaten Semarang                                     |
| 5.1.4.08.02.     | Belanja Hibah Kepada Panwaslu Kabupaten Semarang                                 |
| 5.1.4.08.03.     | Belanja Hibah Kepada Kodim   |
| 5.1.4.08.04.     | Belanja Hibah Kepada Polres  |
| <b>5.1.4.09.</b> | <b>Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar Swasta</b>                   |
| 5.1.4.09.01.     | Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta  |
| 5.1.4.09.02.     | Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta   |
| <b>5.1.4.10.</b> | <b>BOP PAUD Masyarakat/ Swasta</b>   |
| 5.1.4.10.01.     | BOP PAUD Masyarakat/ Swasta...   |
| <b>5.1.4.11.</b> | <b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>                      |
| 5.1.4.11.01.     | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                             |
| <b>5.1.5.</b>    | <b>Belanja Bantuan Sosial</b>  |
| <b>5.1.5.01.</b> | <b>Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>            |
| 5.1.5.01.01.     | Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan                   |
| <b>5.1.5.02.</b> | <b>Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat</b>                         |
| 5.1.5.02.01.     | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat                                |
| <b>5.1.5.03.</b> | <b>Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat</b>                          |
| 5.1.5.03.01.     | Belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat                                 |
| <b>5.1.6.</b>    | <b>Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>   |
| <b>5.1.6.01.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi</b>                           |
| 5.1.6.01.01.     | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ...                              |
| <b>5.1.6.02.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota</b>                     |
| 5.1.6.02.01.     | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ...                        |
| <b>5.1.6.03.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa</b>                  |
| 5.1.6.03.01.     | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...                     |
| <b>5.1.6.04.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota/ Badan/ Lembaga</b> |
| 5.1.6.04.01.     | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota ....                   |
| 5.1.6.04.02.     | Bagi hasil Retribusi Daerah kepada BP3   |
| 5.1.6.04.03.     | Bagi hasil Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                           |
| <b>5.1.6.05.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa</b>              |
| 5.1.6.05.01.     | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa ....                |

| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| <b>5.1.6.06.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Getasan</b>  |
| 5.1.6.06.01.     | Desa Nogosaren   |
| 5.1.6.06.02.     | Desa Tolokan   |
| 5.1.6.06.03.     | Desa Sumogawe  |
| 5.1.6.06.04.     | Desa Ngrawan   |
| 5.1.6.06.05.     | Desa Manggihan   |
| 5.1.6.06.06.     | Desa Samirono  |
| 5.1.6.06.07.     | Desa Tajuk   |
| 5.1.6.06.08.     | Desa Getasan   |
| 5.1.6.06.09.     | Desa Batur   |
| 5.1.6.06.10.     | Desa Kopeng  |
| 5.1.6.06.11.     | Desa Jetak   |
| 5.1.6.06.12.     | Desa Polobogo  |
| 5.1.6.06.13.     | Desa Wates   |
| <b>5.1.6.07.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Tengaran</b> |
| 5.1.6.07.01.     | Desa Barukan   |
| 5.1.6.07.02.     | Desa Tegalwaton  |
| 5.1.6.07.03.     | Desa Butuh   |
| 5.1.6.07.04.     | Desa Klero   |
| 5.1.6.07.05.     | Desa Bener   |
| 5.1.6.07.06.     | Desa Sruwen  |
| 5.1.6.07.07.     | Desa Tegalrejo   |
| 5.1.6.07.08.     | Desa Cukil   |
| 5.1.6.07.09.     | Desa Tengaran  |
| 5.1.6.07.10.     | Desa Regunung  |
| 5.1.6.07.11.     | Desa Sugihan   |
| 5.1.6.07.12.     | Desa Patemon   |
| 5.1.6.07.13.     | Desa Duren   |
| 5.1.6.07.14.     | Desa Karangduren   |
| 5.1.6.07.15.     | Desa Nyamat  |
| <b>5.1.6.08.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Susukan</b>  |
| 5.1.6.08.01.     | Desa Muncar  |
| 5.1.6.08.02.     | Desa Sidoharjo   |
| 5.1.6.08.03.     | Desa Tawang  |
| 5.1.6.08.04.     | Desa Badran  |
| 5.1.6.08.05.     | Desa Ngasinan  |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.1.6.08.06.     | Desa Koripan  |
| 5.1.6.08.07.     | Desa Timpik   |
| 5.1.6.08.08.     | Desa Ketapang   |
| 5.1.6.08.09.     | Desa Kemetul  |
| 5.1.6.08.10.     | Desa Kenteng  |
| 5.1.6.08.11.     | Desa Susukan  |
| 5.1.6.08.12.     | Desa Gentan   |
| 5.1.6.08.13.     | Desa Bakalrejo  |
| <b>5.1.6.09.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Suruh</b>   |
| 5.1.6.09.01.     | Desa Purworejo  |
| 5.1.6.09.02.     | Desa Sukorejo   |
| 5.1.6.09.03.     | Desa Suruh  |
| 5.1.6.09.04.     | Desa Kebowan  |
| 5.1.6.09.05.     | Desa Cukilan  |
| 5.1.6.09.06.     | Desa Gunungtumpeng  |
| 5.1.6.09.07.     | Desa Medayu   |
| 5.1.6.09.08.     | Desa Reksosari  |
| 5.1.6.09.09.     | Desa Bonomerto  |
| 5.1.6.09.10.     | Desa Dersansari   |
| 5.1.6.09.11.     | Desa Kedungringin   |
| 5.1.6.09.12.     | Desa Krandon Lor  |
| 5.1.6.09.13.     | Desa Plumbon  |
| 5.1.6.09.14.     | Desa Dadapayam  |
| 5.1.6.09.15.     | Desa Ketanggi   |
| 5.1.6.09.16.     | Desa Bejilor  |
| 5.1.6.09.17.     | Desa Jatirejo   |
| <b>5.1.6.10.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pabelan</b> |
| 5.1.6.10.01.     | Desa Pabelan  |
| 5.1.6.10.02.     | Desa Tukang   |
| 5.1.6.10.03.     | Desa Giling   |
| 5.1.6.10.04.     | Desa Terban   |
| 5.1.6.10.05.     | Desa Sukoharjo  |
| 5.1.6.10.06.     | Desa Karanggondang  |
| 5.1.6.10.07.     | Desa Kauman Lor   |
| 5.1.6.10.08.     | Desa Bejaten  |
| 5.1.6.10.09.     | Desa Glawan   |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.1.6.10.10.     | Desa Kadirejo   |
| 5.1.6.10.11.     | Desa Padaan   |
| 5.1.6.10.12.     | Desa Bendungan  |
| 5.1.6.10.13.     | Desa Segiri   |
| 5.1.6.10.14.     | Desa Sumberejo  |
| 5.1.6.10.15.     | Desa Ujung-ujung  |
| 5.1.6.10.16.     | Desa Semowo   |
| 5.1.6.10.17.     | Desa Jembrak  |
| <b>5.1.6.11.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan</b> |
|                  | <b>Tuntang</b>  |
| 5.1.6.11.01.     | Desa Karangtengah   |
| 5.1.6.11.02.     | Desa Karanganyar  |
| 5.1.6.11.03.     | Desa Tlogo  |
| 5.1.6.11.04.     | Desa Watuagung  |
| 5.1.6.11.05.     | Desa Jombor   |
| 5.1.6.11.06.     | Desa Kalibeji   |
| 5.1.6.11.07.     | Desa Candirejo  |
| 5.1.6.11.08.     | Desa Lopait   |
| 5.1.6.11.09.     | Desa Rowosari   |
| 5.1.6.11.10.     | Desa Sragen   |
| 5.1.6.11.11.     | Desa Tuntang  |
| 5.1.6.11.12.     | Desa Tlompakan  |
| 5.1.6.11.13.     | Desa Ngajaran   |
| 5.1.6.11.14.     | Desa Kesongo  |
| 5.1.6.11.15.     | Desa Gedangan   |
| 5.1.6.11.16.     | Desa Delik  |
| <b>5.1.6.12.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan</b> |
|                  | <b>Banyubiru</b>  |
| 5.1.6.12.01.     | Desa Wirogomo   |
| 5.1.6.12.02.     | Desa Kebondowo  |
| 5.1.6.12.03.     | Desa Gedong   |
| 5.1.6.12.04.     | Desa Rowoboni   |
| 5.1.6.12.05.     | Desa Tegaron  |
| 5.1.6.12.06.     | Desa Kemambang  |
| 5.1.6.12.07.     | Desa Kebumen  |
| 5.1.6.12.08.     | Desa Sepakung   |
| 5.1.6.12.09.     | Desa Banyubiru  |
| 5.1.6.12.10.     | Desa Ngrapah  |

| Kode Rekening | Uraian   |
|---------------|--|
| 1             | 2  |
| 5.1.6.13.     | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Jambu</b>    |
| 5.1.6.13.01.  | Desa Rejosari  |
| 5.1.6.13.02.  | Desa Kelurahan   |
| 5.1.6.13.03.  | Desa Kebondalem  |
| 5.1.6.13.04.  | Desa Genting   |
| 5.1.6.13.05.  | Desa Kuwarasan   |
| 5.1.6.13.06.  | Desa Jambu   |
| 5.1.6.13.07.  | Desa Brongkol  |
| 5.1.6.13.08.  | Desa Gemawang  |
| 5.1.6.13.09.  | Desa Bedono  |
| 5.1.6.14.     | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Sumowono</b> |
| 5.1.6.14.01.  | Desa Bumen   |
| 5.1.6.14.02.  | Desa Duren   |
| 5.1.6.14.03.  | Desa Pledokan  |
| 5.1.6.14.04.  | Desa Candigaron  |
| 5.1.6.14.05.  | Desa Kemitir   |
| 5.1.6.14.06.  | Desa Sumowono  |
| 5.1.6.14.07.  | Desa Jubelan   |
| 5.1.6.14.08.  | Desa Ngadikerso  |
| 5.1.6.14.09.  | Desa Piyanggang  |
| 5.1.6.14.10.  | Desa Mendongan   |
| 5.1.6.14.11.  | Desa Losari  |
| 5.1.6.14.12.  | Desa Keseneng  |
| 5.1.6.14.13.  | Desa Kebonagung  |
| 5.1.6.14.14.  | Desa Trayu   |
| 5.1.6.14.15.  | Desa Lanjan  |
| 5.1.6.14.16.  | Desa Kemawi  |
| 5.1.6.15.     | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Ambarawa</b> |
| 5.1.6.15.01.  | Desa Bejalen   |
| 5.1.6.15.02.  | Desa Pasekan   |
| 5.1.6.16.     | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bawen</b>    |
| 5.1.6.16.01.  | Desa Dopleng   |
| 5.1.6.16.02.  | Desa Lemahireng  |
| 5.1.6.16.03.  | Desa Polosiri  |
| 5.1.6.16.04.  | Desa Poncoruso   |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.1.6.16.05.     | Desa Kandangan  |
| 5.1.6.16.06.     | Desa Samban   |
| 5.1.6.16.07.     | Desa Asinan   |
| <b>5.1.6.17.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bringin</b>   |
| 5.1.6.17.01.     | Desa Truko  |
| 5.1.6.17.02.     | Desa Rembes   |
| 5.1.6.17.03.     | Desa Gogodalem  |
| 5.1.6.17.04.     | Desa Kalijambe  |
| 5.1.6.17.05.     | Desa Sambirejo  |
| 5.1.6.17.06.     | Desa Nyemoh   |
| 5.1.6.17.07.     | Desa Tempuran   |
| 5.1.6.17.08.     | Desa Lebak  |
| 5.1.6.17.09.     | Desa Wiru   |
| 5.1.6.17.10.     | Desa Tanjung  |
| 5.1.6.17.11.     | Desa Banding  |
| 5.1.6.17.12.     | Desa Popongan   |
| 5.1.6.17.13.     | Desa Kalikurmo  |
| 5.1.6.17.14.     | Desa Bringin  |
| 5.1.6.17.15.     | Desa Pakis  |
| 5.1.6.17.16.     | Desa Sendang  |
| <b>5.1.6.18.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bergas</b>    |
| 5.1.6.18.01.     | Desa Randugunting   |
| 5.1.6.18.02.     | Desa Gebugan  |
| 5.1.6.18.03.     | Desa Jatijajar  |
| 5.1.6.18.04.     | Desa Gondoriyo  |
| 5.1.6.18.05.     | Desa Pagersari  |
| 5.1.6.18.06.     | Desa Wringinputih   |
| 5.1.6.18.07.     | Desa Munding  |
| 5.1.6.18.08.     | Desa Bergaskidul  |
| 5.1.6.18.09.     | Desa Diwak  |
| <b>5.1.6.19.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pringapus</b> |
| 5.1.6.19.01.     | Desa Wonoyoso   |
| 5.1.6.19.02.     | Desa Penawangan   |
| 5.1.6.19.03.     | Desa Wonorejo   |
| 5.1.6.19.04.     | Desa Klepu  |
| 5.1.6.19.05.     | Desa Jatirunggo   |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.1.6.19.06.     | Desa Derekan  |
| 5.1.6.19.07.     | Desa Pringsari  |
| 5.1.6.19.08.     | Desa Candirejo  |
| <b>5.1.6.20.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bancak</b>        |
| 5.1.6.20.01.     | Desa Pucung   |
| 5.1.6.20.02.     | Desa Bantal   |
| 5.1.6.20.03.     | Desa Jumpang  |
| 5.1.6.20.04.     | Desa Plumutan   |
| 5.1.6.20.05.     | Desa Wonokerto  |
| 5.1.6.20.06.     | Desa Rejosari   |
| 5.1.6.20.07.     | Desa Boto   |
| 5.1.6.20.08.     | Desa Lembu  |
| 5.1.6.20.09.     | Desa Bancak   |
| <b>5.1.6.21.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Kaliwungu</b>     |
| 5.1.6.21.01.     | Desa Udanwuh  |
| 5.1.6.21.02.     | Desa Rogomulyo  |
| 5.1.6.21.03.     | Desa Papringan  |
| 5.1.6.21.04.     | Desa Jetis  |
| 5.1.6.21.05.     | Desa Payungan   |
| 5.1.6.21.06.     | Desa Kener  |
| 5.1.6.21.07.     | Desa Pager  |
| 5.1.6.21.08.     | Desa Mukiran  |
| 5.1.6.21.09.     | Desa Siwal  |
| 5.1.6.21.10.     | Desa Kradenan   |
| 5.1.6.21.11.     | Desa Kaliwungu  |
| <b>5.1.6.22.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Ungaran Barat</b> |
| 5.1.6.22.01.     | Desa Nyatnyono  |
| 5.1.6.22.02.     | Desa Keji   |
| 5.1.6.22.03.     | Desa Lerep  |
| 5.1.6.22.04.     | Desa Branjang   |
| 5.1.6.22.05.     | Desa Kalisidi   |
| 5.1.6.22.06.     | Desa Gogik  |
| <b>5.1.6.23.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Ungaran Timur</b> |
| 5.1.6.23.01.     | Desa Kalongan   |
| 5.1.6.23.02.     | Desa Mluweh   |



| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.1.6.23.03.     | Desa Leyangan   |
| 5.1.6.23.04.     | Desa Kalikayen  |
| 5.1.6.23.05.     | Desa Kawengen   |
| <b>5.1.6.24.</b> | <b>Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandungan</b>           |
| 5.1.6.24.01.     | Desa Banyukuning  |
| 5.1.6.24.02.     | Desa Candi  |
| 5.1.6.24.03.     | Desa Jetis  |
| 5.1.6.24.04.     | Desa Sidomukti  |
| 5.1.6.24.05.     | Desa Jimbaran   |
| 5.1.6.24.06.     | Desa Pakopen  |
| 5.1.6.24.07.     | Desa Mlilir   |
| 5.1.6.24.08.     | Desa Kenteng  |
| 5.1.6.24.09.     | Desa Duren  |
| <b>5.1.7.</b>    | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik</b> |
| <b>5.1.7.01.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi</b>   |
| 5.1.7.01.01.     | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi .....  |
| <b>5.1.7.02.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota</b>   |
| 5.1.7.02.01.     | Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota .....  |
| <b>5.1.7.03.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa</b>   |
| 5.1.7.03.01.     | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa  |
| <b>5.1.7.04.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya</b>                      |
| 5.1.7.04.01.     | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi ...  |
| 5.1.7.04.02.     | Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota .....  |
| <b>5.1.7.05.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>   |
| 5.1.7.05.01.     | PDIP  |
| 5.1.7.05.02.     | PARTAI GOLKAR   |
| 5.1.7.05.03.     | PKB   |
| 5.1.7.05.04.     | PPP   |
| 5.1.7.05.05.     | PAN   |
| 5.1.7.05.06.     | PKS   |
| 5.1.7.05.07.     | PARTAI DEMOKRAT   |
| 5.1.7.05.08.     | PKPI  |
| 5.1.7.05.09.     | PARTAI GERINDRA   |
| 5.1.7.05.10.     | PARTAI HANURA   |
| 5.1.7.05.11.     | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT  |
| <b>5.1.7.06.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Getasan</b>                           |

| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 5.1.7.06.01.     | Desa Nogosaren   |
| 5.1.7.06.02.     | Desa Tolokan   |
| 5.1.7.06.03.     | Desa Sumogawe  |
| 5.1.7.06.04.     | Desa Ngrawan   |
| 5.1.7.06.05.     | Desa Manggihan   |
| 5.1.7.06.06.     | Desa Samirono  |
| 5.1.7.06.07.     | Desa Tajuk   |
| 5.1.7.06.08.     | Desa Getasan   |
| 5.1.7.06.09.     | Desa Batur   |
| 5.1.7.06.10.     | Desa Kopeng  |
| 5.1.7.06.11.     | Desa Jetak   |
| 5.1.7.06.12.     | Desa Polobogo  |
| 5.1.7.06.13.     | Desa Wates   |
| <b>5.1.7.07.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Tengaran</b> |
| 5.1.7.07.01.     | Desa Barukan   |
| 5.1.7.07.02.     | Desa Tegalwaton  |
| 5.1.7.07.03.     | Desa Butuh   |
| 5.1.7.07.04.     | Desa Klero   |
| 5.1.7.07.05.     | Desa Bener   |
| 5.1.7.07.06.     | Desa Sruwen  |
| 5.1.7.07.07.     | Desa Tegalrejo   |
| 5.1.7.07.08.     | Desa Cukil   |
| 5.1.7.07.09.     | Desa Tengaran  |
| 5.1.7.07.10.     | Desa Regunung  |
| 5.1.7.07.11.     | Desa Sugihan   |
| 5.1.7.07.12.     | Desa Patemon   |
| 5.1.7.07.13.     | Desa Duren   |
| 5.1.7.07.14.     | Desa Karangduren   |
| 5.1.7.07.15.     | Desa Nyamat  |
| <b>5.1.7.08.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Susukan</b>  |
| 5.1.7.08.01.     | Desa Muncar  |
| 5.1.7.08.02.     | Desa Sidoharjo   |
| 5.1.7.08.03.     | Desa Tawang  |
| 5.1.7.08.04.     | Desa Badran  |
| 5.1.7.08.05.     | Desa Ngasinan  |
| 5.1.7.08.06.     | Desa Koripan   |
| 5.1.7.08.07.     | Desa Timpik  |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.1.7.08.08.     | Desa Ketapang   |
| 5.1.7.08.09.     | Desa Kemetul  |
| 5.1.7.08.10.     | Desa Kenteng  |
| 5.1.7.08.11.     | Desa Susukan  |
| 5.1.7.08.12.     | Desa Gentan   |
| 5.1.7.08.13.     | Desa Bakalrejo  |
| <b>5.1.7.09.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Suruh</b>   |
| 5.1.7.09.01.     | Desa Purworejo  |
| 5.1.7.09.02.     | Desa Sukorejo   |
| 5.1.7.09.03.     | Desa Suruh  |
| 5.1.7.09.04.     | Desa Kebowan  |
| 5.1.7.09.05.     | Desa Cukilan  |
| 5.1.7.09.06.     | Desa Gunungtumpeng  |
| 5.1.7.09.07.     | Desa Medayu   |
| 5.1.7.09.08.     | Desa Reksosari  |
| 5.1.7.09.09.     | Desa Bonomerto  |
| 5.1.7.09.10.     | Desa Dersansari   |
| 5.1.7.09.11.     | Desa Kedungringin   |
| 5.1.7.09.12.     | Desa Krandon Lor  |
| 5.1.7.09.13.     | Desa Plumbon  |
| 5.1.7.09.14.     | Desa Dadapayam  |
| 5.1.7.09.15.     | Desa Ketanggi   |
| 5.1.7.09.16.     | Desa Bejilor  |
| 5.1.7.09.17.     | Desa Jatirejo   |
| <b>5.1.7.10.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pabelan</b> |
| 5.1.7.10.01.     | Desa Pabelan  |
| 5.1.7.10.02.     | Desa Tukang   |
| 5.1.7.10.03.     | Desa Giling   |
| 5.1.7.10.04.     | Desa Terban   |
| 5.1.7.10.05.     | Desa Sukoharjo  |
| 5.1.7.10.06.     | Desa Karanggondang  |
| 5.1.7.10.07.     | Desa Kauman Lor   |
| 5.1.7.10.08.     | Desa Bejaten  |
| 5.1.7.10.09.     | Desa Glawan   |
| 5.1.7.10.10.     | Desa Kadirejo   |
| 5.1.7.10.11.     | Desa Padaan   |
| 5.1.7.10.12.     | Desa Bendungan  |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.1.7.10.13.     | Desa Segiri   |
| 5.1.7.10.14.     | Desa Sumberejo  |
| 5.1.7.10.15.     | Desa Ujung-ujung  |
| 5.1.7.10.16.     | Desa Semowo   |
| 5.1.7.10.17.     | Desa Jembrak  |
| <b>5.1.7.11.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Tuntang</b>   |
| 5.1.7.11.01.     | Desa Karangtengah   |
| 5.1.7.11.02.     | Desa Karanganyar  |
| 5.1.7.11.03.     | Desa Tlogo  |
| 5.1.7.11.04.     | Desa Watuagung  |
| 5.1.7.11.05.     | Desa Jombor   |
| 5.1.7.11.06.     | Desa Kalibeji   |
| 5.1.7.11.07.     | Desa Candirejo  |
| 5.1.7.11.08.     | Desa Lopait   |
| 5.1.7.11.09.     | Desa Rowosari   |
| 5.1.7.11.10.     | Desa Sragen   |
| 5.1.7.11.11.     | Desa Tuntang  |
| 5.1.7.11.12.     | Desa Tolmpakan  |
| 5.1.7.11.13.     | Desa Ngajaran   |
| 5.1.7.11.14.     | Desa Kesongo  |
| 5.1.7.11.15.     | Desa Gedangan   |
| 5.1.7.11.16.     | Desa Delik  |
| <b>5.1.7.12.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Banyubiru</b> |
| 5.1.7.12.01.     | Desa Wirogomo   |
| 5.1.7.12.02.     | Desa Kebondowo  |
| 5.1.7.12.03.     | Desa Gedong   |
| 5.1.7.12.04.     | Desa Rowoboni   |
| 5.1.7.12.05.     | Desa Tegaron  |
| 5.1.7.12.06.     | Desa Kemambang  |
| 5.1.7.12.07.     | Desa Kebumen  |
| 5.1.7.12.08.     | Desa Sepakung   |
| 5.1.7.12.09.     | Desa Banyubiru  |
| 5.1.7.12.10.     | Desa Ngrapah  |
| <b>5.1.7.13.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Jambu</b>     |
| 5.1.7.13.01.     | Desa Rejosari   |
| 5.1.7.13.02.     | Desa Kelurahan  |
| 5.1.7.13.03.     | Desa Kebondalem   |

| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 5.1.7.13.04.     | Desa Genting   |
| 5.1.7.13.05.     | Desa Kuwarasan   |
| 5.1.7.13.06.     | Desa Jambu   |
| 5.1.7.13.07.     | Desa Brongkol  |
| 5.1.7.13.08.     | Desa Gemawang  |
| 5.1.7.13.09.     | Desa Bedono  |
| <b>5.1.7.14.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Sumowono</b> |
| 5.1.7.14.01.     | Desa Bumen   |
| 5.1.7.14.02.     | Desa Duren   |
| 5.1.7.14.03.     | Desa Pledokan  |
| 5.1.7.14.04.     | Desa Candigaron  |
| 5.1.7.14.05.     | Desa Kemitir   |
| 5.1.7.14.06.     | Desa Sumowono  |
| 5.1.7.14.07.     | Desa Jubelan   |
| 5.1.7.14.08.     | Desa Ngadikerso  |
| 5.1.7.14.09.     | Desa Piyanggang  |
| 5.1.7.14.10.     | Desa Mendongan   |
| 5.1.7.14.11.     | Desa Losari  |
| 5.1.7.14.12.     | Desa Keseneng  |
| 5.1.7.14.13.     | Desa Kebonagung  |
| 5.1.7.14.14.     | Desa Trayu   |
| 5.1.7.14.15.     | Desa Lanjan  |
| 5.1.7.14.16.     | Desa Kemawi  |
| <b>5.1.7.15.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Ambarawa</b> |
| 5.1.7.15.01.     | Desa Bejalen   |
| 5.1.7.15.02.     | Desa Pasekan   |
| <b>5.1.7.16.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bawen</b>    |
| 5.1.7.16.01.     | Desa Dopleng   |
| 5.1.7.16.02.     | Desa Lemahireng  |
| 5.1.7.16.03.     | Desa Polosiri  |
| 5.1.7.16.04.     | Desa Poncoruso   |
| 5.1.7.16.05.     | Desa Kandangan   |
| 5.1.7.16.06.     | Desa Samban  |
| 5.1.7.16.07.     | Desa Asinan  |
| <b>5.1.7.17.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bringin</b>  |
| 5.1.7.17.01.     | Desa Truko   |
| 5.1.7.17.02.     | Desa Rembes  |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.1.7.17.03.     | Desa Gogodalem  |
| 5.1.7.17.04.     | Desa Kalijambe  |
| 5.1.7.17.05.     | Desa Sambirejo  |
| 5.1.7.17.06.     | Desa Nyemoh   |
| 5.1.7.17.07.     | Desa Tempuran   |
| 5.1.7.17.08.     | Desa Lebak  |
| 5.1.7.17.09.     | Desa Wiru   |
| 5.1.7.17.10.     | Desa Tanjung  |
| 5.1.7.17.11.     | Desa Banding  |
| 5.1.7.17.12.     | Desa Popongan   |
| 5.1.7.17.13.     | Desa Kalikurmo  |
| 5.1.7.17.14.     | Desa Bringin  |
| 5.1.7.17.15.     | Desa Pakis  |
| 5.1.7.17.16.     | Desa Sendang  |
| <b>5.1.7.18.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bergas</b>    |
| 5.1.7.18.01.     | Desa Randugunting   |
| 5.1.7.18.02.     | Desa Gebugan  |
| 5.1.7.18.03.     | Desa Jatijajar  |
| 5.1.7.18.04.     | Desa Gondoriyo  |
| 5.1.7.18.05.     | Desa Pagersari  |
| 5.1.7.18.06.     | Desa Wringinputih   |
| 5.1.7.18.07.     | Desa Munding  |
| 5.1.7.18.08.     | Desa Bergaskidul  |
| 5.1.7.18.09.     | Desa Diwak  |
| <b>5.1.7.19.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pringapus</b> |
| 5.1.7.19.01.     | Desa Wonoyoso   |
| 5.1.7.19.02.     | Desa Penawangan   |
| 5.1.7.19.03.     | Desa Wonorejo   |
| 5.1.7.19.04.     | Desa Klepu  |
| 5.1.7.19.05.     | Desa Jatirunggo   |
| 5.1.7.19.06.     | Desa Derekan  |
| 5.1.7.19.07.     | Desa Pringsari  |
| 5.1.7.19.08.     | Desa Candirejo  |
| <b>5.1.7.20.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bancak</b>    |
| 5.1.7.20.01.     | Desa Pucung   |
| 5.1.7.20.02.     | Desa Bantal   |
| 5.1.7.20.03.     | Desa Jlumpang   |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.1.7.20.04.     | Desa Plumutan   |
| 5.1.7.20.05.     | Desa Wonokerto  |
| 5.1.7.20.06.     | Desa Rejosari   |
| 5.1.7.20.07.     | Desa Boto   |
| 5.1.7.20.08.     | Desa Lembu  |
| 5.1.7.20.09.     | Desa Bancak   |
| <b>5.1.7.21.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Kaliwungu</b>     |
| 5.1.7.21.01.     | Desa Udanwuh  |
| 5.1.7.21.02.     | Desa Rogomulyo  |
| 5.1.7.21.03.     | Desa Papringan  |
| 5.1.7.21.04.     | Desa Jetis  |
| 5.1.7.21.05.     | Desa Payungan   |
| 5.1.7.21.06.     | Desa Kener  |
| 5.1.7.21.07.     | Desa Pager  |
| 5.1.7.21.08.     | Desa Mukiran  |
| 5.1.7.21.09.     | Desa Siwal  |
| 5.1.7.21.10.     | Desa Kradenan   |
| 5.1.7.21.11.     | Desa Kaliwungu  |
| <b>5.1.7.22.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Ungaran Barat</b> |
| 5.1.7.22.01.     | Desa Nyatnyono  |
| 5.1.7.22.02.     | Desa Keji   |
| 5.1.7.22.03.     | Desa Lerep  |
| 5.1.7.22.04.     | Desa Branjang   |
| 5.1.7.22.05.     | Desa Kalisidi   |
| 5.1.7.22.06.     | Desa Gogik  |
| <b>5.1.7.23.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Ungaran Timur</b> |
| 5.1.7.23.01.     | Desa Kalongan   |
| 5.1.7.23.02.     | Desa Mluweh   |
| 5.1.7.23.03.     | Desa Leyangan   |
| 5.1.7.23.04.     | Desa Kalikayen  |
| 5.1.7.23.05.     | Desa Kawengen   |
| <b>5.1.7.24.</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandungan</b>     |
| 5.1.7.24.01.     | Desa Banyukuning  |
| 5.1.7.24.02.     | Desa Candi  |
| 5.1.7.24.03.     | Desa Jetis  |
| 5.1.7.24.04.     | Desa Sidomukti  |

| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 5.1.7.24.05.     | Desa Jimbaran  |
| 5.1.7.24.06.     | Desa Pakopen   |
| 5.1.7.24.07.     | Desa Mlilir  |
| 5.1.7.24.08.     | Desa Kenteng   |
| 5.1.7.24.09.     | Desa Duren   |
| <b>5.1.8.</b>    | <b>Belanja Tidak Terduga</b>   |
| <b>5.1.8.01.</b> | <b>Belanja Tidak Terduga</b>   |
| 5.1.8.01.01.     | Belanja Tidak Terduga  |
| <b>5.2.</b>      | <b>Belanja Langsung</b>  |
| <b>5.2.1.</b>    | <b>Belanja Pegawai</b>   |
| <b>5.2.1.01.</b> | <b>Honorarium PNS</b>  |
| 5.2.1.01.01.     | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  |
| 5.2.1.01.02.     | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pemeriksa dan Pengadaan)   |
| 5.2.1.01.03.     | Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pegguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang) |
| 5.2.1.01.04.     | Honorarium Khusus Kegiatan Pengawasan (Inspektorat)  |
| <b>5.2.1.02.</b> | <b>Honorarium Non PNS</b>  |
| 5.2.1.02.01.     | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (PHL)   |
| 5.2.1.02.02.     | Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan   |
| <b>5.2.1.03.</b> | <b>Uang Lembur</b>   |
| 5.2.1.03.01.     | Uang Lembur PNS  |
| 5.2.1.03.02.     | Uang Lembur Non PNS  |
| <b>5.2.1.04.</b> | <b>Belanja Pegawai BLUD</b>  |
| 5.2.1.04.01.     | Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit   |
| 5.2.1.04.02.     | Belanja Pegawai BLUD Puskesmas   |
| <b>5.2.1.05.</b> | <b>Belanja Pegawai BOS</b>   |
| 5.2.1.05.01.     | Belanja Pegawai Dana BOS   |
| <b>5.2.1.06.</b> | <b>Uang Saku Rapat</b>   |
| 5.2.1.06.01.     | Uang Saku Rapat  |
| <b>5.2.1.07.</b> | <b>Uang Saku Piket Libur Nasional</b>  |
| 5.2.1.07.01.     | Uang Saku Piket Libur Nasional   |
| <b>5.2.2.</b>    | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |
| <b>5.2.2.01.</b> | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>   |
| 5.2.2.01.01.     | Belanja alat tulis kantor  |
| 5.2.2.01.02.     | Belanja dokumen/ administrasi tender   |
| 5.2.2.01.03.     | Belanja alat listrik dan elektronik  |
| 5.2.2.01.04.     | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya  |



| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 5.2.2.01.05.     | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih                           |
| 5.2.2.01.06.     | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas   |
| 5.2.2.01.07.     | Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran                                 |
| 5.2.2.01.08.     | Belanja pengisian tabung gas   |
| 5.2.2.01.09      | Belanja pengisian air minum  |
| 5.2.2.01.10.     | Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan Medis                                  |
| 5.2.2.01.11.     | Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan Non Medis                              |
| 5.2.2.01.12.     | Belanja Bahan Pakai Habis Untuk Posyandu                                   |
| 5.2.2.01.13.     | Belanja Pakai Habis Peralatan Jaringan dan Kelengkapan Komputer            |
| <b>5.2.2.02.</b> | <b>Belanja Bahan/Material</b>  |
| 5.2.2.02.01.     | Belanja bahan baku bangunan  |
| 5.2.2.02.02.     | Belanja bahan/bibit tanaman  |
| 5.2.2.02.03.     | Belanja bibit ternak   |
| 5.2.2.02.04.     | Belanja bahan obat-obatan  |
| 5.2.2.02.05.     | Belanja bahan kimia  |
| 5.2.2.02.06      | Belanja bahan Percontohan  |
| 5.2.2.02.07.     | Belanja Bahan Sembako  |
| 5.2.2.02.08      | Belanja Bahan Pakan Ternak   |
| 5.2.2.02.09      | Belanja Piagam/Piala/sertifikat  |
| 5.2.2.02.10      | Belanja Cinderamata, Fandel, Plakat dan Sejenisnya                         |
| 5.2.2.02.11.     | Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi, Pameran dan sejenisnya |
| 5.2.2.02.12.     | Belanja Paket Persalinan (Jamkesmas)                                       |
| 5.2.2.02.13.     | Belanja Paket Rawat Inap Persalinan (Jamkesmas)                            |
| 5.2.2.02.14.     | Belanja Paket Rawat Inap Non Persalinan (Jamkesmas)                        |
| 5.2.2.02.15.     | Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor                                   |
| 5.2.2.02.16.     | Belanja Alat-alat Olah Raga dan Alat-alat Musik                            |
| 5.2.2.02.17.     | Belanja Alat Praktik/ Peraga   |
| 5.2.2.02.18.     | Belanja Bahan Laboratorium   |
| 5.2.2.02.19.     | Belanja Paket Kegiatan Pilkades  |
| <b>5.2.2.03.</b> | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |
| 5.2.2.03.01.     | Belanja telepon  |
| 5.2.2.03.02.     | Belanja air  |
| 5.2.2.03.03.     | Belanja listrik  |
| 5.2.2.03.04.     | Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang                            |
| 5.2.2.03.05.     | Belanja surat kabar/majalah/ terbitan berkala                              |
| 5.2.2.03.06.     | Belanja kawat/faksimili/internet   |
| 5.2.2.03.07.     | Belanja paket/pengiriman   |

| Kode Rekening | Uraian  |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 5.2.2.03.08.  | Belanja Sertifikasi (Uji Tera)  |
| 5.2.2.03.09.  | Belanja Jasa Transaksi Keuangan   |
| 5.2.2.03.10.  | Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum            |
| 5.2.2.03.11.  | Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor   |
| 5.2.2.03.12.  | Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga)                         |
| 5.2.2.03.13.  | Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi                             |
| 5.2.2.03.14.  | Belanja Jasa Pemasangan Listrik, Air, Telepon dan Gas                     |
| 5.2.2.03.15.  | Belanja Jasa Penguburan Mayat Tak Dikenal                                 |
| 5.2.2.03.16.  | Belanja Jasa Restitusi Pajak Daerah                                       |
| 5.2.2.03.17.  | Belanja Jasa Pemeriksaan Uji Laboratorium (Obat, Kesehatan dsj)           |
| 5.2.2.03.18.  | Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                     |
| 5.2.2.03.19.  | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan  |
| 5.2.2.03.20.  | Belanja Jasa Laundry/Wassery  |
| 5.2.2.03.21.  | Belanja Nota Persetujuan NIP (penerimaan CPNS)                            |
| 5.2.2.03.22.  | Belanja Tes Potensi (PCAP/QAP)  |
| 5.2.2.03.23.  | Belanja Ujian Dinas   |
| 5.2.2.03.24.  | Belanja Soal dan Koreksi Tes Rekrutmen Pegawai                            |
| 5.2.2.03.25.  | Belanja Kontribusi Kenaikan Pangkat                                       |
| 5.2.2.03.26.  | Belanja Kontribusi Pemulangan Pegawai yang Pensiun                        |
| 5.2.2.03.27.  | Belanja Kontribusi Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat otomatis |
| 5.2.2.03.28.  | Belanja Kontribusi Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi        |
| 5.2.2.03.29.  | Belanja Retribusi Sampah  |
| 5.2.2.03.30.  | Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourcing                                   |
| 5.2.2.03.31.  | Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan/Perawatan/Pengobatan                   |
| 5.2.2.03.32.  | Belanja Jasa Tenaga Teknis  |
| 5.2.2.03.33.  | Belanja Kontribusi/ Kompensasi  |
| 5.2.2.03.34.  | Belanja Jasa Bongkar Bangunan/ Konstruksi                                 |
| 5.2.2.03.35.  | Belanja Pendistribusian SPPT PBB-P2                                       |
| 5.2.2.03.36.  | Belanja jasa pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR)                    |
| 5.2.2.04.     | <b>Belanja Premi Asuransi</b>   |
| 5.2.2.04.01.  | Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)                                       |
| 5.2.2.04.02.  | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah                                |
| 5.2.2.04.03.  | Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS                          |
| 5.2.2.04.04.  | Belanja Premi Asuransi Masyarakat Miskin                                  |
| 5.2.2.04.05.  | Belanja Premi Asuransi Pengunjung Obyek Wisata                            |
| 5.2.2.04.06.  | Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS                    |
| 5.2.2.05.     | <b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>                               |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.2.2.05.01.     | Belanja Jasa Service  |
| 5.2.2.05.02.     | Belanja Penggantian Suku Cadang                                   |
| 5.2.2.05.03.     | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas                        |
| 5.2.2.05.04.     | Belanja Jasa KIR  |
| 5.2.2.05.05.     | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan                               |
| <b>5.2.2.06.</b> | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>                              |
| 5.2.2.06.01.     | Belanja cetak   |
| 5.2.2.06.02.     | Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)                             |
| <b>5.2.2.07.</b> | <b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>                    |
| 5.2.2.07.01.     | Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas                            |
| 5.2.2.07.02.     | Belanja sewa gedung/ kantor/tempat                                |
| 5.2.2.07.03.     | Belanja sewa ruang rapat/pertemuan                                |
| 5.2.2.07.04.     | Belanja sewa tempat parkir/ uang tambat/ hanggar sarana mobilitas |
| <b>5.2.2.08.</b> | <b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>                              |
| 5.2.2.08.01.     | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat                               |
| 5.2.2.08.02.     | Belanja sewa Sarana Mobilitas Air                                 |
| 5.2.2.08.03.     | Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara                               |
| <b>5.2.2.09.</b> | <b>Belanja Sewa Alat Berat</b>                                    |
| 5.2.2.09.01.     | Belanja sewa Eskavator  |
| 5.2.2.09.02.     | Belanja sewa Buldoser   |
| 5.2.2.09.03.     | Belanja sewa alat berat lainnya                                   |
| <b>5.2.2.10.</b> | <b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>             |
| 5.2.2.10.01.     | Belanja sewa meja kursi   |
| 5.2.2.10.02.     | Belanja sewa komputer dan printer                                 |
| 5.2.2.10.03.     | Belanja sewa proyektor  |
| 5.2.2.10.04.     | Belanja sewa generator  |
| 5.2.2.10.05.     | Belanja sewa tenda/ tratag/ panggung                              |
| 5.2.2.10.06.     | Belanja sewa pakaian adat dan alat musik tradisional              |
| 5.2.2.10.07.     | Belanja Sewa Kaset/ CD  |
| 5.2.2.10.08.     | Belanja sewa Tanaman Hias   |
| 5.2.2.10.09.     | Belanja sewa Pengharum ruangan                                    |
| 5.2.2.10.10.     | Belanja Sewa Peralatan Makan Prasmanan                            |
| 5.2.2.10.11      | Belanja Sewa Software, Hardware, dan System                       |
| 5.2.2.10.12      | Belanja Sewa Sound System   |
| 5.2.2.10.13.     | Belanja Sewa Layanan Akses Internet                               |
| 5.2.2.10.14.     | Belanja Sewa Elektronik Lainnya                                   |
| <b>5.2.2.11.</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                                |

| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 5.2.2.11.01.     | Belanja makanan dan minuman harian pegawai                             |
| 5.2.2.11.02.     | Belanja makanan dan minuman rapat                                      |
| 5.2.2.11.03.     | Belanja makanan dan minuman harian tamu                                |
| 5.2.2.11.04.     | Belanja makan dan minum Petugas Piket                                  |
| 5.2.2.11.05      | Belanja makanan dan minuman harian pasien                              |
| <b>5.2.2.12.</b> | <b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>                            |
| 5.2.2.12.01.     | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH                                     |
| 5.2.2.12.02.     | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)                                     |
| 5.2.2.12.03.     | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)                                    |
| 5.2.2.12.04.     | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Lurik                       |
| 5.2.2.12.05.     | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)                                    |
| 5.2.2.12.06.     | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)                                      |
| <b>5.2.2.13.</b> | <b>Belanja Pakaian Kerja</b>   |
| 5.2.2.13.01.     | Belanja pakaian kerja lapangan   |
| <b>5.2.2.14.</b> | <b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu</b>                   |
| 5.2.2.14.01.     | Belanja pakaian KORPRI   |
| 5.2.2.14.02.     | Belanja pakaian adat daerah  |
| 5.2.2.14.03.     | Belanja pakaian batik tradisional                                      |
| 5.2.2.14.04.     | Belanja pakaian olahraga   |
| <b>5.2.2.15.</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |
| 5.2.2.15.01.     | Belanja perjalanan dinas dalam daerah                                  |
| 5.2.2.15.02.     | Belanja perjalanan dinas luar daerah                                   |
| <b>5.2.2.16.</b> | <b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>                                 |
| 5.2.2.16.01.     | Belanja beasiswa tugas belajar D3                                      |
| 5.2.2.16.02.     | Belanja beasiswa tugas belajar S1                                      |
| 5.2.2.16.03.     | Belanja beasiswa tugas belajar S2                                      |
| 5.2.2.16.04.     | Belanja beasiswa tugas belajar S3                                      |
| <b>5.2.2.17.</b> | <b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b> |
| 5.2.2.17.01.     | Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan                                |
| 5.2.2.17.02.     | Belanja sosialisasi  |
| 5.2.2.17.03.     | Belanja bimbingan teknis   |
| 5.2.2.17.04.     | Belanja Diklat Penjenjangan  |
| 5.2.2.17.05.     | Belanja Diklat Teknis/Fungsional                                       |
| <b>5.2.2.18.</b> | <b>Belanja Perjalanan Pindah Tugas</b>                                 |
| 5.2.2.18.01.     | Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah                           |
| 5.2.2.18.02.     | Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah                            |
| <b>5.2.2.19.</b> | <b>Belanja Pemulangan Pegawai</b>                                      |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.2.2.19.01.     | Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah                                      |
| 5.2.2.19.02.     | Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah                                       |
| 5.2.2.19.03.     | Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas                            |
| <b>5.2.2.20.</b> | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |
| 5.2.2.20.01      | Belanja Pemeliharaan Jalan  |
| 5.2.2.20.02      | Belanja Pemeliharaan Jembatan   |
| 5.2.2.20.03.     | Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja, Halaman Kantor                                  |
| 5.2.2.20.04.     | Belanja Pemeliharaan Gedung Pertemuan   |
| 5.2.2.20.05.     | Belanja Pemeliharaan Gedung/ Rumah Dinas  |
| 5.2.2.20.06.     | Belanja Pemeliharaan Menara, Prasasti, Tugu Sejarah                                       |
| 5.2.2.20.07.     | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi                                      |
| 5.2.2.20.08.     | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan perlengkapan elektronik                         |
| 5.2.2.20.09.     | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga   |
| 5.2.2.20.10.     | Belanja Pemeliharaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon                                   |
| 5.2.2.20.11.     | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Tak Bermotor                                      |
| 5.2.2.20.12.     | Belanja Pemeliharaan Buku, Terbitan Berkala, Arsip Daerah                                 |
| 5.2.2.20.13.     | Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan                              |
| 5.2.2.20.14.     | Belanja Pemeliharaan Alat-alat/Reagent Laboratorium                                       |
| 5.2.2.20.15.     | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan   |
| 5.2.2.20.16.     | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan (RSU, Dinkes)                                    |
| 5.2.2.20.17.     | Belanja Pemeliharaan Tempat Parkir, Mushola dan Bangunan Iainnya                          |
| 5.2.2.20.18.     | Belanja Pemeliharaan Ruang Kelas, Perpustakaan, Laboratorium dan Ruang Pendidikan Lainnya |
| 5.2.2.20.19.     | Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas  |
| 5.2.2.20.20.     | Belanja Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Olah Raga                                 |
| 5.2.2.20.21.     | Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah   |
| 5.2.2.20.22.     | Belanja Pemeliharaan Data Center  |
| 5.2.2.20.23.     | Belanja Pemeliharaan Alat Telekomunikasi dan Pendukungnya                                 |
| 5.2.2.20.24.     | Belanja Pemeliharaan Aplikasi/ Sistem Informasi   |
| 5.2.2.20.25.     | Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer dan Fiber Optik                                    |
| 5.2.2.20.26.     | Belanja Pemeliharaan Tower Jaringan Komputer  |
| <b>5.2.2.21.</b> | <b>Belanja Jasa Konsultan</b>   |
| 5.2.2.21.01.     | Belanja Jasa Konsultasi Peneliti  |
| 5.2.2.21.02.     | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan   |
| 5.2.2.21.03.     | Belanja Jasa Konsultansi Pengawas   |
| <b>5.2.2.22.</b> | <b>Belanja Pendidikan dan Pembinaan Non PNS (Anak Didik)</b>                              |
| 5.2.2.22.01.     | Belanja Beasiswa Anak Didik   |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.2.2.22.02.     | Belanja Pembinaan Non PNS   |
| <b>5.2.2.23.</b> | <b>Belanja Hibah Barang/ Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Badan / Lembaga / Ormas</b>     |
| 5.2.2.23.01.     | Belanja Hibah Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Badan / Lembaga                        |
| 5.2.2.23.02.     | Belanja Hibah Barang/ Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Organisasi Kemasyarakatan          |
| <b>5.2.2.24.</b> | <b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>   |
| 5.2.2.24.01.     | Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD   |
| 5.2.2.24.02.     | Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas  |
| <b>5.2.2.25.</b> | <b>Belanja Barang dan Jasa Dana BOS</b>   |
| 5.2.2.25.01.     | Belanja Barang dan Jasa Dana BOS  |
| <b>5.2.2.26.</b> | <b>Belanja Barang Yang akan dijual kepada masyarakat/ Pihak Ketiga</b>                    |
| 5.2.2.26.01.     | Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat   |
| 5.2.2.26.02.     | Belanja Barang yang akan dijual kepada Pihak ketiga                                       |
| <b>5.2.2.27.</b> | <b>Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat</b> |
| 5.2.2.27.01.     | Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga                    |
| 5.2.2.27.02.     | Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat                      |
| <b>5.2.2.28.</b> | <b>Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat</b>                     |
| 5.2.2.28.01.     | Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat (DAK Fisik)                        |
| 5.2.2.28.02.     | Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat (Kelurahan)                        |
| <b>5.2.2.29.</b> | <b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat</b>                               |
| 5.2.2.29.01.     | Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat                                      |
| 5.2.2.29.02.     | Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan  |
| 5.2.2.29.03.     | Uang untuk diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (DAK)                        |
| <b>5.2.2.30.</b> | <b>Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur</b>                                   |
| 5.2.2.30.01.     | Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator   |
| 5.2.2.30.02.     | Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Asesor                                    |
| 5.2.2.30.03.     | Belanja Jasa Penyusun Naskah Ujian/ Makalah   |
| 5.2.2.30.04.     | Belanja Jasa Pengawas/ Penilai/ Juri  |
| 5.2.2.30.05.     | Belanja Jasa Peneliti/ Pengolah/ Analisa Data   |
| <b>5.2.2.31.</b> | <b>Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Naskah Akademis (NA)</b>                            |
| 5.2.2.31.01.     | Belanja barang dan jasa penyusunan Naskah Akademis (NA)                                   |
| <b>5.2.2.32.</b> | <b>Belanja Jasa Pentas/ Pertunjukan/ Pagelaran/ Siaran</b>                                |
| 5.2.2.32.01.     | Belanja Jasa Pentas/ Pertunjukan/ Pagelaran/ Siaran                                       |
| <b>5.2.2.33.</b> | <b>Belanja Kompensasi Jasa Pengolahan Sampah (DAK)</b>                                    |
| 5.2.2.33.01.     | Belanja kompensasi jasa pengolahan sampah (DAK)   |
| <b>5.2.3.</b>    | <b>Belanja Modal</b>  |
| <b>5.2.3.01.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>  |
| 5.2.3.01.01.     | Belanja modal Pengadaan tanah kantor  |
| 5.2.3.01.02.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit                                |
| 5.2.3.01.03.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas                                  |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.2.3.01.04.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik                       |
| 5.2.3.01.05.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak               |
| 5.2.3.01.06.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar                   |
| 5.2.3.01.07.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan      |
| 5.2.3.01.08.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan  |
| 5.2.3.01.09.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus               |
| 5.2.3.01.10.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus            |
| 5.2.3.01.11.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan                        |
| 5.2.3.01.12.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti jompo                         |
| 5.2.3.01.13.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal                              |
| 5.2.3.01.14.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga                               |
| 5.2.3.01.15.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis             |
| 5.2.3.01.16.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan                    |
| 5.2.3.01.17.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan                |
| 5.2.3.01.18.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar                                 |
| 5.2.3.01.19.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah        |
| 5.2.3.01.20.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman                                 |
| 5.2.3.01.21.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat                  |
| 5.2.3.01.22.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah                                |
| 5.2.3.01.23.     | Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga                           |
| 5.2.3.01.24.     | Belanja modal Pengadaan tanah perumahan   |
| 5.2.3.01.25.     | Belanja modal Pengadaan tanah pertanian   |
| 5.2.3.01.26.     | Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan  |
| 5.2.3.01.27.     | Belanja modal Pengadaan tanah perikanan   |
| 5.2.3.01.28.     | Belanja modal Pengadaan tanah peternakan  |
| 5.2.3.01.29.     | Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan                                      |
| 5.2.3.01.30.     | Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku |
| 5.2.3.01.31      | Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana dan Prasarana Umum                   |
| <b>5.2.3.02.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat</b>                                  |
| 5.2.3.02.01.     | Belanja modal Pengadaan traktor   |
| 5.2.3.02.02.     | Belanja modal Pengadaan buldozer  |
| 5.2.3.02.03.     | Belanja modal Pengadaan stoom wals  |
| 5.2.3.02.04.     | Belanja modal Pengadaan eskavator   |
| 5.2.3.02.05.     | Belanja modal Pengadaan dump truk   |
| 5.2.3.02.06.     | Belanja modal Pengadaan crane   |
| 5.2.3.02.07.     | Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan                                 |
| 5.2.3.02.08.     | Belanja modal Pengadaan mesin pengolah semen                                    |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.2.3.02.09.     | Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)                 |
| <b>5.2.3.03.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>                      |
| 5.2.3.03.01.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan                       |
| 5.2.3.03.02.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep                        |
| 5.2.3.03.03.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon               |
| 5.2.3.03.04.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus                         |
| 5.2.3.03.05.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus                   |
| 5.2.3.03.06.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck                       |
| 5.2.3.03.07.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja) |
| 5.2.3.03.08.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks                        |
| 5.2.3.03.09.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up                     |
| 5.2.3.03.10.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans                    |
| 5.2.3.03.11.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran           |
| 5.2.3.03.12.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor                |
| 5.2.3.03.13.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator               |
| 5.2.3.03.14.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan             |
| 5.2.3.03.15      | Belanja modal Pengadaan Alat-alat Uji Kendaraan Bermotor                              |
| <b>5.2.3.04.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>                |
| 5.2.3.04.01.     | Belanja modal Pengadaan gerobak   |
| 5.2.3.04.02.     | Belanja modal Pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong                       |
| 5.2.3.04.03.     | Belanja modal Pengadaan becak   |
| 5.2.3.04.04.     | Belanja modal Pengadaan sepeda  |
| 5.2.3.04.05.     | Belanja modal Pengadaan karavan   |
| <b>5.2.3.05.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor</b>                |
| 5.2.3.05.01.     | Belanja modal Pengadaan kapal motor   |
| 5.2.3.05.02.     | Belanja modal Pengadaan kapal feri  |
| 5.2.3.05.03.     | Belanja modal Pengadaan speed boat  |
| 5.2.3.05.04.     | Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel                                       |
| 5.2.3.05.05.     | Belanja modal Pengadaan hydro foil  |
| 5.2.3.05.06.     | Belanja modal Pengadaan jet foil  |
| 5.2.3.05.07.     | Belanja modal Pengadaan kapal tug boat  |
| 5.2.3.05.08.     | Belanja modal Pengadaan kapal tanker  |
| 5.2.3.05.09.     | Belanja modal Pengadaan kapal kargo   |
| <b>5.2.3.06.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor</b>          |
| 5.2.3.06.01.     | Belanja modal Pengadaan perahu layar  |
| 5.2.3.06.02.     | Belanja modal Pengadaan perahu sampan   |
| 5.2.3.06.03.     | Belanja modal Pengadaan perahu tongkang   |



| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 5.2.3.06.04.     | Belanja modal Pengadaan perahu karet   |
| 5.2.3.06.05.     | Belanja modal Pengadaan perahu rakit   |
| 5.2.3.06.06.     | Belanja modal Pengadaan perahu sekoci  |
| <b>5.2.3.07.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara</b>                      |
| 5.2.3.07.01.     | Belanja modal Pengadaan pesawat kargo  |
| 5.2.3.07.02.     | Belanja modal Pengadaan pesawat penumpang                                    |
| 5.2.3.07.03.     | Belanja modal Pengadaan pesawat helikopter                                   |
| 5.2.3.07.04.     | Belanja modal pesawat pemadam kebakaran                                      |
| 5.2.3.07.05.     | Belanja modal Pengadaan pesawat capung                                       |
| 5.2.3.07.06.     | Belanja modal Pengadaan pesawat terbang ampibi                               |
| 5.2.3.07.07.     | Belanja modal Pengadaan pesawat terbang layang                               |
| <b>5.2.3.08.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Alat Uji</b>                    |
| 5.2.3.08.01.     | Belanja modal Pengadaan mesin las  |
| 5.2.3.08.02.     | Belanja modal Pengadaan mesin bubut  |
| 5.2.3.08.03.     | Belanja modal Pengadaan mesin dongkrak                                       |
| 5.2.3.08.04.     | Belanja modal Pengadaan mesin kompresor                                      |
| 5.2.3.08.05.     | Belanja Modal Pengadaan Alat alat Uji Kendaraan bermotor                     |
| 5.2.3.08.06      | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan dan Pertukangan               |
| <b>5.2.3.09.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b> |
| 5.2.3.09.01.     | Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian                           |
| 5.2.3.09.02.     | Belanja modal Pengadaan alat pengering gabah                                 |
| 5.2.3.09.03.     | Belanja modal Pengadaan mesin bajak  |
| 5.2.3.09.04.     | Belanja modal Pengadaan alat penetas   |
| 5.2.3.09.05      | Belanja modal alat-alat pertanian  |
| 5.2.3.09.06      | Belanja Modal Alat-alat Peternakan   |
| <b>5.2.3.10.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>                              |
| 5.2.3.10.01.     | Belanja modal Pengadaan mesin tik  |
| 5.2.3.10.02.     | Belanja modal Pengadaan mesin hitung   |
| 5.2.3.10.03.     | Belanja modal Pengadaan mesin stensil  |
| 5.2.3.10.04.     | Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy, Laminating                           |
| 5.2.3.10.05.     | Belanja modal Pengadaan mesin cetak  |
| 5.2.3.10.06.     | Belanja modal Pengadaan mesin jilid  |
| 5.2.3.10.07.     | Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas                                  |
| 5.2.3.10.08.     | Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas, plastik, dsj                |
| 5.2.3.10.09.     | Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik                               |
| 5.2.3.10.10.     | Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik                              |
| 5.2.3.10.11.     | Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran                             |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.2.3.10.12.     | Belanja modal LCD, Proyektor  |
| <b>5.2.3.11.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>                                    |
| 5.2.3.11.01.     | Belanja modal Pengadaan meja gambar   |
| 5.2.3.11.02.     | Belanja modal Pengadaan almari  |
| 5.2.3.11.03.     | Belanja modal Pengadaan brankas   |
| 5.2.3.11.04.     | Belanja modal Pengadaan filling kabinet   |
| 5.2.3.11.05.     | Belanja modal Pengadaan white board   |
| 5.2.3.11.06.     | Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu  |
| 5.2.3.11.07.     | Belanja Modal Pengadaan Elektronik Kantor   |
| 5.2.3.11.08.     | <b>Belanja Modal Diesel, Zenset, Generator, pompa air dsj</b>                         |
| 5.2.3.11.09.     | Belanja modal Tratak, Nursery   |
| 5.2.3.11.10.     | Belanja Modal Pengadaan Tralis  |
| 5.2.3.11.11.     | Belanja Modal Pengadaan Tandon Air/ Tangki Air  |
| 5.2.3.11.12.     | Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin, Exhouse Fan, dsj.                            |
| 5.2.3.11.13.     | Belanja Modal Pengadaan CCTV  |
| 5.2.3.11.14.     | Belanja Modal Pengadaan Neon Box  |
| 5.2.3.11.15.     | Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Kegiatan Pilkades (Kotak Suara, Bilik suara, dsj) |
| 5.2.3.11.16.     | Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah   |
| <b>5.2.3.12.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>   |
| 5.2.3.12.01.     | Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server                                     |
| 5.2.3.12.02.     | Belanja modal Pengadaan komputer/PC   |
| 5.2.3.12.03.     | Belanja modal Pengadaan komputer note book  |
| 5.2.3.12.04.     | Belanja modal Pengadaan printer   |
| 5.2.3.12.05.     | Belanja modal Pengadaan scaner  |
| 5.2.3.12.06.     | Belanja modal Pengadaan monitor/display   |
| 5.2.3.12.07.     | Belanja modal Pengadaan CPU   |
| 5.2.3.12.08.     | Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer  |
| 5.2.3.12.09.     | Belanja modal kelengkapan komputer ( software, flashdisk, mouse, keyboard)            |
| 5.2.3.12.10.     | Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer                                   |
| 5.2.3.12.11.     | Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak Komputer                                      |
| 5.2.3.12.12.     | Belanja Modal Pengadaan Komputer, Aplikasi, Sistem dan Kelengkapannya                 |
| 5.2.3.12.13.     | Belanja Modal Pengadaan Data Center   |
| 5.2.3.12.14.     | Belanja Modal Aplikasi Pendukung  |
| <b>5.2.3.13.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>  |
| 5.2.3.13.01.     | Belanja modal Pengadaan meja kerja  |
| 5.2.3.13.02.     | Belanja modal Pengadaan meja rapat  |
| 5.2.3.13.03.     | Belanja modal Pengadaan meja makan  |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.2.3.13.04.     | Belanja modal Pengadaan kursi kerja                                     |
| 5.2.3.13.05.     | Belanja modal Pengadaan kursi rapat                                     |
| 5.2.3.13.06.     | Belanja modal Pengadaan kursi makan                                     |
| 5.2.3.13.07.     | Belanja modal Pengadaan tempat tidur                                    |
| 5.2.3.13.08.     | Belanja modal Pengadaan sofa  |
| 5.2.3.13.09.     | Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang                             |
| 5.2.3.13.10.     | Belanja modal meja dan kursi tamu, tunggu, sekolahan                    |
| 5.2.3.13.11.     | Belanja modal podium  |
| <b>5.2.3.14.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>                          |
| 5.2.3.14.01.     | Belanja modal Pengadaan tabung gas                                      |
| 5.2.3.14.02.     | Belanja modal Pengadaan kompor gas                                      |
| 5.2.3.14.03.     | Belanja modal Pengadaan lemari makan                                    |
| 5.2.3.14.04.     | Belanja modal Pengadaan dispenser                                       |
| 5.2.3.14.05.     | Belanja modal Pengadaan kulkas  |
| 5.2.3.14.06.     | Belanja modal Pengadaan rak piring                                      |
| 5.2.3.14.07.     | Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau |
| 5.2.3.14.08.     | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Elektrik                        |
| <b>5.2.3.15.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Pehias Ruangan Rumah Tangga</b>              |
| 5.2.3.15.01.     | Belanja modal Pengadaan lampu hias                                      |
| 5.2.3.15.02.     | Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja                                |
| 5.2.3.15.03.     | Belanja Modal Pengadaan Karpet / Wallpaper                              |
| 5.2.3.15.04.     | Belanja Modal Pengadaan Korden, Taplak dan sejenisnya                   |
| <b>5.2.3.16.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>                         |
| 5.2.3.16.01.     | Belanja modal Pengadaan kamera  |
| 5.2.3.16.02.     | Belanja modal Pengadaan handycam  |
| 5.2.3.16.03.     | Belanja modal Pengadaan proyektor                                       |
| <b>5.2.3.17.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>                     |
| 5.2.3.17.01.     | Belanja modal Pengadaan telepon   |
| 5.2.3.17.02.     | Belanja modal Pengadaan faximili  |
| 5.2.3.17.03.     | Belanja modal Pengadaan radio SSB                                       |
| 5.2.3.17.04.     | Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)                      |
| 5.2.3.17.05.     | Belanja modal Pengadaan radio VHF                                       |
| 5.2.3.17.06.     | Belanja modal Pengadaan radio UHF                                       |
| 5.2.3.17.07.     | Belanja modal Pengadaan alat sandi                                      |
| 5.2.3.17.08.     | Belanja Modal Pengadaan Antena  |
| <b>5.2.3.18.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>                           |
| 5.2.3.18.01.     | Belanja modal Pengadaan timbangan                                       |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.2.3.18.02.     | Belanja modal Pengadaan teodolite   |
| 5.2.3.18.03.     | Belanja modal Pengadaan alat uji emisi  |
| 5.2.3.18.04.     | Belanja modal Pengadaan alat GPS  |
| 5.2.3.18.05.     | Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi                             |
| 5.2.3.18.06.     | Belanja modal Pengadaan bejana ukur   |
| 5.2.3.18.07.     | Belanja modal Pengadaan barometer   |
| 5.2.3.18.08.     | Belanja modal Pengadaan seismograph   |
| 5.2.3.18.09.     | Belanja modal Pengadaan ultrasonograph  |
| <b>5.2.3.19.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</b>                           |
| 5.2.3.19.01.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum                             |
| 5.2.3.19.02.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi                             |
| 5.2.3.19.03.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT                              |
| 5.2.3.19.04.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata                             |
| 5.2.3.19.05.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah                            |
| 5.2.3.19.06.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak                             |
| 5.2.3.19.07.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan |
| 5.2.3.19.08.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin                |
| 5.2.3.19.09.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi                       |
| 5.2.3.19.10.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi                        |
| 5.2.3.19.11.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi                        |
| 5.2.3.19.12.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan                            |
| 5.2.3.19.13.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi                                     |
| 5.2.3.19.14.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis                     |
| 5.2.3.19.15.     | Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan  |
| 5.2.3.19.16.     | Belanja Modal Pengadaan Inventaris Ruang Rawat Inap/Rawat Jalan               |
| <b>5.2.3.20.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>                         |
| 5.2.3.20.01.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi                        |
| 5.2.3.20.02.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi         |
| 5.2.3.20.03.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia                          |
| 5.2.3.20.04.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian                      |
| 5.2.3.20.05.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan                     |
| 5.2.3.20.06.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan                     |
| 5.2.3.20.07.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan                      |
| 5.2.3.20.08.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa                         |
| 5.2.3.20.09.     | Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah                    |
| <b>5.2.3.21.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>                               |
| 5.2.3.21.01.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan                                      |

| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 5.2.3.21.02.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over                                    |
| 5.2.3.21.03.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan under pass                                  |
| <b>5.2.3.22.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>                                   |
| 5.2.3.22.01.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung                                  |
| 5.2.3.22.02.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton                                   |
| 5.2.3.22.03.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang                       |
| 5.2.3.22.04.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air                  |
| <b>5.2.3.23.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>                               |
| 5.2.3.23.01.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan   |
| 5.2.3.23.02.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk   |
| 5.2.3.23.03.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan                                   |
| 5.2.3.23.04.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah                                 |
| 5.2.3.23.05.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi                                  |
| 5.2.3.23.06.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum                     |
| 5.2.3.23.07.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir   |
| 5.2.3.23.08.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air   |
| <b>5.2.3.24.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota</b>                |
| 5.2.3.24.01.     | Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan   |
| 5.2.3.24.02.     | Belanja modal Pengadaan lampu hias taman   |
| 5.2.3.24.03.     | Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota                                    |
| 5.2.3.24.04.     | Belanja Modal Pengadaan Taman dan Hutan Kota   |
| <b>5.2.3.25.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>                         |
| 5.2.3.25.01.     | Belanja modal Pengadaan instalasi listrik  |
| 5.2.3.25.02.     | Belanja modal Pengadaan instalasi telepon  |
| 5.2.3.25.03.     | Belanja Modal Penambahan Daya / Penurunan daya Listrik                               |
| <b>5.2.3.26.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>                       |
| 5.2.3.26.01.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor                           |
| 5.2.3.26.02.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan                           |
| 5.2.3.26.03.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas                             |
| 5.2.3.26.04.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang                           |
| 5.2.3.26.05.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah                     |
| 5.2.3.26.06.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen                        |
| 5.2.3.26.07.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan                                   |
| 5.2.3.26.08.     | Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan sarana dan prasarana umum                |
| 5.2.3.26.09.     | Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan publikasi (reklame, panggung, iklan)     |
| 5.2.3.26.10.     | Belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) |
| 5.2.3.26.11.     | Belanja modal pengadaan konstruksi papan peresmian                                   |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| <b>5.2.3.27.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>                     |
| 5.2.3.27.01.     | Belanja modal Pengadaan buku matematika                             |
| 5.2.3.27.02.     | Belanja modal Pengadaan buku fisika                                 |
| 5.2.3.27.03.     | Belanja modal Pengadaan buku kimia                                  |
| 5.2.3.27.04.     | Belanja modal Pengadaan buku biologi                                |
| 5.2.3.27.05.     | Belanja modal Pengadaan buku biografi                               |
| 5.2.3.27.06.     | Belanja modal Pengadaan buku geografi                               |
| 5.2.3.27.07.     | Belanja modal Pengadaan buku astronomi                              |
| 5.2.3.27.08.     | Belanja modal Pengadaan buku arkeologi                              |
| 5.2.3.27.09.     | Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra                      |
| 5.2.3.27.10.     | Belanja modal Pengadaan buku keagamaan                              |
| 5.2.3.27.11.     | Belanja modal Pengadaan buku sejarah                                |
| 5.2.3.27.12.     | Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya                        |
| 5.2.3.27.13.     | Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum                  |
| 5.2.3.27.14.     | Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial                |
| 5.2.3.27.15.     | Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan        |
| 5.2.3.27.16.     | Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi         |
| 5.2.3.27.17.     | Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia                           |
| 5.2.3.27.18.     | Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa                           |
| 5.2.3.27.19.     | Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan                   |
| 5.2.3.27.20.     | Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan               |
| 5.2.3.27.21.     | Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan           |
| 5.2.3.27.22.     | Belanja modal Pengadaan buku naskah                                 |
| 5.2.3.27.23.     | Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, compact disk)     |
| 5.2.3.27.24.     | Belanja modal Pengadaan mikrofilm                                   |
| 5.2.3.27.25.     | Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe                            |
| 5.2.3.27.26.     | Belanja modal pengadaan alat permainan edukatif                     |
| 5.2.3.27.27.     | Belanja Modal Pengadaan Buku Mata Pelajaran Sekolah                 |
| 5.2.3.27.28.     | Belanja Modal Pengadaan Buku Referensi                              |
| 5.2.3.27.29.     | Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah                   |
| <b>5.2.3.28.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan</b> |
| 5.2.3.28.01.     | Belanja modal Pengadaan lukisan/foto                                |
| 5.2.3.28.02.     | Belanja modal Pengadaan patung                                      |
| 5.2.3.28.03.     | Belanja modal Pengadaan ukiran                                      |
| 5.2.3.28.04.     | Belanja modal Pengadaan pahatan                                     |
| 5.2.3.28.05.     | Belanja modal Pengadaan batu alam                                   |
| 5.2.3.28.06.     | Belanja modal Pengadaan maket/miniatur/diorama                      |

| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 5.2.3.28.07.     | Belanja Modal Alat Kesenian/Musik                              |
| 5.2.3.28.08.     | Belanja Modal Alat-alat Olah Raga                              |
| <b>5.2.3.29.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman</b>        |
| 5.2.3.29.01.     | Belanja modal Pengadaan hewan kebun binatang                   |
| 5.2.3.29.02.     | Belanja modal Pengadaan ternak                                 |
| 5.2.3.29.03.     | Belanja modal Pengadaan tanaman                                |
| 5.2.3.29.04.     | Belanja Modal Plasma, Nutfah Keanekaragaman Hayati dan Hewani  |
| <b>5.2.3.30.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan</b> |
| 5.2.3.30.01.     | Belanja modal Pengadaan senjata api                            |
| 5.2.3.30.02.     | Belanja modal Pengadaan radar                                  |
| 5.2.3.30.03.     | Belanja modal Pengadaan mobil water canon                      |
| 5.2.3.30.04.     | Belanja modal Pengadaan borgol                                 |
| 5.2.3.30.05.     | Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet                        |
| 5.2.3.30.06.     | Belanja modal Pengadaan perisai/tameng                         |
| 5.2.3.30.07.     | Belanja modal Pengadaan detektor logam                         |
| 5.2.3.30.08.     | Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru                      |
| 5.2.3.30.09.     | Belanja modal Pengadaan pentungan                              |
| 5.2.3.30.10.     | Belanja modal Pengadaan helm                                   |
| 5.2.3.30.11.     | Belanja modal Pengadaan alarm/sirene                           |
| 5.2.3.30.12.     | Belanja modal Pengadaan sentolop/senter                        |
| 5.2.3.30.13.     | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran            |
| 5.2.3.30.14.     | Belanja Modal Pengadaan Peralatan SAR                          |
| <b>5.2.3.31.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga</b>       |
| 5.2.3.31.01.     | Belanja Modal Perlengkapan Rumah Tangga (Rumah Dinas)          |
| 5.2.3.31.02.     | Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput                  |
| <b>5.2.3.32.</b> | <b>Belanja Modal Peralatan Industri Kecil dan Menengah</b>     |
| 5.2.3.32.01.     | Belanja Modal Peralatan Industri Sandang                       |
| 5.2.3.32.02.     | Belanja Modal Peralatan Industri Makanan Olahan                |
| 5.2.3.32.03.     | Belanja Modal Peralatan Industri Kerajinan                     |
| <b>5.2.3.33.</b> | <b>Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perhubungan</b>           |
| 5.2.3.33.01.     | Belanja modal pengadaan fasilitas perlengkapan jalan           |
| <b>5.2.3.34.</b> | <b>Belanja Modal BLUD</b>                                      |
| 5.2.3.34.01.     | Belanja Modal BLUD RSUD  |
| 5.2.3.34.02.     | Belanja Modal BLUD Puskesmas                                   |
| <b>5.2.3.35.</b> | <b>Belanja Modal Dana BOS</b>                                  |
| 5.2.3.35.01.     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS                     |
| 5.2.3.35.02.     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS                      |

| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 5.2.3.35.03.     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana BOS   |
| <b>5.2.3.36.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Tanah</b>  |
| 5.2.3.36.01.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah kantor  |
| 5.2.3.36.02.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana kesehatan rumah sakit                      |
| 5.2.3.36.03.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana kesehatan puskesmas                        |
| 5.2.3.36.04.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana kesehatan poliklinik                       |
| 5.2.3.36.05.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak               |
| 5.2.3.36.06.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar                   |
| 5.2.3.36.07.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan      |
| 5.2.3.36.08.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan  |
| 5.2.3.36.09.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus               |
| 5.2.3.36.10.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus            |
| 5.2.3.36.11.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana sosial panti asuhan                        |
| 5.2.3.36.12.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana sosial panti jompo                         |
| 5.2.3.36.13.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum terminal                              |
| 5.2.3.36.14.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum dermaga                               |
| 5.2.3.36.15.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis             |
| 5.2.3.36.16.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum rumah potong hewan                    |
| 5.2.3.36.17.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan                |
| 5.2.3.36.18.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum pasar                                 |
| 5.2.3.36.19.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah        |
| 5.2.3.36.20.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum taman                                 |
| 5.2.3.36.21.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat                  |
| 5.2.3.36.22.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum ibadah                                |
| 5.2.3.36.23.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana stadion olahraga                           |
| 5.2.3.36.24.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah perumahan   |
| 5.2.3.36.25.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah pertanian   |
| 5.2.3.36.26.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah perkebunan  |
| 5.2.3.36.27.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah perikanan   |
| 5.2.3.36.28.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah peternakan  |
| 5.2.3.36.29.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah perkampungan                                      |
| 5.2.3.36.30.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku |
| 5.2.3.36.31.     | Belanja modal Pemeliharaan tanah Untuk Sarana & Prasarana umum                     |
| <b>5.2.3.37.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Berat</b>                                  |
| 5.2.3.37.01.     | Belanja modal Pemeliharaan traktor   |
| 5.2.3.37.02.     | Belanja modal Pemeliharaan buldozer  |
| 5.2.3.37.03.     | Belanja modal Pemeliharaan stoom wals  |



| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 5.2.3.37.04.     | Belanja modal Pemeliharaan eskavator  |
| 5.2.3.37.05.     | Belanja modal Pemeliharaan dump truk  |
| 5.2.3.37.06.     | Belanja modal Pemeliharaan crane  |
| 5.2.3.37.07.     | Belanja modal Pemeliharaan kendaraan penyapu jalan  |
| 5.2.3.37.08.     | Belanja modal Pemeliharaan mesin pengolah semen   |
| 5.2.3.37.09.     | Belanja modal Pemeliharaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)                      |
| <b>5.2.3.38.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan</b>  |
| 5.2.3.38.01.     | Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor                                  |
| 5.2.3.38.02.     | Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor                            |
| 5.2.3.38.03.     | Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor                            |
| 5.2.3.38.04.     | Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor                      |
| 5.2.3.38.05.     | Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Udara   |
| <b>5.2.3.39.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Bengkel, alat uji dan Alat Ukur</b>                   |
| 5.2.3.39.01.     | Belanja Modal Pemeliharaan Alat Bengkel   |
| 5.2.3.39.02.     | Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat uji  |
| 5.2.3.39.03.     | Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Ukur   |
| <b>5.2.3.40.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>               |
| 5.2.3.40.01.     | Belanja Modal Pemeliharaan Alat Pengolahan Pertanian  |
| 5.2.3.40.02.     | Belanja Modal Pemeliharaan Alat Pengolahan Peternakan   |
| <b>5.2.3.41.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan/ perlengkapan Kantor dan rumah tangga</b>             |
| 5.2.3.41.01.     | Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan Kantor   |
| 5.2.3.41.02.     | Belanja Modal Pemeliharaan Perlengkapan Kantor  |
| 5.2.3.41.03.     | Belanja Modal Pemeliharaan mebeulair  |
| 5.2.3.41.04.     | Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan rumah tangga                            |
| <b>5.2.3.42.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Komputer</b>  |
| 5.2.3.42.01.     | Belanja modal Pemeliharaan komputer mainframe/server  |
| 5.2.3.42.02.     | Belanja modal Pemeliharaan komputer/PC  |
| 5.2.3.42.03.     | Belanja modal Pemeliharaan komputer note book   |
| 5.2.3.42.04.     | Belanja modal Pemeliharaan printer  |
| 5.2.3.42.05.     | Belanja modal Pemeliharaan scaner   |
| 5.2.3.42.06.     | Belanja modal Pemeliharaan monitor/display  |
| 5.2.3.42.07.     | Belanja modal Pemeliharaan CPU  |
| 5.2.3.42.08.     | Belanja modal Pemeliharaan UPS/stabilizer   |
| 5.2.3.42.09.     | Belanja modal Pemeliharaan kelengkapan komputer (Software, mouse, keyboard, hardisk, speaker) |
| 5.2.3.42.10.     | Belanja modal Pemeliharaan peralatan jaringan komputer  |
| <b>5.2.3.43.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi</b>                   |

| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 5.2.3.43.01.     | Belanja Modal Pemeliharaan Alat Studio   |
| 5.2.3.43.02.     | Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi                                  |
| <b>5.2.3.44.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran</b>                           |
| 5.2.3.44.01.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran umum                             |
| 5.2.3.44.02.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran gigi                             |
| 5.2.3.44.03.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran THT                              |
| 5.2.3.44.04.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran mata                             |
| 5.2.3.44.05.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran bedah                            |
| 5.2.3.44.06.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran anak                             |
| 5.2.3.44.07.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan |
| 5.2.3.44.08.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin                |
| 5.2.3.44.09.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran kardiologi                       |
| 5.2.3.44.10.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran neurologi                        |
| 5.2.3.44.11.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran orthopedi                        |
| 5.2.3.44.12.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran hewan                            |
| 5.2.3.44.13.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat farmasi                                     |
| 5.2.3.44.14.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat penyakit dalam/internis                     |
| 5.2.3.44.15.     | Belanja Modal Pemeliharaan Alat Kesehatan  |
| 5.2.3.44.16.     | Belanja Modal Pemeliharaan Inventaris Ruang Rawat inap / Rawat jalan             |
| <b>5.2.3.45.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium</b>                         |
| 5.2.3.45.01.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium biologi                        |
| 5.2.3.45.02.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi         |
| 5.2.3.45.03.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium kimia                          |
| 5.2.3.45.04.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium pertanian                      |
| 5.2.3.45.05.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium peternakan                     |
| 5.2.3.45.06.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium perkebunan                     |
| 5.2.3.45.07.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium perikanan                      |
| 5.2.3.45.08.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium bahasa                         |
| 5.2.3.45.09.     | Belanja modal Pemeliharaan alat-alat peraga / praktik sekolah                    |
| <b>5.2.3.46.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi Jalan</b>                               |
| 5.2.3.46.01.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jalan                                      |
| 5.2.3.46.02.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jalan fly over                             |
| 5.2.3.46.03.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jalan under pass                           |
| <b>5.2.3.47.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi Jembatan</b>                            |
| 5.2.3.47.01.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jembatan gantung                           |
| 5.2.3.47.02.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jembatan ponton                            |
| 5.2.3.47.03.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jembatan penyebrangan orang                |

| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 5.2.3.47.04.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air                 |
| <b>5.2.3.48.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air</b>                              |
| 5.2.3.48.01.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi bendungan  |
| 5.2.3.48.02.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi waduk  |
| 5.2.3.48.03.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi kanal permukaan                                  |
| 5.2.3.48.04.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi kanal bawah tanah                                |
| 5.2.3.48.05.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi                                 |
| 5.2.3.48.06.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jaringan air bersih/air minum                    |
| 5.2.3.48.07.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi reservoir  |
| 5.2.3.48.08.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi pintu air  |
| <b>5.2.3.49.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota</b>               |
| 5.2.3.49.01.     | Belanja modal Pemeliharaan lampu hias jalan  |
| 5.2.3.49.02.     | Belanja modal Pemeliharaan lampu hias taman  |
| 5.2.3.49.03.     | Belanja modal Pemeliharaan lampu penerang hutan kota                                   |
| 5.2.3.49.04.     | Belanja modal Pemeliharaan Taman dan Hutan Kota  |
| <b>5.2.3.50.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>                        |
| 5.2.3.50.01.     | Belanja modal Pemeliharaan instalasi listrik   |
| 5.2.3.50.02.     | Belanja modal Pemeliharaan instalasi telepon   |
| <b>5.2.3.51.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>                      |
| 5.2.3.51.01.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian gedung kantor                          |
| 5.2.3.51.02.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian rumah jabatan                          |
| 5.2.3.51.03.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian rumah dinas                            |
| 5.2.3.51.04.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian gedung gudang                          |
| 5.2.3.51.05.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah                    |
| 5.2.3.51.06.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian bangunan monumen                       |
| 5.2.3.51.07.     | Belanja modal Pemeliharaan konstruksi tugu peringatan                                  |
| 5.2.3.51.08.     | Belanja Modal Pemeliharaan Kontruksi Bangunan Sarana dan Prasarana Umum                |
| 5.2.3.51.09.     | Belanja Modal Pemeliharaan Kontruksi Bangunan Publikasi (Reklame, Panggung, Iklan dsj) |
| 5.2.3.51.10.     | Belanja Modal Pemeliharaan Kontruksi Bangunan Sekolah                                  |
| <b>5.2.3.52.</b> | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan</b>                      |
| 5.2.3.52.01.     | Belanja modal Pemeliharaan senjata api   |
| 5.2.3.52.02.     | Belanja modal Pemeliharaan Persenjataan non senjata Api                                |
| 5.2.3.52.03.     | Belanja modal Pemeliharaan Alat-alat keamanan  |
| <b>5.2.3.53.</b> | <b>Belanja Modal Peralatan Industri Kecil dan Menengah</b>                             |
| 5.2.3.53.01.     | Belanja Modal Peralatan Industri Sandang   |
| 5.2.3.53.02.     | Belana Modal Peralatan Industri Makanan Olahan   |
| 5.2.3.53.03.     | Belanja Modal Peralatan Industri Kerajinan   |

| Kode Rekening | Uraian  |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 5.2.3.54.     | <b>Belanja Modal Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan</b>         |
| 5.2.3.54.01.  | Belanja modal Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan         |
| 5.2.3.55.     | <b>Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b> |
| 5.2.3.55.01.  | Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kelurahan                    |

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

**KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH**

Hal 1 dari 5

| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| <b>6.</b>        | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>   |
| <b>6.1.</b>      | <b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>  |
| <b>6.1.1.</b>    | <b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)</b>             |
| <b>6.1.1.01.</b> | <b>Pelampauan penerimaan PAD</b>   |
| 6.1.1.01.01.     | Pajak Daerah   |
| 6.1.1.01.02.     | Retribusi Daerah   |
| 6.1.1.01.03.     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                  |
| 6.1.1.01.04.     | Lain-Lain PAD yang sah   |
| <b>6.1.1.02.</b> | <b>Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan</b>                                      |
| 6.1.1.02.01.     | Bagi Hasil Pajak   |
| 6.1.1.02.02.     | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam  |
| 6.1.1.02.03.     | Pelampauan DAU   |
| 6.1.1.02.04.     | Pelampauan DAK   |
| <b>6.1.1.03.</b> | <b>Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>                  |
| 6.1.1.03.01.     | Pendapatan Hibah   |
| 6.1.1.03.02.     | Dana Darurat   |
| 6.1.1.03.03.     | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya                       |
| 6.1.1.03.04.     | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  |
| 6.1.1.03.05.     | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya                      |
| <b>6.1.1.04.</b> | <b>Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya</b>                                |
| 6.1.1.04.01.     | Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung  |
| 6.1.1.04.02.     | Belanja Pegawai dari Belanja Langsung  |
| 6.1.1.04.03.     | Belanja Barang dan Jasa  |
| 6.1.1.04.04.     | Belanja Modal  |
| 6.1.1.04.05.     | Belanja Bunga  |
| 6.1.1.04.06.     | Belanja Subsidi  |
| 6.1.1.04.07.     | Belanja Hibah  |
| 6.1.1.04.08.     | Belanja Bantuan Sosial   |
| 6.1.1.04.09.     | Belanja Belanja Bagi Hasil   |
| 6.1.1.04.10.     | Belanja Bantuan Keuangan   |
| 6.1.1.04.11.     | Belanja Tidak Terduga  |
| <b>6.1.1.05.</b> | <b>Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan</b> |
| 6.1.1.05.01.     | Uang jaminan .....   |
| 6.1.1.05.02.     | Potongan Taspen  |
| 6.1.1.05.03.     | Potongan Beras   |
| 6.1.1.05.04.     | Asuransi Kesehatan   |
| <b>6.1.1.06.</b> | <b>Kegiatan lanjutan</b>   |
| 6.1.1.06.01.     | Kegiatan lanjutan  |
| <b>6.1.1.07.</b> | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>                             |
| 6.1.1.07.01.     | Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya                                    |
| <b>6.1.1.08.</b> | <b>Sisa Belanja DAK</b>  |
| 6.1.1.08.01.     | DAK Bidang Pendidikan  |

| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 6.1.1.08.02.     | DAK Bidang Kesehatan   |
| 6.1.1.08.03.     | DAK Bidang Pekerjaan Umum  |
| 6.1.1.08.04.     | DAK Bidang Kelautan dan Perikanan                                      |
| 6.1.1.08.05.     | DAK Bidang Pertanian   |
| 6.1.1.08.06.     | DAK Bidang Lingkungan Hidup  |
| 6.1.1.08.07.     | DAK Bidang Kependudukan  |
| 6.1.1.08.08.     | DAK Bidang Jalan   |
| 6.1.1.08.09.     | DAK Bidang Irigasi   |
| 6.1.1.08.10.     | DAK Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan                         |
| 6.1.1.08.11.     | DAK Bidang Keluarga Berencana  |
| 6.1.1.08.12.     | DAK Bidang Kehutanan   |
| 6.1.1.08.13.     | DAK Bidang Sarana Prasarana Daerah Tertinggal                          |
| 6.1.1.08.14.     | DAK Bidang Perdagangan   |
| 6.1.1.08.15.     | DAK Bidang Sanitasi  |
| 6.1.1.08.16.     | DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat                              |
| 6.1.1.08.17.     | DAK Bidang Prasarana Pemerintah Daerah                                 |
| 6.1.1.08.18.     | DAK Infrastruktur Publik Daerah  |
| 6.1.1.08.19.     | DAK Sarana dan Prasarana Penunjang                                     |
| 6.1.1.08.20.     | DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD                              |
| 6.1.1.08.21.     | DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD                           |
| 6.1.1.08.22.     | DAK Non Fisik Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi              |
| 6.1.1.08.23.     | DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD                 |
| 6.1.1.08.24.     | DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan                            |
| 6.1.1.08.25.     | DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit                                   |
| 6.1.1.08.26.     | DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas                                     |
| 6.1.1.08.27.     | DAK Non Fisik Jaminan Persalinan                                       |
| 6.1.1.08.28.     | DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana                   |
| 6.1.1.08.29.     | DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 6.1.1.08.30.     | DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan                    |
| <b>6.1.1.09.</b> | <b>Sisa Belanja Dana Bagi Hasil</b>                                    |
| 6.1.1.09.01.     | Dana Bagi Hasil PBB  |
| 6.1.1.09.02.     | Dana Bagi Hasil PPh  |
| 6.1.1.09.03.     | Dana Bagi Hasil SDA Iuran Hak Pengusahaan Hutan                        |
| 6.1.1.09.04.     | Dana Bagi Hasil SDA Sumber Daya Hutan                                  |
| 6.1.1.09.05.     | Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi   |
| 6.1.1.09.06.     | Dana Bagi Hasil Iuran Tetap  |
| 6.1.1.09.07.     | Dana Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)       |
| 6.1.1.09.08.     | Dana Bagi Hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan                         |
| 6.1.1.09.09.     | Dana Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan                               |
| 6.1.1.09.10.     | Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi                               |
| 6.1.1.09.11.     | Dana Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi (Gas Alam)                       |
| 6.1.1.09.12.     | Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi                                |
| 6.1.1.09.13.     | Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan Umum                               |
| <b>6.1.1.10.</b> | <b>Sisa Belanja Dana Penyesuaian</b>                                   |
| 6.1.1.10.01.     | Dana Penyesuaian BOS   |

| Kode Rekening    | Uraian  |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| 6.1.1.10.02.     | Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD   |
| 6.1.1.10.03.     | Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru   |
| 6.1.1.10.04.     | Dana Penyesuaian Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD  |
| 6.1.1.10.05.     | Dana Penyesuaian DID  |
| 6.1.1.10.06.     | Dst....   |
| <b>6.1.2.</b>    | <b>Pencairan Dana Cadangan</b>  |
| <b>6.1.2.01.</b> | <b>Pencairan Dana Cadangan</b>  |
| 6.1.2.01.01.     | Pencairan Dana Cadangan.  |
| <b>6.1.3.</b>    | <b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>                                      |
| <b>6.1.3.01.</b> | <b>Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD</b>   |
| 6.1.3.01.01.     | BUMD  |
| <b>6.1.3.02.</b> | <b>Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga</b> |
| 6.1.3.02.01.     | Badan.....  |
| 6.1.3.02.02.     | Masyarakat Petani/Peternak/Pedagang   |
| <b>6.1.4.</b>    | <b>Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah</b>                                       |
| <b>6.1.4.01.</b> | <b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah</b>   |
| 6.1.4.01.01.     | Penerusan pinjaman.....   |
| <b>6.1.4.02.</b> | <b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain</b>                               |
| 6.1.4.02.01.     | Pemerintah daerah .....   |
| <b>6.1.4.03.</b> | <b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank</b>                                |
| 6.1.4.03.01.     | Bank .....  |
| <b>6.1.4.04.</b> | <b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank</b>                          |
| 6.1.4.04.01.     | Lembaga keuangan bukan bank .....   |
| <b>6.1.4.05.</b> | <b>Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah</b>  |
| 6.1.4.05.01.     | Obligasi atas nama..  |
| 6.1.4.05.02.     | obligasi nomor.....   |
| <b>6.1.5.01.</b> | <b>Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman</b>   |
| 6.1.5.01.01.     | Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman  |
| <b>6.1.6.</b>    | <b>Penerimaan piutang daerah</b>  |
| <b>6.1.6.01.</b> | <b>Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah</b>                                     |
| 6.1.6.01.01.     | Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah                                      |
| 6.1.6.01.02.     | Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah                                  |
| 6.1.6.01.03.     | Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah                                |
| <b>6.1.6.02.</b> | <b>Penerimaan piutang daerah dari pemerintah</b>  |
| 6.1.6.02.01.     | Penerimaan piutang daerah dari pemerintah   |
| <b>6.1.6.03.</b> | <b>Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain</b>                                |
| 6.1.6.03.01.     | Pemerintah daerah .....   |
| <b>6.1.6.04.</b> | <b>Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank</b>                                 |
| 6.1.6.04.01.     | Bank .....  |
| <b>6.1.6.05.</b> | <b>Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank</b>                           |
| 6.1.6.05.01.     | Lembaga keuangan bukan bank .....   |
| <b>6.1.7.</b>    | <b>Penerimaan Dana Talangan</b>   |
| <b>6.1.7.01.</b> | <b>Penerimaan Dana Talangan Dari Propinsi</b>   |
| 6.1.7.01.01.     | Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan   |
| <b>6.1.7.02.</b> | <b>Penerimaan Kembali Dana Talangan</b>   |

| Kode Rekening    | Uraian   |
|------------------|--|
| 1                | 2  |
| 6.1.7.02.01.     | Penerimaan Kembali Dana Talangan Pengadaan Pangan                                    |
| <b>6.1.8.</b>    | <b>Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir</b>                                    |
| <b>6.1.8.01.</b> | <b>Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir</b>                                    |
| 6.1.8.01.01.     | Penerimaan Kembali Dana Bergulir Dari Kelompok Masyarakat                            |
| <b>6.1.9.</b>    | <b>Penerimaan Pinjaman BLUD</b>  |
| <b>6.1.9.01.</b> | <b>Penerimaan Pinjaman BLUD dari lembaga Perbankan</b>                               |
| 6.1.9.01.01.     | Penerimaan Pinjaman BLUD dari lembaga Perbankan                                      |
| <b>6.2.</b>      | <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>   |
| <b>6.2.1.</b>    | <b>Pembentukan Dana Cadangan</b>   |
| <b>6.2.1.01.</b> | <b>Pembentukan Dana Cadangan</b>   |
| 6.2.1.01.01.     | Pembentukan Dana Cadangan.   |
| <b>6.2.2.</b>    | <b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>                                |
| <b>6.2.2.01.</b> | <b>Badan usaha milik pemerintah (BUMN)</b>   |
| 6.2.2.01.01.     | BUMN .....   |
| <b>6.2.2.02.</b> | <b>Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</b>   |
| 6.2.2.02.01.     | Bank Jateng  |
| 6.2.2.02.02.     | PDAM Kabupaten Semarang  |
| 6.2.2.02.03.     | Apotek Sidowaras   |
| 6.2.2.02.04.     | BPR BKK Ungaran  |
| 6.2.2.02.05.     | BPR BKK Susukan  |
| 6.2.2.02.06.     | Badan Kredit Produksi Desa   |
| 6.2.2.02.07.     | Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jateng (PRPP)                                 |
| <b>6.2.2.03.</b> | <b>Badan usaha milik swasta</b>  |
| 6.2.2.03.01.     | Badan...   |
| 6.2.2.03.02.     | Masyarakat Petani/Peternak/Pedagang  |
| <b>6.2.2.04.</b> | <b>Penyaluran Dana Bergulir</b>  |
| 6.2.2.04.01.     | Dana Bergulir  |
| <b>6.2.3.</b>    | <b>Pembayaran Pokok Utang</b>  |
| <b>6.2.3.01.</b> | <b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah</b>                     |
| 6.2.3.01.01.     | Penerusan pinjaman.....  |
| 6.2.3.01.02.     | Rekening Dana Investasi (RDI)  |
| <b>6.2.3.02.</b> | <b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah daerah lain</b>         |
| 6.2.3.02.01.     | Pemerintah daerah  |
| <b>6.2.3.03.</b> | <b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank</b>          |
| 6.2.3.03.01.     | Bank   |
| <b>6.2.3.04.</b> | <b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank</b>    |
| 6.2.3.04.01.     | Lembaga keuangan bukan Bank  |
| <b>6.2.3.05.</b> | <b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah</b>                     |
| 6.2.3.05.01.     | Penerusan pinjaman...  |
| <b>6.2.3.06.</b> | <b>Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain</b>      |
| 6.2.3.06.01.     | Pemerintah daerah....  |
| <b>6.2.3.07.</b> | <b>Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank</b>       |
| 6.2.3.07.01.     | Bank ....  |
| <b>6.2.3.08.</b> | <b>Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga keuangan bukan bank</b> |
| 6.2.3.08.01.     | Lembaga keuangan bukan bank...   |



| Kode Rekening | Uraian   |
|---------------|--|
| 1             | 2  |
| 6.2.3.09.     | <b>Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo</b>         |
| 6.2.3.09.01.  | Obligasi atas nama .....                                       |
| 6.2.3.09.02.  | Obligasi nomor.....  |
| 6.2.3.10.     | <b>Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo</b>   |
| 6.2.3.10.01.  | Obligasi atas nama ....  |
| 6.2.3.10.02.  | Obligasi nomor....   |
| 6.2.3.11.     | <b>Pembayaran pokok utang BLUD</b>                             |
| 6.2.3.11.01.  | Pembayaran Pokok utang BLUD kepada lembaga perbankan           |
| 6.2.4.        | <b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>                               |
| 6.2.4.01.     | <b>Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah</b>             |
| 6.2.4.01.01.  | Pemerintah   |
| 6.2.4.02.     | <b>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain</b> |
| 6.2.4.02.01.  | Pemerintah daerah ...  |
| 6.2.5.        | <b>Pengeluaran Dana Talangan</b>                               |
| 6.2.5.01.     | <b>Pengembalian Dana Talangan Ke Propinsi</b>                  |
| 6.2.5.01.01.  | Pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan                    |
| 6.2.5.02.     | <b>Pemberian Dana Talangan</b>                                 |
| 6.2.5.02.01.  | Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan                       |
| 6.3.          | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan                 |
| 8.            | <b>Rekening Koran Antar Unit</b>                               |
| 8.1           | <b>RK BUD</b>  |
| 8.1.1.        | RK BUD terhadap Bendahara Penerimaan SKPD                      |
| 8.1.2.        | RK BUD terhadap Bendahara Pengeluaran SKPD                     |
| 8.1.3.        | RK BUD terhadap Pengurus Barang SKPD                           |
| 8.2           | <b>RK SKPD</b>   |
| 8.2.1.        | RK Bendahara Penerimaan SKPD terhadap BUD                      |
| 8.2.2.        | RK Bendahara Pengeluaran SKPD terhadap BUD                     |
| 8.2.3.        | RK Pengurus Barang SKPD terhadap BUD                           |

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN